

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Brigida Intan Printina

NIM: 081314012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Brigida Intan Printina

NIM: 081314012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

SKRIPSI

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

Oleh:

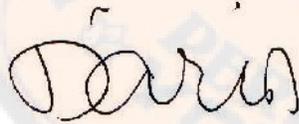
Brigida Intan Printina

081314012

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal, 4 Juli 2012



Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal, 4 Juli 2012



Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., M.Pd.

SKRIPSI

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Brigida Intan Printina

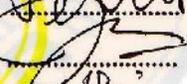
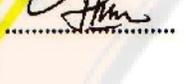
081314012

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 27 Juli 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Indra Darmawan, S.E., M.Si.	
Sekretaris	Dra. Theresia Sumini, M.Pd.	
Anggota	Dr. Anton Haryono, M.Hum	
Anggota	Drs. Y.R. Subakti, M.Pd	
Anggota	Dra. Theresia Sumini, M.Pd	

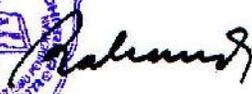
Yogyakarta, 27 Juli 2012

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Rohandi, Ph. D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ✿ Aktivis pejuang HAM perempuan yang berjuang sepanjang hidupnya menghapus diskriminasi dan eksploitasi perempuan.
- ✿ Para Tokoh Pejuang perempuan Indonesia yang telah memberi jutaan inspirasi dan sumbangan terhadap pendidikan di Indonesia.
- ✿ Semua pihak yang sudah membagikan kemampuan dan pengalamannya untuk menghargai hasil cipta, karya, dan sesama yang terpinggirkan.

HALAMAN MOTTO

“Esensi dari emosi positif terletak pada tindakan, yaitu mempraktekan apa yang kita ketahui akan menghasilkan buah-buah kebaikan, untuk diri sendiri dan juga sesama manusia, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan Pencipta...”

(Martin Wijongko)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.

(Ibu Kartini)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

Menurut ayah, menjadi gurulah yang terbaik bagi kami...Di mana lagi aku akan dapat menyebarkan cita-citaku secara lebih baik dari pada di situ, sebagai pendidik angkatan muda yang akan menjadi perempuan ibu masa depan?

(Ibu Kartini)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

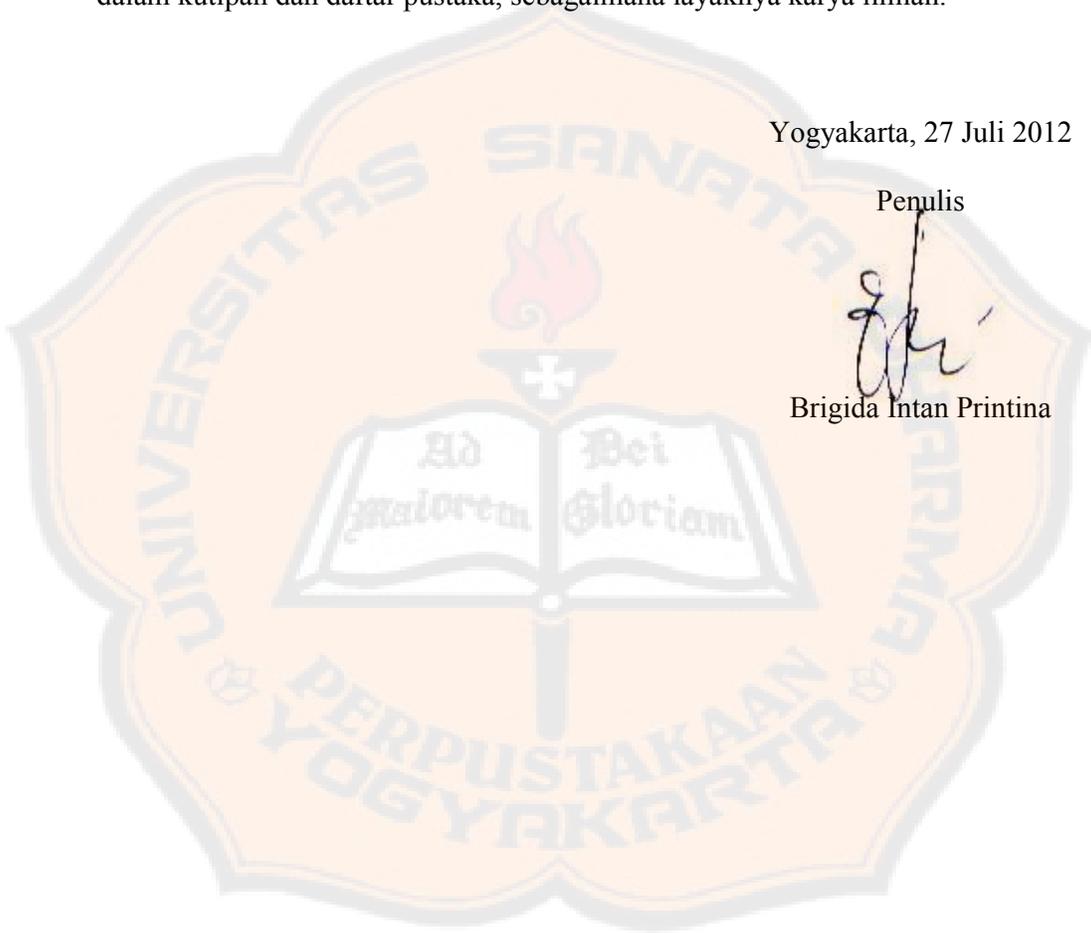
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 27 Juli 2012

Penulis



Brigida Intan Printina



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Brigida Intan Printina
Nomor Mahasiswa: 081314012

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 27 Juli 2012

Yang menyatakan



Brigida Intan Printina

ABSTRAK

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
DALAM TEKANAN POLITIK REZIM ORDE BARU**

Brigida Intan Printina
Universitas Sanata Dharma
2012

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: 1. Bagaimana latar belakang gerakan perempuan Indonesia pada masa pra-Orde Baru; 2. Mengapa Gerakan perempuan mendapat tekanan politik rezim Orde Baru; 3. Apa saja reaksi-reaksi gerakan perempuan Indonesia terhadap tekanan politik di akhir Orde Baru.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis, politik, ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Perempuan Indonesia mampu melawan berbagai bentuk penindasan sepanjang pra-Orde Baru. Dalam perjuangan itu, lahirlah pelopor-pelopor pergerakan perempuan yaitu R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Setelah itu, muncul berbagai organisasi perempuan dengan visi dan misi yang dibuktikan lewat peran mereka di berbagai bidang. (2) Bersamaan dengan lahirnya Orde Baru terjadilah berbagai perubahan dalam perjuangan pergerakan perempuan Indonesia. Perubahan tersebut tampak misalnya dalam upaya-upaya depolitisasi dan domestifikasi peran perempuan di Indonesia. Sejak itu gerakan perempuan mulai dibatasi. Pada masa itu dibentuk pula organisasi yang mengutamakan peran domestik dan mempengaruhi perkembangan ruang publik bagi perempuan Indonesia. (3) Sejak periode akhir Orde Baru, muncullah berbagai reaksi terhadap upaya depolitisasi dan domestifikasi tersebut. Untuk itu, organisasi perempuan yang tidak mendapat kesempatan membuat organisasi perempuan non-pemerintah. Mereka saling bekerjasama dan membentuk berbagai organisasi perempuan independen. Adapun yang program yang mereka perjuangkan adalah menghapus penindasan terhadap kaum marginal dan memperbaiki kehidupan sosial, sehingga perempuan Indonesia mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan pemerintah.

ABSTRACT

**INDONESIAN WOMEN'S MOVEMENT IN
POLITICAL PRESSURE UNDER NEW ORDER REGIME**

Brigida Intan Printina
Sanata Dharma University
2012

This study aims to describe and analyze three main problems, namely: (1) how the dynamics of Indonesian women's movement in the pre-New Order Era; (2) why women's movement was politically pressure by the New Order regime; and (3) what response did women's movement have forwards the political pressures made by the New Order regime.

The method of this study is a historical approach which takes several stages, gathering and selecting of sources, verification, interpretation, and historiography. This study uses multidimensional approaches, namely: historical approach with political, economic and social approach. The writing style of this study is descriptive-analytical.

The results of this study show that, first, during the colonial period Indonesian women were able to resist various forms of oppression by the colonial and feudalistic systems. As a result of their struggles they had women's pioneers movement, such as Dewi Sartika and Raden Ajeng Kartini. Each of these women's organizations had their own vision and mission as well as roles in various fields. Secondly, along with the birth of the New Order there was a variety of changes in the women's movement's struggle for the Indonesian independence. The changes were visible in the form "de-politicization" and "domestication" of women's roles during the New Order regime. Since then women's movement began to be restricted. During that period the New Order regime also formed organizations that prioritized women's domestic roles. The same government also influenced the development of public space for women in Indonesia. Thirdly, since the end of the New Order regime, there were mixed reactions to the depolitization and domestication efforts. Some women reacted by forming non-governmental women's organizations and they collaborated in carrying out the programs, such as removing the oppression of the marginalized members of the society and improving the social-economic life of women. They hoped that by doing so women in Indonesia will have greater trust from the public and the government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gerakan Perempuan Indonesia Dalam Tekanan Politik Rezim Orde Baru”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Anton Haryono, M.Hum., dan Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Theresia Sumini, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan dorongan, sehingga selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tugas akhir dapat berjalan dengan lancar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

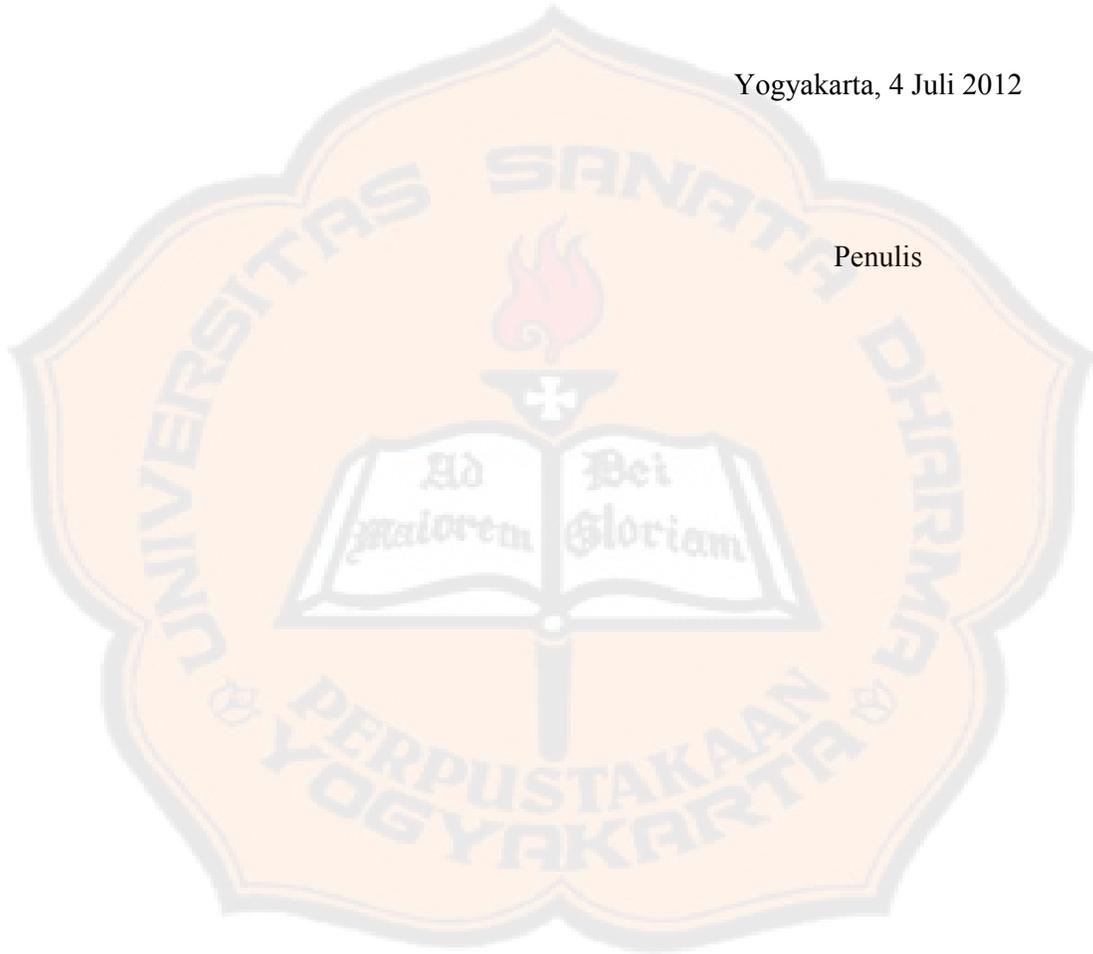
5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kolosani, yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan skripsi ini.
7. Kepada beberapa pihak yang memberikan sumber dan bahan skripsi diantaranya: Ibu Nunuk Prasetyo selaku aktivis perempuan dan mantan anggota Kongres Perempuan Indonesia (KPI), Rm. Baskara T. Wardaya, dan Mas Darwin Pusdep.
8. Kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan dorongan spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Adikku tercinta Agnes Berlina Printina, Budhe Wiwik, Budhe Aan, Bulik Andri, Bulik Tutik, Mbah Bono, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya.
10. Teman-teman kakak-kakak angkatan 2006, kakak-kakak angkatan 2007, semua teman angkatan 2008, dan seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Pondok Isti: Eyang, Devi, Qory, kak Kristin, kak Vivi, Veny, Yuni
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Landasan Teori	15
G. Metodologi Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II : GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA PRA-ORDE BARU	38
A. Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia	38
B. Pelopor Pergerakan Perempuan Indonesia	41
C. Alasan Para Pelopor Mendirikan Organisasi	

Perempuan Indonesia	42
D. Lahirnya Organisasi-Organisasi Perempuan dan Perkembangannya Pada Masa Pra-Orde Baru.....	43
1. Organisasi Perempuan pada Masa Pergerakan Nasional	44
a. Periode 1912-1928	44
b. Periode 1928-1942	47
c. Periode 1942-1945	52
2. Gerakan Perempuan pada Pasca Kemerdekaan.....	53
a. Gerakan Perempuan pada Masa Revolusi Nasional (1945-1949)	53
b. Pada Masa Demokrasi Liberal (1949-1959)	56
c. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	59
E. Peran Gerakan Perempuan pada Masa Pra-Orde Baru.....	60
1. Peran Gerakan Perempuan dalam Melaksanakan Program-program Perjuangan di Berbagai Bidang	60
a. Pendidikan	60
b. Sosial	63
c. Politik	64
2. Peran gerakan perempuan dalam aksi-aksi nasional dan daerah	65
a. Aksi Nasional	66
b. Aksi-aksi sosial di berbagai Daerah	71
BAB III : GERAKAN PEREMPUAN PADA MASA ORDE BARU:	
TEKANAN POLITIK DARI REZIM.....	74
A. Latar Belakang Orde Baru sebagai Awal Pembatasan Peran Perempuan Indonesia	74
B. Depolitisasi Gerakan Perempuan oleh Rezim Orde Baru	77
C. Alasan Gerakan Perempuan Dibatasi pada Masa Orde Baru dan Domestifikasi Peran Perempuan Indonesia	79
D. Organisasi Perempuan yang Dikehendaki Rezim Orde Baru	84
E. Organisasi Perempuan Bentuk (underbow) Orde Baru	87

1. Organisasi-organisasi Perempuan yang berdiri pada Masa Orde Baru	87
2. Organisasi Perempuan Berdasarkan Perkembangannya periode Orde Baru	89
3. Organisasi Perempuan Pra-Orde Baru dalam Aturan Rezim Orde Baru	92
BAB IV : REAKSI GERAKAN PEREMPUAN TERHADAP TEKANAN POLITIK REZIM DI AKHIR ORDE BARU	95
A. Wacana Peran Perempuan Orde Baru yang Mempengaruhi Perkembangan Perempuan Indonesia	101
B. Alasan Timbulnya Reaksi Gerakan Perempuan Indonesia Terhadap Kebijakan Orde Baru	103
C. Gerakan Kesadaran Perempuan Indonesia Terhadap Tekanan Politik Orde Baru	105
D. Aksi Gerakan Perempuan Karena Tekanan Politik di Akhir Orde Baru	107
1. Aksi Melalui Lembaga Masyarakat	107
2. Faktor-Faktor Gerakan Perempuan Bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah (Independen)	108
E. Munculnya Organisasi Perempuan Non-Pemerintah (independen)	113
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Pendukung Gerakan Perempuan Non-Pemerintah (Independen)	113
2. Beberapa LSM Perempuan yang Berdiri di Akhir Rezim Orde Baru	116
F. Program yang Ditawarkan LSM dan Organisasi Perempuan Non-Pemerintah (Independen)	120
BAB V : KESIMPULAN & REKOMENDASI	125
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR SINGKATAN.....	136
SUPLEMEN	138



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

	Halaman
Bagan 1.1 : Bagan Kerangka Berpikir	27
Bagan 2.1 : Gerakan Perempuan pada Masa Pra-Orde Baru.....	72
Bagan 3.1 : Latar belakang rezim Orde Baru	83
Bagan 3.2 : Alasan gerakan perempuan dibatasi pada masa Orde Baru	90
Bagan 3.2 : Aturan rezim Orde Baru terhadap organisasi perempuan Indonesia.....	92
Bagan. 3.3 : Organisasi perempuan bentukan Orde Baru	99
Tabel 4.1 : Kebijakan Politik Orde Baru dan pengaruhnya bagi gerakan Perempuan	106
Bagan 4.1 : Faktor-faktor gerakan perempuan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah.....	118
Bagan 4.2 : Organisasi perempuan non-pemerintah sebagai akibat Domestifikasi Perempuan pada masa Orde Baru.....	125
Bagan 4.3 : Program yang ditawarkan kepada LSM Perempuan	130

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : R.A Kartini dan Dewi Sartika sebagai pelopor pergerakan perempuan Indonesia	39
Gambar 2.2 : Periode 1912-1928 dikenal sebagai periode pendidikan bagi perempuan Indonesia (Van Deventer School Solo)	46
Gambar 2.3 : Semangat pergerakan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22-25 Desember, di Yogyakarta	47
Gambar 2.4 : 15 Desember 1928, Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia dari kiri ke kanan: Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa), Ibu Soekonto (Wanita Oetomo-Ketua Kongres), Nn. Soejatin (Putri Indonesia) sekarang Ibu Kartowijoyo	48
Gambar 2.5 : 22 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama.....	48
Gambar 2.6 : Peringatan Hari Ibu	49
Gambar 2.7 : KUPP Perwari disaksikan oleh konsultan Perwari Ms. Karen Smith menyerahkan penghargaan kepada seorang pengurus gedung (Seksi Umum).....	54
Gambar 2.8 : Kerjasama Perwari dan Soekarno dalam penyelenggaraan program Perwari.....	54
Gambar 2.9 : Aksi nasional oleh Nyonya Andres Sastrohusodo, dkk, menentang UU No. 19 tentang pensiun untuk para janda (di depan Nyonya Sukanto Mokoginta dan Soepeni)	55
Gambar 2.10: Anggota gerakan perempuan (sebelumnya Gerwis dan diganti Gerwani pada 1960)	57
Gambar 2.11: Dari kiri ke kanan, Rewang dkk. Foto bersama di depan rumah Menteng, Jakpus	58
Gambar 2.12: TK Perwari Tasik 1952-1953. Foto sekolah	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TK Perwari di Tasikmalaya.....	63
Gambar 2.13: Barisan Laskar Putri	66
Gambar 2.14: Salah satu aksi revolusioner Gerwani bersama pemuda lain dalam pemberontakan DI/TII.....	69
Gambar 3.1 : Perempuan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah di pabrik.....	89
Gambar 4.1 : Gerakan kesadaran perempuan di akhir rezim Orde Baru.....	111
Gambar 4.2 : Jalur politik sebagai pengembangan peran perempuan untuk menyalurkan aspirasi perempuan yang tertindas kepada pemerintah	127
Gambar 4.3 : Pengembangan Program LSM lewat jalur pendidikan (pendidikan bagi anak perempuan dan anak miskin).....	128
Gambar 4.4 : Kegiatan LSM Perempuan dalam menanggulangi benacana alam.....	129

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah gerakan perempuan¹ di Indonesia mengalami proses perkembangan yang penuh tantangan. Salah satu tantangannya ialah adanya aturan serta hukum kodrat yang harus disesuaikan dengan cita-cita gerakan perempuan pada masa itu. Untuk menunjukkan eksistensi dan peran serta dalam perjuangan kaum kaum perempuan yang tertindas, maka dibentuklah suatu gerakan yang dapat memperjuangkan kehidupan perempuan Indonesia. Organisasi ini diawali dengan sebuah organisasi yang dibangun pada masa pergerakan nasional, salah satunya ialah Putri Mardika yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Tujuan gerakan ini ialah mendukung adanya pendidikan bagi perempuan, dan mendorong perempuan dapat tampil di depan publik.²

Organisasi-organisasi perempuan semakin berkembang luas, dan dibuka secara resmi lewat Kongres Perempuan³ pertama, yang dilaksanakan di

¹ Pendefinisian gerakan perempuan secara menyeluruh ialah sebagai spektrum aksi yang dilakukan secara sadar dan tak sadar, baik individual maupun kolektif dari sekelompok atau organisasi yang bersangkutan dengan dilatarbelakangi berbagai aspek persoalan subordinasi gender. Hal ini dipahami sebagai sesuatu yang saling bersilangan dengan relasi penindasan seperti berdasarkan kelas, ras, etnis, usia, dan perbedaan jenis kelamin. Definisi ini sama dengan yang digunakan proses kolektif dalam menyusun buku tentang gender dan politik (Lycklama a Nijeholt cs (1998))... dalam *Penghancuran gerakan perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, oleh Saskia Weiringa, Yogyakarta, Galang Press, hlm 77

² Sebuah majalah mingguan mulai terbit pada 1913, memuat tentang pelarangan kawin anak-anak dan poligami. Pada 1919 memuat laporan kongres feminis di Paris (Vreede-de Stuers 1960:62), dalam *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, karya Saskia Eleonora Weiringa, Galang Pres, Yogyakarta, 2010, hlm 115

³ Nani Soewondo-Soerasno, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Djakarta, Timun Mas, 1955, hlm 128; atau Depdikbud dokumen sejarah nasional Jakarta, *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, Jakarta, Depdikbud, 1991, cetakan 1, hlm x; atau Sucanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Rajawali,

Yogyakarta, tanggal 22-25 Desember 1928. Tujuannya ialah untuk menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan, dan mempertinggi kecakapan perempuan. Aturan-aturan mengenai pendidikan bagi perempuan mulai ditetapkan pada masa itu, sehingga perlahan-lahan tantangan yang dihadapi perempuan untuk meraih cita-citanya dapat teratasi. Ada banyak organisasi perempuan yang mengikuti kongres ini, seperti kumpulan ibu rumah tangga dan kumpulan isteri para nasionalis, bahkan dalam lingkup besar mereka mampu mengorganisir kaumnya, diantaranya ialah Wanita Utomo, Aisyah, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulyo, bagian dari perempuan SI, Jong Islaminten, Wanita Taman Siswa dan ada sekitar 22 gerakan perempuan lainnya. Kongres Pertama ini menghasilkan federasi organisasi perempuan yang disebut Persatuan Perempuan Indonesia (PPI).⁴ Setahun kemudian PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII).⁵ PPII sangat giat di bidang pendidikan dan usaha penghapusan perdagangan perempuan. Pada tahun 1932, PPII mengangkat isu perjuangan melawan perdagangan perempuan dan salah satu keputusan penting yang diambil adalah mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A).⁶

1984; atau A. Nunuk Prasetyo, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm 17; atau Saskia Wieringa, *Kuntilanak Wangi: Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra, 1988, hlm 12

⁴ Saskia Eleonora Weiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, Yogyakarta, Galang Pres, 2010, hlm 133

⁵ Kongres di Jakarta tahun 1929 dihadiri oleh 50 organisasi perempuan. Nama federasi PPI, diubah menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia., dalam *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, karya Saskia Eleonora Weiringa, Yogyakarta, Galang Pres, 2010, hlm 134

⁶ A.K Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1970, hlm. 20-21

Setelah Kongres Perempuan Indonesia tingkat nasional pertama, gerakan perempuan semakin berkembang dengan banyaknya jenis organisasi perempuan yang semakin terbuka wawasannya. Tidak hanya kaum perempuan priayi, tetapi juga kaum perempuan sosialis dan kumpulan buruh perempuan. Pada periode sebelumnya, lingkup kegiatan organisasi perempuan hanya meliputi masalah emansipasi dan usaha menjadikan perempuan lebih sempurna dalam menjalankan peran tradisionalnya sebagai perempuan. Salah satunya ialah organisasi yang bergabung dalam PPPI (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia), organisasi ini menolak mencampuri urusan politik dan agama. Pada periode selanjutnya, muncullah organisasi-organisasi yang membuka wawasan perempuan, tidak hanya meliputi lingkup rumah tangga dan keluarga, tetapi juga menjadikan masalah-masalah politik dan agama sebagai pokok perhatiannya. Tujuannya ialah menghapus penindasan perempuan dan mengurangi rendahnya sumber daya kualitas perempuan.⁷

Pada tahun 1930, didirikan organisasi Isteri Sedar di Bandung. Selain berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, organisasi ini juga memperjuangkan penghargaan bagi kedudukan perempuan dan laki-laki, agar sejajar dan bersama-sama memperjuangkan politik dan sosial masyarakat. Gerakan ini bersikap anti imperialisme dan kolonialisme.⁸

Pada bulan Juni 1932, beberapa organisasi perempuan bergabung menjadi satu dengan nama "Isteri Indonesia" yang memperjuangkan Indonesia merdeka dengan dasar demokrasi. Gerakan ini, giat berusaha agar perempuan bisa

⁷ Meutia Hatta Swasono, *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta, website resmi, Senin 6 Februari 2012, hlm 1

⁸ *Ibid.*

duduk dalam dewan-dewan kota. Selain itu, dapat memperhatikan masalah perkawinan dan perceraian yang merugikan kaum perempuan pada masa itu.⁹

Pada kongres kedua, ketiga dan keempat (1935, 1938, dan 1941), PPPI membicarakan berbagai isu tentang kewajiban kebangsaan, masalah hak memilih dalam badan-badan perwakilan dan dewan kota, serta beberapa masalah politik lainnya.¹⁰

Pada tahun 1940, dibentuk organisasi perempuan di Jakarta. Organisasi ini diawali dengan sebuah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia, yang beranggotakan para perempuan yang bekerja di kantor, baik pemerintah ataupun swasta, sebagai guru, perawat, pegawai kantor, dan sebagainya. Pada periode ini masalah perempuan berada di sekitar usaha peningkatan profesi perempuan guna mendapat dukungan masyarakat dalam menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu.¹¹

Pada jaman Pendudukan Bala Tentara Jepang (1942-1945), penjajah Jepang melarang semua bentuk organisasi dan membubarkannya, termasuk gerakan perempuan. Kemudian dibentuk gerakan-gerakan baru sebagai propaganda untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia Timur Raya. Organisasi perempuan yang dibentuk oleh para isteri pegawai di daerah-daerah, dan diketuai oleh isteri masing-masing kepala daerah disebut Fujinkai. Kegiatan Fujinkai dibatasi hanya pada urusan-urusan keperempuanan dan peningkatan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pada 1940 berdirilah Pekerja Perempuan Indonesia, serikat buruh perempuan pertama. Anggotanya terdiri dari buruh yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, guru, perawat, dan perempuan yang bekerja keras. Mereka juga melakukan perlawanan terhadap diskriminasi di tempat kerja yang berhubungan dengan promosi kedudukan dan upah... dalam *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, karya Sukanti Suryochondro, Jakarta, Rajawali, 1948, hlm 32

keterampilan domestik, selain kegiatan merawat tentara yang sakit dan kursus buta huruf.¹² Bagi para perempuan sosialis yang tidak mendapat kesempatan berorganisasi dalam Fujinkai, pembatasan ini merisaukan. Kenyataan ini menjadikan adanya dua jenis orientasi di kalangan aktivis perempuan, di mana ada gerakan perempuan yang berkooperasi dengan pemerintah bala tentara Dai Nippon dan ada pula yang non-kooperatif atau memilih bergerak diam-diam di bawah tanah.¹³ Pada periode ini, penekanan masalah perempuan lebih kepada persoalan perbedaan misi antar gerakan perempuan dan strukturalisasi sistem organisasi perempuan dari pemerintah pendudukan Jepang.

Setelah kemerdekaan, organisasi perempuan kembali bergerak, akan tetapi karena pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia masih diliputi oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, perjuangan perempuan Indonesia ditujukan pada perjuangan dalam gerilya, membantu para pejuang bangsa. Selanjutnya, setelah Indonesia diperbolehkan mendirikan partai politik, maka sejumlah perempuan masuk menjadi anggota partai politik, bahkan pada tahun 1948 sempat berdiri Partai Wanita Rakyat atas inisiatif Ibu Sri Mangunsarkoro di Yogyakarta. Partai ini berazaskan ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan dan mempunyai program perjuangan yang sangat militan. Demikian juga dengan keputusan Kongres Kowani pada tahun 1948 dan 1949, sangat sarat dengan muatan politis dan semangat yang militan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan tahun 1950, hasil politik yang dicapai

¹² Saskia, *Op.cit*; hlm 144

¹³ Sebelum Fujinkai (kelompok perempuan setempat yang diketahui oleh istri pejabat tertinggi pemerintahan), ada pula Barisan Putri Asia Raya (bagian dari Tiga A yang sempat dibubarkan menjadi Putera)... dalam *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, karya Nani Suwondo, Jakarta, Ghalia, 1981a, hlm 177

kaum perempuan cukup signifikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun meningkat. Hal inilah yang memungkinkan perempuan untuk turut dalam pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang. Demikian juga di bidang eksekutif, pada tahun 1950 telah diangkat dua orang menteri perempuan, yaitu Ny. Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial dan Ny. S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuhan.¹⁴

Setelah tahun 1950, organisasi perempuan berkembang seiring dengan berkembangnya partai-partai di Indonesia. Banyak gerakan perempuan yang menjadi bagian dari suatu partai, seperti Wanita Marhaenis, Gerakan Wanita Sosial, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan lain-lain. Ada pula partai yang bergerak dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan, seperti Aisyiah dan Wanita Katolik. Selain itu, ada gerakan perempuan yang berdiri sendiri tanpa ikatan dengan partai lain, seperti Perwari, dan banyak gerakan perempuan yang bergerak di bidang sosial serta kesejahteraan masyarakat. Pada periode ini, gerakan perempuan lebih dinamis dan terlihat berbagai persoalan yang menjadi tantangan perkembangan gerakan perempuan, seperti perbedaan misi, dan perbedaan pemahaman tentang perkawinan. Salah satu faktor penyebabnya ialah adanya berbagai macam ideologi yang masuk pada masa setelah kemerdekaan seperti komunisme, marheanisme, dan liberalisme.

Perbedaan di kalangan organisasi perempuan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia menjadi meningkat. Persaingan tampak jelas antara gerakan perempuan yang pada saat itu lebih bekerjasama dengan partai politik

¹⁴ Partai Wanita Rakyat bersifat militan dengan prinsip pokok nasionalisme dan monogami... dalam *Peraturan tentang Wanita di Indonesia (The Role of Women in Indonesia)*, Cornell University, ketikan 80 h, 1957, karya Wilmort; Suryochondro 1948

dibanding dengan sesama organisasi perempuan.¹⁵ Dari situ, tampak adanya tekanan yang dihadapi organisasi-organisasi perempuan karena pengaruh-pengaruh politik pemerintahan yang juga saling bersaing.

Pada tahun 1961, berbagai gerakan perempuan muncul dengan semangat nasional dan bergerak dalam bidang sosial, seperti Perwari, Gerwani, dan Gerakan Wanita Sosial, mulai melakukan berbagai aksi-aksi nasional untuk menunjukkan perjuangan mereka yang sesungguhnya. Mereka menolak kenaikan harga dan krisis ekonomi pada masa itu, aktif dalam perjuangan merebut Irian Barat, aksi menentang AS dengan memboikot film-film yang merusak moral kaum muda bangsa. Gerakan-gerakan ini juga aktif membantu TNI dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta (1957-1958), RMS (1956), dan DI-TII (1951), dan juga melakukan aksi-aksi daerah menjadi sukarelawati.¹⁶

Selain gerakan perempuan, ada beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni, dua nama yang terkenal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Tidak hanya itu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga memiliki tokoh perempuan yaitu Walandauw. Demikian halnya di Partai Nadhlatul Ulama juga ada nama Mahmuda Mawardi dan HAS Wachid Hasyim. Sementara itu, Salawati Daud merupakan tokoh perempuan terkenal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perempuan diperhitungkan di panggung politik.¹⁷

¹⁵ Saskia, *Op. cit.*; hlm 161

¹⁶ Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI; Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta, CaravastiBooks, hlm 146

¹⁷ *Ibid.*

Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, semua organisasi isteri dan karyawan departemen bergabung menjadi Dharma Wanita yang didirikan pada 5 Agustus 1974. Isteri dari Angkatan Bersenjata pun berhimpun menurut kesatuan suaminya masing-masing, seperti Persit, Bayangkari.¹⁸

Pemerintah melihat posisi perempuan yang aktif dalam politik, maka peran perempuan perlu dimodifikasi untuk mendukung pembangunan nasional, tanpa menjadi pihak oposisi rezim Orde Baru. Untuk itu, perempuan dihimpun dalam tiga gerakan utama, yaitu PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, yang menyebar mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan.¹⁹ Pada masa ini, pergerakan perempuan dibingkai dalam jargon “perempuan dan pembangunan”, tidak ada pergerakan perempuan yang benar-benar independen untuk menentukan sendiri langkah dan agenda-agenda perjuangannya.

Pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru, isu gender mulai muncul, sehingga disadari bahwa perempuan harus diberdayakan. Dalam pembangunan yang bernuansa gender, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama dalam pembangunan, dapat berpartisipasi dan dapat mempunyai kesempatan yang sama dalam penetapan keputusan. Pada akhirnya pembangunan yang adil dapat dirasakan semua kalangan, dan masyarakat dapat menikmati keuntungan dari pembangunan tersebut bersama-sama. Pada periode ini permasalahan gerakan perempuan menjadi persoalan pokok, karena berkurangnya gerakan sosial yang mendukung aspirasi buruh dan rakyat kecil.

¹⁸ Meutia Hatta Swasono, *Loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tentang Gerakan Perempuan Indonesia dalam Tekanan Politik Rezim Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang gerakan perempuan Indonesia pada masa pra-Orde Baru?
2. Mengapa gerakan perempuan Indonesia mendapat tekanan politik dari rezim Orde Baru?
3. Apa saja reaksi gerakan perempuan terhadap tekanan politik rezim pada akhir Orde Baru?

Permasalahan pertama yang akan dibahas ialah bagaimana latar belakang gerakan perempuan Indonesia pada masa Pra-Orde Baru. Pada permasalahan ini antara lain akan dibahas; apakah sejarah gerakan perempuan Indonesia, siapa pelopor pergerakan perempuan Indonesia, mengapa para pelopor mendirikan organisasi perempuan Indonesia, bagaimana lahirnya organisasi-organisasi perempuan Indonesia dan perkembangannya selama masa Pra-Orde Baru. Selain itu, apa saja peran gerakan perempuan pada masa pra-Orde Baru.

Permasalahan kedua yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa gerakan perempuan Indonesia mendapat tekanan politik dari rezim Orde Baru. Pada permasalahan ini antara lain akan dibahas: bagaimana latar belakang politik Orde Baru sebagai awal pembatasan peran perempuan Indonesia, apakah depolitisasi gerakan perempuan oleh tekanan rezim Orde Baru, mengapa gerakan perempuan dibatasi pada masa Orde Baru; apakah organisasi perempuan yang

dikehendaki rezim orde baru; apa saja organisasi perempuan bentukan (underbow) Orde Baru.

Permasalahan ketiga adalah apa saja reaksi gerakan perempuan Indonesia terhadap tekanan politik Orde Baru. Dalam hal ini akan dibahas persoalan tentang; apakah wacana peran perempuan Orde Baru yang mempengaruhi perkembangan perempuan Indonesia, mengapa timbul reaksi gerakan perempuan Indonesia terhadap kebijakan Orde Baru, apakah gerakan kesadaran perempuan Indonesia terhadap tekanan politik Orde Baru, apa saja aksi gerakan perempuan karena tekanan politik di akhir Orde Baru Orde Baru, apa saja organisasi perempuan non-pemerintah (Independen), apa saja program yang ditawarkan LSM dan organisasi perempuan non-pemerintah (Independen) untuk membangun kesejahteraan kaum perempuan Indonesia.

Sebagai bentuk rasa keprihatinan atas masalah tersebut, penulis juga memberi suatu rekomendasi pada bagian akhir, dan evaluasi untuk seluruh permasalahan dalam penulisan ini. Hal ini dilakukan agar sejarah perempuan Indonesia dapat terus dikaji ulang, dan semakin banyak peminat sejarah dalam dunia pendidikan.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari diadakannya penelitian historis sebagai berikut:

1. Tujuan pertama untuk meninjau latar belakang gerakan perempuan Indonesia pada masa pra-Orde Baru.
2. Tujuan kedua untuk meninjau alasan gerakan perempuan Indonesia yang mendapat tekanan politik dari rezim Orde Baru.

3. Untuk meninjau reaksi gerakan perempuan pada akhir Orde Baru terhadap tekanan politik rezim.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari diadakannya penelitian historis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Skripsi ini diharapkan memenuhi persyaratan penelitian pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menambah referensi pengetahuan sejarah yang teruji, khususnya bagi pemerhati sejarah di Universitas Sanata Dharma.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berguna sebagai referensi, dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami sejarah gerakan perempuan Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan Indonesia.

3. Bagi Pengembangan Diri

Hasil penelitian ini selain sebagai sumber pengetahuan diharapkan juga dapat mempertajam cara berpikir penulis, dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan diri. Penulis juga berharap, tulisan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, berfungsi sebagai pelajaran tentang pentingnya menanamkan sikap menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dan tindakan sosial, agar tidak terjadi diskriminasi gender.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sejarah, ada beberapa unsur pokok yang penting khususnya dalam memahami metodologi sejarah. Dengan memahaminya, kita tidak hanya sekedar mendapat pengetahuan, tetapi juga sebagai acuan untuk terus mencoba menulis hal-hal yang dapat mengungkap kebenaran masa lalu, yang masih menjadi dilema pada masa sekarang ini. Sumber yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Habis Gelap Terbitlah Terang,²⁰ menjelaskan tentang awal kebangkitan perempuan Indonesia yang dipelopori oleh R. A. Kartini. Tulisan ini terdiri dari beberapa kumpulan surat yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan kaum perempuan Indonesia. Hal-hal tersebut diantaranya kawin paksa, poligami, perceraian dan kurangnya kesempatan bersekolah bagi para remaja perempuan pada awal abad ke 20.

Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,²¹ menjelaskan pergerakan perempuan Indonesia dari sudut sosiologi dan sejarah. Gerakan perempuan muncul sebagai reaksi atas adanya gerakan sosial dan kelompok-kelompok formal yang timbul dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akibatnya menunjukkan berbagai variasi dalam kehidupan berorganisasi dalam perkembangan masyarakat.

Kependudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,²² menjelaskan awal pergerakan perempuan Indonesia yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, yang menunjukkan alasan terbentuknya pergerakan

²⁰ Buku karangan R. AKartini, penerbit Balai Pustaka, cetakan 3, Jakarta, 1987

²¹ Buku karangan Sukanti Suyochondro, penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

²² Buku karangan Nani Soewondo-Soerasno, Timun Mas, Djakarta, 1955

perempuan. Kemudian disusul Raden Dewi Sartika sebagai pelopor kemajuan perempuan dengan pendirian sekolah-sekolah. Selain itu, menjelaskan pergerakan perempuan lainnya yang mulai muncul dari masa pergerakan nasional hingga perang kemerdekaan. Tulisan ini juga memaparkan tentang beberapa persoalan yang menjadi perhatian gerakan perempuan Indonesia.

Kuntulanak Wangi,²³ karangan Saskia E. Weiringa, menjelaskan tentang pergerakan perempuan dari masa kolonial hingga masa Orde Baru. Selain itu, mengkaji kegiatan gerakan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat keikutsertaannya dalam pembangunan, baik dijadikan sebagai subyek menurut pemahaman perempuan, maupun sebagai obyek bagi sebagian kalangan yang menemukan kesempatan dalam memperoleh kekuasaan politik. Tulisan yang hampir sama juga paparkan dalam sebuah karangan berjudul *Gerakan Perempuan dan Proses Demokrasi*,²⁴ karya Mansour Fakih.

Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru,²⁵ karya Kurniawati Hastuti Dewi. Di dalamnya berisikan kebijakan-kebijakan Orde Baru terkait pembentukan PKK dan Dharma Wanita. Penulisan lebih menekankan adanya demokratisasi dan perkembangan internasional, serta masalah perempuan yang terus membuka peluang dekonstruksi ideologi gender Orde Baru.

²³ Merupakan buku yang memberi penjelasan mengenai organisasi-organisasi perempuan Indonesia sesudah 1950

²⁴ Artikel karangan Mansour Fakih, dalam sebuah harian *UNISA; Demokrasi & Formasi Sosial*, 1997

²⁵ Merupakan suatu artikel yang menyebutkan PKK dan Dharma Wanita sebagai kebijakan indoktrinasi rezim Orde Baru

*Soal Politik Gender Pada Masa Orde Baru,*²⁶ artikel karangan Ruth Indiah Rahayu menunjukkan perempuan dan gerakannya sampai pada penghujung 1965. Selama periode tersebut terjadi proses domestikasi perempuan di segala bidang. Ada pula teori gender serta analisis masalahnya sangat kontra terhadap kehidupan manusia pada umumnya dan perempuan secara khusus. Beberapa buku juga memberi keterangan yang hampir sama mengenai gender diantaranya *Analisis Gender & Transformasi Sosial*²⁷, *Gender & Pembangunan*²⁸, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*²⁹ karangan Dr Irwan Abdullah.

*Penghancuran Gerakan Perempuan politik seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI,*³⁰ karangan Saskia E. Wieringa. Tulisan ini menceritakan organisasi perempuan sepanjang sejarah, pengarang juga mengkaji tentang depolitisasi Orde Baru terhadap pergerakan perempuan khususnya dalam bidang politik. Segala macam depolitisasi Orde Baru juga dipaparkan dalam beberapa karangan diantaranya, *Menggugat Politik Orde*

²⁶ Dalam Harian Prisma Edisi 5 Mei 1996 hlm 29-43.

²⁷ Buku karangan Mansour Fakih yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2003

²⁸ Buku Karangan Mansour Fakih, mengkaji permasalahan kaum perempuan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas kaum perempuan, tetapi pada saat berjuang mendapat banyak hambatan sehingga belum mampu bersaing dengan laki-laki... penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

²⁹ Merupakan buku yang memberi wacana perjuangan perempuan untuk mencapai persamaan hak.

³⁰ Buku karangan Saskia E. W dengan judul asli, *The Politization of Gender Relation in Indonesia*. Sebelumnya buku tersebut merupakan disertasi yang telah diedit dan disensor ketat, berkaitan dengan nama-nama dan detail para perempuan yang diwawancarai sebagai korban fitnah pada masa Orba. Tetapi dari buku ini, penulis menggunakan kejadian dan versi yang belum diedit dan dianalisis untuk melihat tahun pertama setelah kejatuhan kediktatoran Soeharto (Weiringa 2010; 6)

*Baru*³¹ karangan Syamsuddin Haris, *Pancasila Versi Orde Baru*³², *Sejarah Lahirnya Orde Baru; Hasil dan Tantangannya*³³

F. Landasan Teori

Dalam penulisan sejarah (historiografi) dibutuhkan perencanaan matang yang bersifat menyeluruh. Hal ini membutuhkan beberapa langkah yang saling terkait sebagai suatu alur berpikir. Penyusunan dan penetapan suatu landasan teori menjadi landasan utama dari pengembangan penulisan sejarah.³⁴ Teori-teori yang digunakan dalam penelitian sejarah harus didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi.³⁵ Pada akhirnya teori memberikan kemudahan dalam menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah teori gender dan teori strukturalisme. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan berpikir dan membatasi berbagai masalah tentang gerakan perempuan Indonesia dalam tekanan politik rezim Orde Baru.

1. Gender

Teori ini menyatakan bahwa perbedaan ‘perempuan’ dan ‘laki-laki’ tidak ditinjau dari segi biologi (seks) tetapi dari bangunan budaya (gender) yang pada dasarnya tidak stabil, meskipun secara umum masyarakat

³¹ Buku Karangan Syamsuddin Haris, diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 1998

³² Buku karangan David Bouchier, diterbitkan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta tahun 2007

³³ Buku karangan Cosmas Batubara, diterbitkan oleh Yayasan Prahita, Jakarta, tahun 1986

³⁴ Taufik Abdulah, dkk, *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Prespektif*, Jakarta, Gramedia, 1985

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm 1177.

memahami bahwa gender telah tercermin secara sosial dan alamiah, dan pada akhirnya sejarah gerakan perempuan Indonesia sering diwarnai dengan determinisme biologis.³⁶

Ideologi gender membatasi penggalian potensi perempuan dan diaktualisasikan lewat potensi-potensi yang berkaitan erat dengan peran-peran dan kegiatan dalam lingkup domestik. Pelestariannya yang terus menerus akan menimbulkan kerugian bagi pemanfaatan sumber daya manusia.³⁷

Gender sebagai konstruksi sosial, yang telah disosialisasikan, ternyata telah menyumbang ketidakadilan. Manifestasi ketidakadilan tersebut menimbulkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, serta pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan. Oleh karena itu permasalahannya bukan terletak pada “kaum perempuan” tetapi dalam ideologi, sistem, struktur yang membudaya yang bersumber dari ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Usaha yang lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender ini dikenal sebagai pendekatan *Gender and Development* atau *GAD*.³⁸

Pendekatan *GAD* memandang bahwa yang menciptakan ketidakadilan laki-laki dan perempuan adalah struktur dan proses sosial politik. Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada akses dan kontrol sumber daya, kesempatan dan manfaat, serta dalam pengambilan keputusan (partisipasi dan representasi). Dalam prosesnya suatu masyarakat dan

³⁶ Saskia, *Op, cit*; hlm 64

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm vii

berbagai institusi mengubah cara berpikir dan praktek untuk mendukung persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan.³⁹

Kelebihan teori *GAD* ialah menjangkau hal-hal yang bersifat teknis, seperti politis dan merupakan proses transformasi. Teori ini menantang ketidakadilan, sehingga selalu menghubungkan dengan kebutuhan praktis dan strategis.⁴⁰

2. Teori Strukturalisme

Persoalan yang dialami perempuan Indonesia pada masa Orde Baru ditinjau melalui teori strukturalisme. Teori ini berkaitan dengan persoalan teknis dan sistem tentang kebijakan peran perempuan yang dirumuskan rezim Orde Baru. Strukturalisme memberi perspektif baru dalam memandang fenomena budaya.

Secara etimologis struktur berasal dari kata *structure*, bahasa latin yang berarti bangunan. Struktur merupakan bangunan teoritis (abstrak) yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoritis (abstrak) yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain relasi sintagmatis dan paradigmatis.⁴¹

Dalam strukturalisme hal-hal yang tadinya dianggap sederhana dan tidak dianggap penting, justru memiliki peran yang sangat penting dalam

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mansour Fakhri, *Op, cit*; hlm 77

⁴¹ Anthony Giddens, 2009, *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 3

menemukan gejala sosial budaya. Dalam hal ini, bahasa pun menjadi tempat yang istimewa dalam ilmu sosial, sehingga sebagai alat komunikasi bahasa menjadi sangat penting dalam merubah pola budaya masyarakat (Ferdinand de Saussure 1857-1913). Seperti ameliorasi kata “perempuan” ke kata “wanita” pada rezim Orde Baru, maknanya pun dipertimbangkan secara matang dan sebagai salah satu basis kekuatan program rezim ini.

3. Gerakan

Gerakan (movement) dalam kamus Webster berarti “*organized action by people working toward a goal*” atau aksi dari berbagai organisasi yang dipelopori oleh seorang yang kuat untuk mencapai tujuan.⁴² *Gerakan* lebih luas dan lebih tersebar dibandingkan suatu organisasi formal maupun perkumpulan informal (*Saskia. E. Weiringa 2001: 78*), artinya di dalam sebuah gerakan ada beberapa organisasi masyarakat atau organisasi sosial. Gerakan itu memunculkan suatu organisasi yaitu unit sosial atau cara pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk dengan penuh pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi-organisasi yang berdiri menjadi media utama gerakan. Sehingga dapat mengumpulkan massa yang lebih besar sebagai alat kontrol sosial untuk mencapai perubahan.

Dapat disadari bahwa dengan cara mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, maka organisasi-organisasi dapat dijadikan sebagai gerakan sosial yang paling ampuh. *Steven Buechler* menyatakan bahwa gerakan sosial itu sering digambarkan sebagai reaksi kolektif dari suatu

⁴² Nana Nurliana, *Gerakan Perempuan di Amerika*, Jakarta, Jurnal Perempuan (untuk pemecahan dan kesetaraan 14), 2000, hlm 16

kelompok masyarakat yang ter subordinasi (*collective respon to a group's experience of subordination*).⁴³ Gerakan sosial mengharapkan perubahan sosial yang selalu diharapkan untuk memperbaiki hidup, baik secara individu maupun kelompok. Pada perkembangannya gerakan sosial memunculkan kelompok-kelompok kecil, seperti gerakan buruh dan gerakan perempuan yang terbebas dari segala bentuk penindasan.

4. Perempuan

Kata *Perempuan* dalam pandangan masyarakat Indonesia mengalami degradasi semantis atau *peyorasi* yaitu penurunan nilai makna (arti sekarang lebih rendah dari arti dahulu), sehingga kata wanita dianggap mengalami *ameliorasi* (perubahan makna yang semakin positif atau arti sekarang lebih tinggi daripada arti dahulu). Ameliorasi hanya terjadi dalam Kamus Bahasa Indonesia dalam banyak edisi yang sudah mengalami "jawanisasi" atau "kramanisasi", tetapi dalam konteks sejarah kata perempuan memiliki makna dan arti tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai sumber sebagai berikut:

- 1) **Menurut KBBI**, *keperempuanan* juga berarti kehormatan sebagai perempuan. Di sini sudah mulai muncul kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia bergender feminin. Tersirat juga makna "kami jangan diremehkan" atau "kami punya harga diri".⁴⁴
- 2) **Secara etimologis**, kata *perempuan* berasal dari kata *empu* yang berarti tuan, (orang yang mahir atau berkuasa), maka dikenal juga kata-kata seperti; *empu jari* (ibu jari) dan *empu gending* (orang yang mahir mencipta tembang). Kata *perempuan* juga berhubungan dengan kata *ampu* (penyangga), kata *mengampu* artinya menahan agar tak

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I. Jakarta, Balai Pustaka dan Depdikbud, 1988, hlm 670

jatuh, kata *mengampukan* berarti memerintah. Kata *perempuan* juga berakar erat dari kata *empuan*, kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya sapaan hormat pada perempuan, sebagai pasangannya ialah kata *tuan* yang artinya sapaan hormat pada lelaki.⁴⁵

- 3) **Prof. Slametmuljana** mengakui bahwa kata yang sekarang sering direndahkan, ditempatkan di bawah *wanita*, ini berhubungan dengan makna 'kehormatan' atau 'orang terhormat'. Tetapi, ia juga melihat hal lain yang dipahami kelompok masyarakat tertentu. Maka, ia pun tidak mampu menyembunyikan keheranannya berikut ini: "...apa sebab perempuan tempat kehormatan itu semata-mata diperuntukkan bagi wanita, sedangkan hormat dan bakti setinggi-tingginya menurut adat ketimuran justru datang dari kaum wanita, terhadap suami".⁴⁶
- 4) **Dari sudut sejarah pergerakan nasional**, kata *perempuan*lah yang telah menyumbangkan kontribusi historisnya. Dalam kongres pertama organisasi dinamai "Kongres Perempoean Indonesia Pertama, yang berlangsung pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta."⁴⁷ Dalam Kongres I ini disepakati bahwa persamaan derajat hanya dapat dicapai bila susunan masyarakatnya tidak terjajah. Langkah organisasi pertama yang dilakukan adalah membentuk "Perserikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia" (PPPI). Terkait itu, dalam perjalanan sejarah lahir Kowani, Perwari, Perwani, yang selalu diikuti huruf /W/ merupakan jejak-jejak historis lingual lebih dipilih kata "wanita", dan bukan "perempuan", sehingga saat ini yang dikehendaki bukan perempuan mandiri, melainkan perempuan penurut.
- 5) **Masa kemerdekaan**, seperti disebut di atas, derap Kongres Perempuan Indonesia sudah hilang dari peredaran. Muncul pengganti-penerusnya, seperti; Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Sejak pra-kemerdekaan, para istri pegawai sangat mendominasi. Sejak inilah wanita secara resmi menggeser makna perempuan. Sejak saat itu setiap partai-partai politik di Indonesia juga mempunyai anak organisasi wanita, bukan perempuan, misalnya Wanita Demokrat dan Gerakan Wanita Marhaen (PNI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani, PKI), dan pasca-1965 ada Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), serta Dharma (1974).⁴⁸

⁴⁵ L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*. Cet. III. Ende: Nusa Indah, 1986, hlm 6

⁴⁶ Slametmuljana, *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*. Jakarta, PN Balai Pustaka, 1964, hlm 61

⁴⁷ Rahayu, R.I. *Politik gender Orde Baru: tinjauan organisasi perempuan sejak 1980-an*. *Prisma* 15(5), Mei 1996, hlm 29-42.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 30-31

Secara umum perempuan ialah untuk seluruh kaum perempuan baik kelas atas maupun bawah. Terbukti dari berbagai tulisan sejarah Indonesia menunjukkan pergerakan perempuan dalam penulisannya.

Pada perkembangan selanjutnya, dilakukan studi lebih lanjut mengenai pergerakan perempuan dan makna perempuan yang digunakan di Indonesia oleh *Cora Vreede-De Stuers*. Cora melihat perjuangan pergerakan perempuan Indonesia, baik dalam hal melawan adat maupun kolonial. Dalam hal ini, ia merekonstruksi beberapa aspek. Pertama, mengenai identitas “perempuan Indonesia” ditinjau dari asal-usul sosio-kulturalnya dan yang mencapai kesatuan pandang dalam melawan hukum perkawinan (kawin paksa dan poligami) dan pembodohan terhadap perempuan. Kedua, ia pun merekonstruksi kesadaran personal, kesadaran organisasi, hingga seluruhnya itu berujung pada gerakan perempuan nasional dalam himpunan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).⁴⁹

Dari berbagai pemaknaan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa *gerakan perempuan* merupakan usaha sekelompok orang untuk mencapai cita-citanya yaitu membebaskan diri dari diskriminasi dan eksploitasi, sehingga dapat mengurangi anggapan umum yang menyatakan perempuan sebagai kelompok inferior atau subordinasi.⁵⁰

Pada masa pergerakan nasional pergerakan perempuan menjadi tonggak sejarah yang membuktikan peran besar kaum perempuan dalam

⁴⁹ Ruth Indiah Rahayu, *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok, 2008.. dengan judul asli *The Indonesian Women: Struggles And Achievement* oleh Cora Vreede-De Stuers, Mouton & Co, s'Gravenhage, 1960

⁵⁰ Nana Nurliana, *Gerakan Perempuan di Amerika*, Jakarta, Jurnal Perempuan (untuk pemecahan dan kesetaraan 14), 2000, hlm 16

perjuangan revolusi nasional. Untuk itu, masa-masa ini dapat menjadi pedoman di masa selanjutnya, agar pergerakan perempuan Indonesia dapat terus berkarya.

5. Feminis

Gerakan perempuan tersebut memunculkan kaum feminim yang memahami permasalahan perempuan dan berbagai ideologi feminis. *Ideologi feminis* berisi gagasan-gagasan yang mendeskripsikan seksisme di dalam suatu masyarakat serta bagaimana kondisi ini dapat dihilangkan di masa depan. Salah satu contoh seksisme adalah gagasan mengenai peran domestik perempuan. Gagasan ini banyak diserang kaum feminis karena mengacu pada citra konservatif mengenai kondisi sosial perempuan. Landasan setiap ideologi feminis mengacu pada nilai-nilai dan sasaran yang akan memungkinkan tercapainya kondisi sosial ideal untuk perempuan.⁵¹ Ideologi feminis terdiri dari berbagai macam ideologi, diantaranya; feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, dan feminisme sosial. Di Indonesia dikenal feminisme liberal dan feminisme sosial untuk menanggapi persoalan kebijakan kolonial dan pengaruhnya terhadap perempuan serta masyarakat ialah.⁵²

Selain ideologi feminis, kaum perempuan juga menggunakan teori gender sebagai ukuran atas perannya sebagai kaum feminim. *Scott* mengungkapkan *gender* merupakan suatu elemen pembentuk hubungan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan yang disadari terkait perbedaan jenis

⁵¹ *Jurnal Perempuan* edisi 7 Mei- Juli 1998

⁵² Mansour Fakhri, *Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia...* dalam Majalah Unisa "Demokrasi & Formasi Sosial", No.34/XIX/II/1997, hlm 73

seks.⁵³ Untuk memahami persoalan gender diperlukan pemahaman ideologi, sosial maupun struktural budaya, yang dibangun ke dalam setiap kehidupan.⁵⁴ Karena permasalahan gender menyangkut hasil bentukan sistem dan membudaya secara struktural.⁵⁵

6. Politik

Untuk mencapai kontruksi sosial yang mempengaruhi perubahan struktur gender, gerakan perempuan melihat persoalan *politik* menjadi salah satu faktor yang menentukan pergerakannya. Dalam *Sexsual Politics (1970)* Kate Millent mendefinisikan *politik* sebagai hubungan kekuasaan terstruktur yang terbentuk ketika sekelompok orang berada di bawah kontrol kelompok yang lain. Para feminis kontemporer dalam hal ini melihat politik ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan politik (kekuasaan). Feminis mendefinisikan *kekuasaan* sebagai politik seksual di mana kekuasaan dipegang oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, kekuasaan perempuan hanya ada dalam kerangka otoritas laki-laki. Pola budaya tradisional melahirkan ketidakseimbangan dan menempatkan kegiatan publik yang didominasi laki-laki, sebagai pusat nilai. Maka perempuan berada dalam lingkup domestik yang tidak mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sosial.⁵⁶ Gerakan perempuan melihat *politik kekuasaan* sebagai alat untuk menentukan peran mereka yang sering bertentangan dengan cita-cita kaum feminis.

⁵³ Saskia, *Op.cit*; hlm. 65

⁵⁴ Mansour, *Op.cit*; hlm 64

⁵⁵ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 115

⁵⁶ *Jurnal Perempuan* edisi 7 Mei-Juli 1998

Salah satu reaksi perempuan terhadap kekuasaan adalah menolak bentuk kekuasaan, dan mencoba mendefinisikan kekuasaan berbagai bentuk sehingga tidak memerlukan pola dominasi. *Judith Newton* (1981) mendefinisikan kekuasaan perempuan sebagai ‘kemampuan’, yang disertai keterlibatan perempuan sebagai agen yang aktif. Dalam hal ini diperlukan rekonstruksi masyarakat hingga pengertian dominasi bukan lagi menjadi bagian yang mendasar dari suatu masyarakat. *Hannah Arent* merefleksikan tentang *politik kekuasaan* ialah budaya politik santun yang memenuhi syarat-syarat kondisi manusiawi berkat jaminan pemberdayaan ruang publik.⁵⁷

7. Rezim

Dalam politik kekuasaan ada pemegang dan penentu kekuasaan yang menjadi tantangan gerakan perempuan untuk memperjuangkan misinya seperti rezim. *Rezim* merupakan sekelompok orang yang menguasai Negara.⁵⁸ Dengan kata lain rezim juga mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.⁵⁹ Dalam hal ini konsep rezim digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh rezim yang merefitalisasi sistem peran perempuan Indonesia secara struktural pada masa Orde Baru.

8. Studi Kasus Gerakan Perempuan

Sebagai perbandingan dijelaskan studi kasus pergerakan perempuan, salah satunya ditunjukkan perkembangan gerakan perempuan pada masa kolonial (abad ke-19) di Amerika Latin. Di sini kolonialisme berjalan selama

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Stephanie Lawson, *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change*, Canberra: Department of Political and Social Change. The Australian National University, 1991, hlm 4

⁵⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Rezim>, diunduh 8 Maret 2012, hlm 1

satu abad. Selama itu, semua hal yang ada di koloni, baik bahan baku maupun penduduknya dilihat sebagai sumber daya alam untuk dieksploitasi, maka baik laki-laki maupun perempuan merupakan satu bentuk manusia (lebih rendah) yang berbeda, “yang dasarnya” inferior. Untuk itu, perempuan termasuk alam bagi para kolonis, akhirnya hukum “hak laki-laki” ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam semua kultur, sehingga menimbulkan subordinat. Untuk itu, gerakan perempuan muncul sebagai bagian dari proses penindasan selama masa kolonial. Budaya feodal itu perlahan-lahan dapat diubah dengan partisipasi gerakan perempuan untuk meningkatkan peran perempuan serta membantu masyarakat marginal, meski hukum gender atau kodrat tidak dapat dilawan.⁶⁰

Pada pasca kolonial, di tahun 1970-an, pengaruh kolonial masih terasa yaitu penekanan pada kekayaan pribadi. Di India pada kisaran tahun yang sama, perkembangan perundang-undangan tentang kekayaan pribadi tak terelakan membuat perempuan menyerah ketika hak tanah diletakan atas nama suaminya. Kaum perempuan mendominasi lapangan kerja musiman, tanpa tanah meski mungkin mereka pencari nafkah utama dalam keluarga. Budaya kapitalisme, industrialisasi yang pesat, dan urbanisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perbedaan ini, maka pemerintah pun turut dalam tradisi yang mereka terima sebelumnya. Pembangunan selama pasca kolonial di India seperti agribisnis mungkin tampak membuka kesempatan kerja, tetapi sesungguhnya semata-mata mengeksploitasi sumber

⁶⁰ Mansour, *Op.cit*; hlm 116

daya dan buruh setempat, khususnya buruh perempuan. Studi ini akan melukiskan cara bagaimana perempuan berorganisasi menanggulangi bentuk “pembangunan” semacam itu.

Analisis gender dalam pembangunan ditunjukkan oleh gerakan perempuan di Brazil, Argentina, Peru, Uruguay, dan Chile. Mereka memperlihatkan proses dan peranan pembangunan mobilisasi kaum perempuan, sehingga secara otomatis ada perubahan politik rezim militer yang otoriter menuju dekade 1970-an.⁶¹ Dalam hal ini gerakan perempuan sempat mengalami tekanan politik dari negara salah satunya di Chile. Di bawah rezim Pinochet situasi politik Chile mendapat perhatian. Jaquette mengatakan bahwa gerakan baru mobilisasi perempuan merupakan sebuah tahap baru dalam gerakan hak-hak perempuan.⁶²

Keadaan ekonomi dan politik di Chile sempat dipegang oleh kekuasaan militer. Dalam bidang ekonomi upah riil terus mengalami penurunan, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi turun. Selain itu ada kebijakan anti serikat buruh oleh pemerintah, serikat buruh merupakan salah satu organisasi politik yang direpresi. Kemudian ada organisasi ekonomi populer (*Organizaciones Economicas Populares* OEPs), yang diciptakan oleh pemerintah, dimana mayoritas perempuanlah yang terlibat dalam pembentukan dan menjalankannya.⁶³ Organisasi-organisasi istri yang terbentuk pada masa itu,

⁶¹ Jane S. Jaquette, *Gerakan Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Kalyanamitra, 200, pengantar, hlm ii

⁶² Jane S. Jaquette, “Women, Feminism and the Transition to Democracy in Latin America” *Latin American and Caribbean Research Review* 1985 (New York, Holmesd

⁶³ Luis Razzeto, Arno Klenner, Apolonia Ramirez dan Robert Urmenta, *Last organizacoines economicas populares* (Santiago: Academic de Humanismo Cristiano, 1983) dalam *Gerakan*

merasa dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi. Pada akhirnya para perempuan ini telah menghasilkan sebuah fokus pengorganisasian politik dan pendidikan sebagai alat membangun kekuatan terhadap para rezim.⁶⁴

Beberapa konsep dan studi kasus mengenai gerakan perempuan, menjadi tolok ukur pertimbangan penulis untuk menganalisis sejauh mana topik dapat menunjukkan perkembangan gerakan perempuan, sebab peran perempuan dibatasi pada masa Orde Baru, dan reaksi-reaksi gerakan perempuan atas pembatasan atau tekanan politik pada masa Orde Baru. Penulis mengkaji berbagai sumber yang umum sehingga bisa menjadi bahan refleksi serta nilai kehidupan yang dapat dirasakan pada saat ini.

Dari beberapa pemahaman teori-teori dan pendekatan konsep tersebut maka dapat dikaitkan antara konsep satu dengan yang lain, kemudian membentuk kerangka berpikir. Fungsinya ialah untuk mengkaji alur, sistematika, serta hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lainnya.

Berikut merupakan kerangka berpikir yang digambarkan dalam bagan 1.1

Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi Menuju Demokrasi, oleh Jane S. Jaquette, penerbit: Jakarta, Kalyanamitra, 2003, hlm184

⁶⁴ Jane, *Op. cit*; hlm 185

Bagan 1. 1: Bagan kerangka berpikir



Gerakan perempuan Indonesia diidentifikasi berdasarkan latar belakang dan peran gerakan perempuan Pra-Orde Baru. Dalam hal ini dapat dijelaskan mengenai latar belakang, pelopor, alasan didirikan dan cita-cita gerakan perempuan. Selanjutnya bagan kerangka berpikir juga menjelaskan peran gerakan perempuan dalam perjuangan masyarakat pra-Orde Baru.

Pada bagan kedua dijelaskan latar belakang politik Orde Baru yang menyebabkan domestifikasi gerakan perempuan, dengan berbagai organisasi perempuan bentukan (*underbow*) Orde Baru.

Pada bagan ketiga gerakan perempuan bergerak sendiri-sendiri secara independen. Kemudian, muncul reaksi dari pergerakan perempuan akibat tekanan politik dan organisasi bentukan rezim Orde Baru. Pada akhirnya, gerakan

perempuan independen memperjuangkan masyarakat dan kaum marginal untuk tetap melahirkan kembali semangat juang gerakan perempuan Indonesia yang sempat hilang.

G. Metodologi Penelitian

Pada bagian ini akan dikaji mengenai prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis atas permasalahan yang dikaji. Metode atau cara dalam pengumpulan sumber dalam penelitian historis ini adalah deskriptif analitis yaitu menginventarisir dan menganalisis tulisan-tulisan berupa buku-buku, analisis berita, dan media cetak. Metode Sejarah terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis data, pendekatan dan penulisan. Metode sejarah mempunyai empat kegiatan pokok yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi terhadap sumber dan penulisan sejarah.⁶⁵

Berikut merupakan tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian Historis analitis dan deskriptif oleh penulis, di antaranya:

1. Pemilihan Topik

Penulis memilih topik “Gerakan Perempuan Indonesia dalam Tekanan Politik Regim Orde Baru” karena timbul dari kedekatan emosional dan kedekatan intelektual dengan topik tersebut.

⁶⁵ Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Ombak, 2007, hlm. 86

a. Kedekatan Emosional

Penulis tertarik menulis tentang gerakan perempuan dengan segala usaha perjuangannya hingga tekanan politik yang dialami, karena usaha selama perjuangan mendapat banyak tantangan baik dari segi struktural budaya maupun sosial masyarakat. Adapun alasan pemilihan topik ini ialah karena kedekatan emosional, karena tergerak dengan kegiatan dan program yang ditunjukkan organisasi perempuan HASPARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) di DIY. Mereka membuat program kerja yang ditujukan untuk penanganan permasalahan sosial khususnya masyarakat marginal. Mereka menunjukkan peran begitu besar dalam kemajuan bangsa, meski program yang mereka jalankan mendapat sedikit dukungan khususnya dari pemerintah. Dengan pengamatan ini, semakin menguatkan kebenaran akan gerakan perempuan dan perjuangannya yang terus berhadapan dengan berbagai macam tantangan berupa pembatasan organisasi perempuan Indonesia dan aturan yang sudah membudaya secara struktural sejak masa Orde Baru.

b. Kedekatan Intelektual

Pemilihan topik skripsi ini juga menambah kekayaan pengetahuan penulis. Penulis mulai masuk kepada permasalahan perempuan dengan meninjau banyak buku terkait perjuangan perempuan Indonesia. Tidak hanya pengetahuan yang bersumber dari studi pustaka, tetapi juga dari media lainnya. Penulis meninjau karangan mengenai usaha gerakan perempuan dan perjuangan akan kaumnya, seperti yang ditulis oleh

beberapa pengarang seperti Mansour Fakih, Saskia Eleonora Weirenga, Hikmah Diniah, A.Nunuk P. Murniati, Susan Blackburn, Surat-surat Kartini, dan berbagai sumber dari Kongres Perempuan yang hingga kini perjuangannya terus didengungkan. Jadi, dengan kedekatan intelektual ini, penulis berusaha meninjau perkembangan gerakan perempuan dalam perjuangan dan tantangan yang dihadapi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan inti permasalahan yang akan diamati, penulis melakukan penelitian historis deskriptif terlebih dahulu untuk melihat gambaran yang dijelaskan dalam setiap sumber. Kemudian sumber tersebut dianalisa untuk dikaji permasalahan pada sumber dan dikaitkan dengan permasalahan sesungguhnya yang memberi dampak sebagai hasil permasalahan tersebut. Secara keseluruhan bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber pustaka.

Sumber-sumber yang digunakan ialah dengan metode wawancara dan studi pustaka. Buku-buku mengenai eksistensi gerakan perempuan, dan tekanan struktural politik yang dialami gerakan perempuan pada masa Orde Baru. Sumber primer didapat melalui wawancara dengan Ibu Nunuk Prasetyo Murtiani (salah satu pelaku serta aktivis organisasi perempuan KPI), beliau memiliki perpustakaan yang bekerjasama dengan LP3ES. Selain itu, bahan-bahan penunjang lainnya didapat di perpustakaan Kolose Kota Baru, Universitas Sanata Dharma, dan maupun toko-toko buku. Sumber tersebut di antaranya: (*Habis Gelap Terbitlah Terang*) karangan Raden Ajeng Kartini,

(*Sarinah*) karangan Ir. Soekarno, dan beberapa diantaranya telah disebutkan dalam tinjauan pustaka.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah Sumber-sumber yang relevan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik atas sumber yang ada atau verifikasi. Kritik sumber yang dilakukan adalah untuk mengetahui kebenaran informasi atau untuk menguji otentisitas dan juga kredibilitasnya. Hal tersebut sangat diperlukan karena tidak semua sumber terbebas dari unsur kekeliruan dalam hal pencatatan ataupun unsur yang lainnya. Kegiatan verifikasi atau kritik sumber ini terdiri dari dua macam yaitu, kritik ekstern (keaslian sumber atau otentisitas), dan kritik intern (kebiasaan dipercayai atau kredibilitas).⁶⁶

Kritik intern dapat digunakan untuk mengetahui nilai kebenaran suatu data yang diperoleh atau data tersebut dapat dipercayai atau tidak. Kritik intern ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap, sedangkan kritik ekstern adalah untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam melakukan penulisan. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan meneliti bahan yang digunakan lewat pemakaian bahasa dalam penulisannya, corak penulisannya, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya proses kritik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan satu

⁶⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2001, hlm. 101.

informasi dengan informasi lainnya. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar, apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah, pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang diberikan oleh sumber terbanyak.

Selain dengan melakukan perbandingan cara lain yang digunakan dalam proses kritik sumber ini adalah dengan pembacaan secara intensif dan mencermati secara seksama berbagai sumber yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Sebagai contoh dalam proses kritik sumber ini misalnya, pada saat memaparkan mengenai cara pandang komunisme dan sosialisme baik oleh para kaum perempuan, para rezim, maupun para aktivis pada masa kini yang masih terus mengkaji dan menganalisisnya.

4. Interpretasi (Penafsiran)

Data berupa informasi yang sudah dianggap valid kemudian diinterpretasikan. Interpretasi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji dan untuk menganalisis sumber supaya dapat menghasilkan suatu fakta yang teruji kebenarannya. Dalam interpretasi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) data atau fakta-fakta yang telah terkumpul.⁶⁷ Mengingat sumber kajian utama ini adalah teks, maka diperlukan penafsiran yang cermat agar makna aslinya dapat ditangkap secara tepat. Teori penafsiran teks itulah yang disebut dengan istilah hermeneutika.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 101.

Langkah ini diambil dengan memperlihatkan landasan teori yang dipakai dalam penelitian.

5. Pendekatan

Langkah yang selanjutnya setelah melakukan analisis data adalah menentukan pendekatan. Pengertian pendekatan dalam penelitian sejarah adalah pola pikir atau cara pandang dari penulis terhadap suatu kejadian atau peristiwa sejarah dari sudut pandang tertentu. Menurut Sartono Kartodirdjo dalam penelitian sejarah pendekatan sangat diperlukan sebagai cara sejarawan atau penulis untuk memandang suatu peristiwa atau kejadian karena pendekatan akan membantu sejarawan atau penulis dalam memandang dimensi-dimensi mana yang perlu diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diungkapkan dan sebagainya.⁶⁸ Pendekatan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi penulisan sejarah sebab hasil penulisan tentang peristiwa masa lampau sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai oleh penulis.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan historis, politik, ekonomi dan sosial budaya. Pendekatan historis digunakan untuk melihat secara keseluruhan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya gerakan perempuan pada masa Orde Baru, perkembangan gerakan perempuan Indonesia, dan dampak strukturalisme politik yang menekan perempuan pada masa Orde Baru. Pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat sistem pembangunan nasional yang berpengaruh pada perkembangan pergerakan

⁶⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm. 4.

perempuan Indonesia. Pendekatan sosial budaya digunakan seberapa besar konsep gender dan peran gerakan perempuan Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan bangsa. Semua pendekatan akan digunakan penulis untuk mempermudah penulis untuk mengkaji serta menganalisis pokok permasalahan.

Setelah mengumpulkan data, kritik sumber dan interpretasi dijalankan barulah kemudian dilakukan langkah berikutnya yaitu penulisan hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian merupakan penyusunan hasil penelitian secara kronologis dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul “Gerakan Perempuan dalam Tekanan Politik Rezim Orde Baru” sebagai berikut:

Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menyajikan uraian tentang pembahasan dari permasalahan pertama yaitu; pengertian gerakan perempuan Indonesia dan pelopor pergerakan perempuan, alasan para pelopor mendirikan gerakan perempuan Indonesia, lahirnya organisasi-organisasi perempuan Indonesia dan perkembangannya hingga masa Pra-Orde Baru, serta peran gerakan perempuan pada masa pra-Orde Baru.

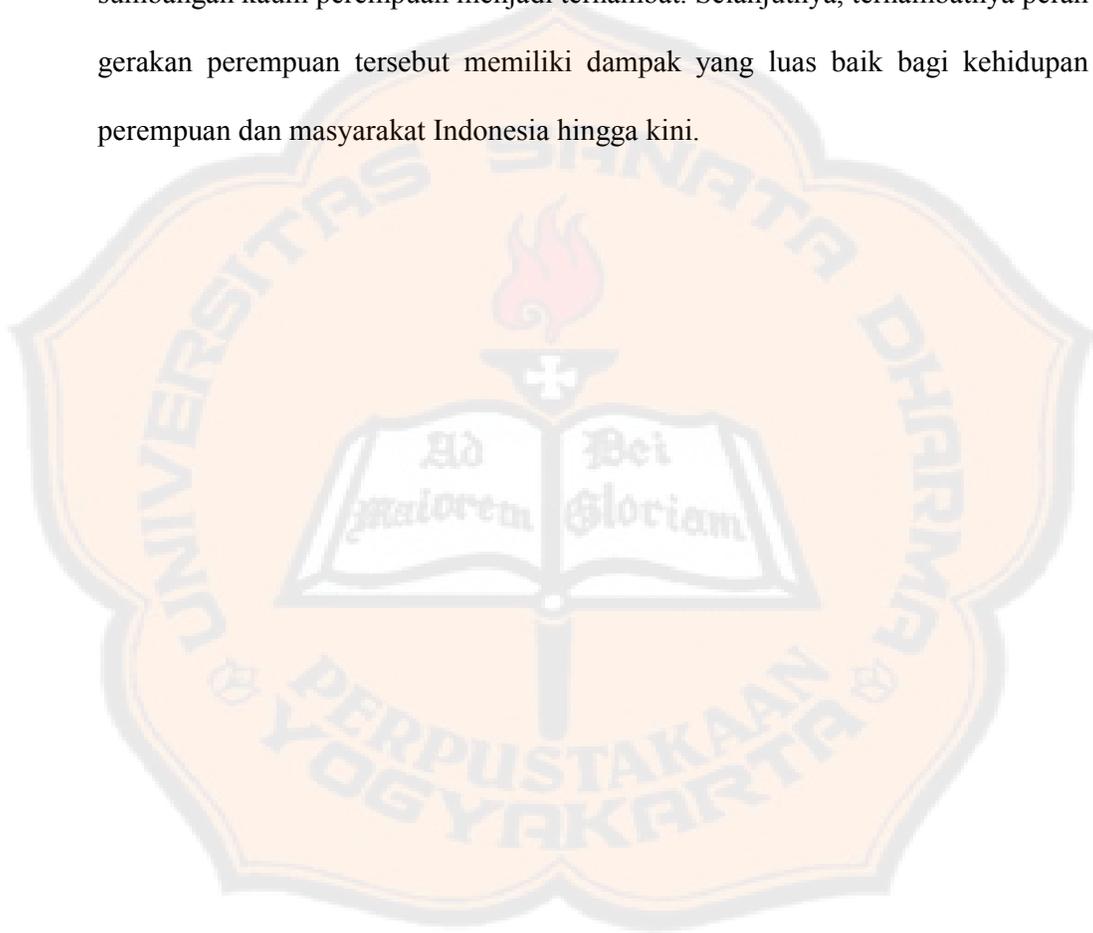
Bab III Bab ini menyajikan mengenai gerakan perempuan Indonesia mendapat tekanan politik dari rezim Orde Baru. Di dalamnya membahas tentang latar belakang Orde Baru sebagai awal pembatasan peran perempuan Indonesia; depolitisasi gerakan perempuan oleh tekanan rezim Orde Baru, alasan gerakan perempuan dibatasi pada masa Orde Baru; organisasi perempuan yang dikehendaki rezim orde baru; organisasi-organisasi perempuan bentukan (underbow) Orde Baru.

Bab IV Bab ini menyajikan reaksi-reaksi yang dihadapi gerakan perempuan Indonesia sebagai akibat dari tekanan politik Orde Baru. Menjelaskan wacana peran perempuan Orde Baru yang mempengaruhi perkembangan perempuan Indonesia, alasan timbul reaksi gerakan perempuan Indonesia terhadap kebijakan Orde Baru, gerakan kesadaran perempuan Indonesia terhadap tekanan politik Orde Baru, aksi gerakan perempuan karena tekanan politik di akhir Orde Baru Orde Baru, organisasi perempuan non-pemerintah (Independen), program yang ditawarkan LSM dan organisasi perempuan non-pemerintah (Independen) untuk membangun kesejahteraan kaum perempuan Indonesia.

Bab V Bab ini menyajikan evaluasi dari Bab II, III, dan IV, serta rekomendasi atau saran penulis dalam mengkaji perkembangan gerakan perempuan Indonesia dan perkembangannya setelah adanya tekanan politik pada peran perempuan Indonesia.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini. Dari uraian di atas tampak bahwa geraka

n perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan kaumnya, melalui berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, sosial dan politik. Namun demikian, tampak juga bahwa selama pemerintahan Orde Baru gerakan perempuan ditekan oleh batasan dan aturan tertentu pemerintah, sehingga sumbangan kaum perempuan menjadi terhambat. Selanjutnya, terhambatnya peran gerakan perempuan tersebut memiliki dampak yang luas baik bagi kehidupan perempuan dan masyarakat Indonesia hingga kini.



BAB II

GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA

PADA MASA PRA-ORDE BARU

A. Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang dibangun sejak abad ke-19 menjadi media suatu gerakan. Gerakan ini berkembang sehingga dijadikan sebagai alat kontrol sosial, untuk mencapai cita-cita yang luhur, seperti kemerdekaan, penghapusan segala bentuk penindasan, dan budaya imperialis yang merugikan. Untuk itu, muncullah perempuan-perempuan yang sadar dan memikirkan perubahan yang sekiranya dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap kemampuan kaumnya. Pada akhirnya, lahirlah berbagai organisasi perempuan yang membangun gerakan lebih besar untuk meningkatkan kemampuan perempuan Indonesia.

Pada abad ke-19 banyak tokoh perempuan yang menyumbangkan banyak gagasan untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini, organisasi perempuan mempunyai visi dan misi mengubah cara pandang masyarakat terhadap tradisi perempuan yang harus dipinggir dan tanpa memperoleh pendidikan seperti yang diterima laki-laki pada masa itu. Untuk itu, beberapa tokoh tersebut berusaha menghapus penindasan dengan membaca, bersekolah, dan mengumpulkan banyak perempuan Indonesia agar tidak

terjadi penindasan yang sama. Hal tersebut, dilakukan pertama kali oleh pelopor pergerakan perempuan R. A Kartini dan Dewi Sartika.⁶⁹

Gambar 2.1 : R. A Kartini dan Dewi Sartika sebagai pelopor pergerakan perempuan Indonesia



Sumber : Ruth Indiah Rahayu⁷⁰

Pada perkembangannya gerakan perempuan lebih aktif dengan menunjukkan berbagai aksi nasional, sehingga pada masa pendudukan Jepang, muncul gerakan perempuan bawah tanah yang melawan organisasi perempuan bentukan Jepang dengan sebutan Fujinkai. Gerakan perempuan bawah tanah ini ditindas oleh tentara Jepang dan program pelaksanaannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Gerakan perempuan ini membur menjadi satu dengan suatu misi dan visi memerdekakan Indonesia baik dari penindasan kolonial maupun penguasa lokal pribumi.⁷¹

Pada abad ke-20, organisasi perempuan bergabung menjadi satu dan membentuk gerakan dengan misi menghapus segala bentuk penindasan yang dari masa ke masa. Mereka berkembang dan selalu berpedoman pada dasar

⁶⁹ Sukanti Sueyochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Rajawali, cetakan I, 1984, hlm 68-69

⁷⁰ Ruth Indiah Rahayu, *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan & Pencapaian*, Jakarta, Komunitas Bambu, hlm 88... dengan judul asli *The Indonesian Women: Struggles And Achievement 1960*, Mouton & Co, s'Gravenhage.

⁷¹ *Ibid*, hlm 67

perjuangan hidup para tokoh yang menginspirasi mereka, misalnya Srikandi hingga Kartini. Melalui kisah hidup perempuan tangguh ini, mereka mulai membuka cakrawala baru untuk mencapai harapan yang utama, yaitu kesetaraan bagi hidup perempuan, dan selebihnya mereka perjuangankan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesetaraan perempuan yang dimaksud ialah memperjuangkan posisi perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang serta menentukan kehidupan keluarga. Semua ditunjukkan dengan menambah lapangan pengajaran, dan mempertinggi kecakapan-kecakapan sebagai perempuan. Ini merupakan visi dan misi utama bagi gerakan perempuan di masa-masa selanjutnya.⁷²

Organisasi perempuan yang berkembang berpedoman pada gerakan emansipasi di Indonesia yang melembaga dalam pergerakan perempuan. Persatuan pergerakan perempuan dibuktikan dalam Kongres Perempuan Pertama Indonesia tanggal 22 Desember 1928.⁷³

⁷² A.K. Pringgodani. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1970), hlm.20-21

⁷³ Nani Soewondo-Soerasno, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Djakarta, Timun Mas, 1955, hlm 128; atau Depdikbud dokumen sejarah nasional Jakarta, *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, Jakarta, Depdikbud, 1991, cetakan 1, hlm x; atau Sucanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1984; atau A. Nunuk Prasetyo, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm 17; atau Saskia Wieringa, *Kuntulanak Wangi: Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra, 1988, hlm 12 (untuk mengkaji lebih dalam, penulis melakukan wawancara di rumah mantan aktivis perempuan atau anggota KPI, beliau adalah Nunuk Prasetyo membenarkan adanya depolitisasi terhadap perempuan dan penggunaan kata perempuan dalam organisasi semenjak Kongers Perempuan Indonesia I diselenggarakan)

B. Pelopor Pergerakan Perempuan Indonesia

Sebelumnya pada abad ke-19, Indonesia telah memiliki tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang bersemangat menunjukkan peran sertanya menghapus penindasan dari neo-kolonialisme dan imperialisme. Pejuang nasional perempuan yang memacu semangat juang wanita Indonesia ialah Martha Christina Tiyahahu (wafat 1818) dari Maluku, Cut Nyak Dien (wafat 1908), dan Cut Nyak Meutia (wafat 1910) dari Aceh.⁷⁴

Pelopop pergerakan perempuan Indonesia selanjutnya ialah Raden Ajeng Kartini (21 April 1879-17 September 1904). Cita-cita besar untuk menggerakkan kaum perempuan Indonesia tertuang dalam kumpulan surat-suratnya yang dibukukan dan sekarang dikenal dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Ia mengemukakan persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia pada masanya, diantaranya; kawin paksa (perempuan umumnya kawin dengan laki-laki yang belum dikenal), poligami (terutama diantara golongan atas) sudah menjadi kebiasaan laki-laki beristeri lebih dari satu dan semua isteri itu biasanya tinggal dalam satu rumah. Dampak poligami dapat dirasakan pula oleh Kartini, karena ayahnya sendiri berpoligami. Kemalangan menimpa Kartini. Ketika ia dikawinkan dengan seorang yang berpoligami pula dengan seorang bupati Rembang bernama RMAA Djojodhiningrat. Kartini tertimpa perceraian dengan sewenang-wenang dari pihak suami.

⁷⁴ *Ibid.*

Kaum perempuan pada masanya kurang mendapat kesempatan untuk bersekolah atau memperoleh pendidikan.⁷⁵

Selain R.A Kartini ada pula Raden Dewi Sartika (4 Desember 1884- 11 September 1947) dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan Indonesia. Dengan pengetahuan yang ia miliki, Dewi Sartika mendirikan sekolah gadis tahun 1904. Sekolah tersebut merupakan Sekolah Isteri pertama, yang kemudian diganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Isteri. Akhirnya ada 9 sekolah gadis didirikan hingga tahun 1912 di berbagai kabupaten⁷⁶. Dewi Sartika pun dikenal sebagai pelopor pendiri sekolah-sekolah perempuan Indonesia.⁷⁷

C. Alasan Para Pelopor Mendirikan Organisasi Perempuan Indonesia

Pendirian organisasi perempuan Indonesia didorong oleh adanya berbagai bentuk penindasan. Penindasan pada perempuan Indonesia menjadi tantangan dari masa ke masa. Pada awal pergerakan wanita abad ke-19, bentuk penindasan pada perempuan Indonesia diantaranya; kawin paksa, poligami, perceraian, dan kurang mendapat kesempatan untuk bersekolah atau memperoleh pendidikan.⁷⁸

Pada abad ke-20, alasan mendirikan organisasi perempuan diantaranya; memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong agar

⁷⁵ Nani Soewondo Soerasno, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 1955, hlm 126

⁷⁶ Menyusul pendirian sekolah-sekolah di Tasik Malaya (1913), Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917), Cicurung (1918), Kuningan (1922), dan Sukabumi (1926)... dalam *Dinamika Wanita Indonesia: Seri 01; Multidimensional*, oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Cetakan 1, Jakarta, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Mei 1990, hlm 118

⁷⁷ *Ibid*, hlm 127

⁷⁸ *Ibid*.

perempuan tampil di depan umum, membuang rasa “takut” dan “mengangkat” kemampuan perempuan, seperti lapangan pekerjaan, membawa perubahan sosial dan semangat bagi pemuda-pemudi Indonesia, dengan tujuan melawan imperialisme dan kolonialisme, menuntut hak-hak yang sama, yaitu hak perempuan dan kesejahteraan kaumnya, bisa berperan aktif dalam politik meningkatkan kondisi kerja yang baik bagi buruh perempuan dan mendukung pendidikan nasional bagi para perempuan pekerja.⁷⁹

Demikian berbagai sebab organisasi perempuan Indonesia terbentuk, maka dapat ditelusuri satu persatu organisasi perempuan yang berdiri selama pra-Orde Baru dengan segala visi dan misi mereka. Dari sini, akan nampak bahwa perjuangan perempuan Indonesia ialah semata-mata demi keadilan dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan dari masa ke masa.

D. Lahirnya Organisasi-Organisasi Perempuan dan Perkembangannya Pada Masa Pra-Orde Baru

Organisasi-organisasi perempuan yang muncul dan berkembang semakin bervariasi dari masa ke masa. Timbulnya berbagai corak organisasi dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pada masa itu dan kreatifitas pemrakarsa atau pengurusnya. Namun, tidak semua organisasi tersebut dapat terus berkembang hingga saat ini, bahkan banyak diantaranya yang sudah

⁷⁹ *Ibid.*

tidak lagi terdengar namanya, karena dibubarkan atau tidak ada pengurus yang aktif.⁸⁰

1. Organisasi Perempuan pada Masa Pergerakan Nasional

a. Periode 1912-1928

Organisasi perempuan Indonesia dimulai pada awal kebangkitan nasional tahun 1908–1928, yang ditandai dengan lahirnya organisasi bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejarah kemudian mencatat lahirnya organisasi perempuan yang pertama yaitu Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong mereka agar perempuan tampil di depan umum, membuang rasa “takut” dan “mengangkat” perempuan pada kedudukan yang sama seperti laki-laki, dalam hal lapangan pekerjaan.⁸¹ Di tahun selanjutnya lebih banyak lagi bermunculan organisasi perempuan, seperti Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915.

Seiring dengan terbentuknya berbagai organisasi nasional dan partai politik, maka gerakan perempuan mulai terbentuk, baik sebagai sayap (bagian dari organisasi perempuan yang sudah ada), atau pun membentuk wadah organisasi tersendiri yang dilaksanakan oleh perjuangan perempuan di satu sektor atau tingkat tertentu. Di sisi lain, perkembangan organisasi berbasis agama, seperti Muhammadiyah membentuk organisasi perempuan, yaitu

⁸⁰ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 119

⁸¹ Petrus Blumberger 1978:160, orig.1931 dalam Saskia Eleonora Wieringa; *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia 1999* : 105).

Aisyiah. Berbagai karya jurnalisme pun meluas, kiprah sejumlah sastrawati mulai muncul ke permukaan.⁸²

Aisyah berdiri pada tahun 1917. Pelopor pendiri Aisyah ialah Nyi Ahmad Dahlan (isteri KH Ahmad Dahlan). Tujuan didirikannya Aisyah ialah untuk menyebarkan Islam di antara kaum perempuan.⁸³ Organisasi ini semakin menunjukkan eksistensinya dan mampu mensejajarkan diri dengan organisasi perempuan lainnya. Selain Aisyah, di daerah dibentuk pula organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun (PIKAT) di Manado tahun 1917, Purborini di Tegal, Wanito Soesilo di Pemalang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1919, dan Poetri Boedi Sedjati di Surabaya tahun 1919.⁸⁴

Setahun kemudian, berdiri Wanita Utomo di Yogyakarta pada tahun 1920. Gerakan ini dipelopori oleh gerakan sosial Budi Utomo yang membawa perubahan sosial dan semangat bagi pemuda-pemudi Indonesia, dengan tujuan melawan imperialisme dan kolonialisme. Wanita Utomo dapat berkembang dengan organisasi-organisasi wanita lain dan menuntut hak-hak yang sama, yaitu hak perempuan dan kesejahteraan kaumnya.⁸⁵ Organisasi-organisasi perempuan daerah juga berdiri pada tahun yang sama yaitu Wanito Muljo di Yogyakarta tahun 1920 dan Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukit Tinggi.⁸⁶

⁸² artikel *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, hlm 1

⁸³ Saskia E. Weiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, Yogyakarta, Galang Press, Cetakan 1, 2010, hlm 121

⁸⁴ <http://penilaian-terhadap-pergerakan-perempuan.com> diakses tanggal 17 April 2012

⁸⁵ Saskia E Weiringa, *Op.cit*; hlm 120

⁸⁶ Sekneg RI. *Op.cit*; hlm 1

Setelah Wanita Utomo, berdiri pula Wanita Taman Siswa pada 3 Juli 1922, organisasi ini berdiri atas gagasan Ki Hajar Dewantara beserta istrinya, mereka mengkombinasikan metode pendidikan Barat dengan memasukkannya ke dalam nilai dan budaya Jawa, membangun gerakan pendidikan umum yang luas. Sekolah Liar mereka yang bebas menolak subsidi pemerintah.⁸⁷

Pada 26 Juni 1924 berdiri Wanita Katolik. Organisasi ini terdiri dari perkumpulan ibu-ibu Katolik, dipelopori oleh R.Ay.C.Hardjadinigrat. Perkumpulan ini mula-mula beranggotakan guru-guru putri dan karyawan wanita pabrik Cerutu "Negresco". Misi utama perkumpulan ini adalah meningkatkan kemampuan perempuan dari segi intelektual dengan mengajarkan cara membaca dan menulis, serta menyediakan bahan bacaan yang semakin membuka wawasan pengetahuan perempuan saat itu.

Gambar 2.2 : Periode 1912-1928 dikenal sebagai periode pendidikan bagi perempuan Indonesia (Van Deventer School Solo).



Sumber: Ruth Indiah Rahayu⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*, hlm 129

⁸⁸ Indiah Rahayu, Op.cit; hlm 119

b. Periode 1928-1942

Semangat berorganisasi kaum perempuan juga muncul selang beberapa bulan setelah Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan oleh para pemuda di tahun 1928. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta. Sekitar seribu orang menghadiri resepsi pembukaan resmi Kongres Perempuan⁸⁹ yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928⁹⁰. Ada berbagai hal yang dikemukakan sebagai topik permasalahan yang berasal dari berbagai organisasi yang berbeda, seperti Aisyah, Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, dan berbagai organisasi-organisasi kecil saat itu.⁹¹

Gambar 2.3: Semangat pergerakan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22- 25 Desember 1928, di Yogyakarta



Sumber: [http://: artikel_kolomkitajournalism.org](http://artikel_kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

⁸⁹ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 124, dan

⁹⁰ Selanjutnya tanggal 22 Desember dijadikan hari Ibu Nasional karena dianggap mulai saat inila kaum wanita Indonesia sadar untuk memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat... dalam *Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, ibid.*

⁹¹ Susan Blacburn, *Kongres Perempuan Perempuan Pertama; Tinjauan Ulang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm, xi, 2007.

Gambar 2.4: 15 Desember 1928. Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia dari kiri ke kanan: Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa), Ibu Soekonto (Wanita Oetomo- Ketua Kongres), Nn. Soejatin (Putri Indonesia) sekarang Ibu Kartowijoyo



Sumber: Foto rep. Idayu (Susan Blacburn, op.cit.

Gambar 2.5: 22 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Dari kiri ke kanan: Ny.B. Goelarso, Ny. S. Kartowijono, Ny. Hardjodiningrat, Nyi Hadjar Dewantara, Ny. Soekonto (Ketua Kongres), Ny. Sonearjo Mangoenpoespito (sedang menulis), Ny. Ismoediati Saleh, Ny. Moendijah, Ny. Anwar, Ny.Dirdjowongso.



Sumber: Foto rep. Idayu (Susan Blacburn, op.cit.)

Pengaruh Kongres Perempuan pada tahun 1928 memunculkan organisasi istri lainnya yang paling menonjol saat itu adalah Isteri Sedar. Organisasi tersebut memperjuangkan agar perempuan Indonesia bisa berperan aktif dalam politik, meningkatkan kondisi kerja yang baik bagi buruh perempuan dan mendukung pendidikan nasional bagi para perempuan pekerja.⁹²

Satu hal kesepakatan kongres perempuan pertama bahwa kongres perempuan pada saat itu disepakati pelaksanaan Hari Ibu yang diselenggarakan setiap tanggal 22 Desember, bahkan tahun 1950 tanggal 22 Desember dijadikan Hari Besar Nasional. Ini merupakan hal bersejarah yang dapat dirasakan oleh gerakan perempuan Indonesia hingga saat ini.⁹³

Gambar 2.6: Peringatan Hari Ibu



Sumber: Ruth Indiah Rahayu⁹⁴

⁹² <http://penilaian-terhadap-pergerakan-perempuan.com> diakses tanggal 17 April 2012

⁹³ Susan Blacburn, *Op.cit*; hlm, xii

⁹⁴ Indiah Rahayu, *Op.cit*; hlm 57

Kongres Pertama menghasilkan federasi organisasi perempuan yang bernama Persatuan Perempuan Indonesia (PPI). Setahun kemudian PPI diubah menjadi PPII (Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia).⁹⁵ PPII sangat giat di bidang pendidikan dan usaha penghapusan perdagangan perempuan. Pada Kongres tahun 1932, dalam kongresnya, PPII mengangkat isu perjuangan melawan perdagangan perempuan dan salah satu keputusan penting yang diambil adalah mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A).⁹⁶

Setelah Kongres Perempuan Indonesia tingkat nasional pertama, diadakan kembali Kongres Nasional berikutnya di tiga kota yaitu di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941). Kongres-kongres nasional yang sering dilakukan, semakin memberi semangat nasionalisme kepada berbagai organisasi perempuan Indonesia.⁹⁷

Pada kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan PPII dibubarkan. Perhatian tertuju kepada kaum perempuan miskin, tetapi keanggotaannya masih berasal dari lapisan atas, meski tuntutan yang disuarakan sebagian besar mengarah pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.⁹⁸ Sejak saat itu gerakan-gerakan nasional khususnya gerakan perempuan berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme. Semangat itu tampak saat awal pendudukan Jepang, ada

⁹⁵ Kongres Perempuan Indonesia tingkat nasional pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928

⁹⁶ [http://: SETNEG.GO.ID](http://SETNEG.GO.ID), dalam artikel *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, diunduh 31 Oktober 2011, hlm 1

⁹⁷ Susan Blacburn, *Op.cit*; hlm,xii

⁹⁸ Saskia Weirenga, *Kuntulanak Wangi: Organisasi-organisasi Indonesia sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1998, hlm 12

beberapa gerakan perempuan yaitu Perempuan Serikat Rakyat (PSI) dan Istri Sedar menentang pemerintah kolonial Belanda, mereka juga memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme.⁹⁹

Pada 1935 juga dilakukan tuntutan hak pilih perempuan pertama dalam sebuah kongres. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial membuka peluang perempuan Indonesia tanpa hak suara.¹⁰⁰ Untuk itu dilakukan kampanye dan agar perempuan terlibat di dalam Volksraad. Saat itu perempuan pertama yang mengenyam pendidikan Belanda sebagai pengacara ialah Maria Ulfa, maka hak suara untuk perempuan pun mulai dibuka.¹⁰¹

Pada perkembangan selanjutnya, muncul sekelompok pemerhati buruh perempuan yang diketuai oleh Ny. Sujatin. Bersama kelompoknya, Ny. Sujatin pergi ke Lasem untuk menyelidiki kondisi buruh batik yang sebenarnya menjadi buruh tersandera. Kelompok perempuan ini melakukan aksi protes terhadap kondisi kerja para buruh perempuan, tetapi juga membicarakan masalah nasib para perempuan penghibur serta para gundik kaum lelaki pemilik usaha batik.¹⁰²

Pada tahun 1940 untuk pertama kalinya, sebuah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia dibentuk di Jakarta.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 13

¹⁰⁰ Vreede-de Stuers, *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*, Mouton, Den Haag, 1960, hlm 95

¹⁰¹ Locher-Scholten, *Women in the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.. (dalam *Penghancuran Gerakan Perempuan* oleh Saskia EW)

¹⁰² Rambe, *Sijantin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm 43-44

Perkumpulan ini beranggotakan para perempuan yang bekerja di kantor, baik pemerintah ataupun swasta, seperti guru, perawat, pegawai kantor, dan sebagainya. Namun, dilihat dari kegiatannya, organisasi-organisasi tersebut belum dapat dikatakan sebagai organisasi profesi, karena pada umumnya kegiatan mereka ditekankan pada pendidikan keterampilan keperempuanan dan pemupukan kesadaran kebangsaan, sehingga tidak berbeda jauh dengan kegiatan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan lainnya.¹⁰³

c. Periode 1942-1945

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), segala bentuk gerakan atau organisasi dilarang. Kemudian dibentuk organisasi-organisasi baru bentukan Jepang dengan dalih sebagai propaganda untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia Timur Raya. Gerakan perempuan dibentuk oleh para isteri pegawai di daerah-daerah, dan diketuai oleh isteri masing-masing kepala daerah, yang disebut Fujinkai. Kegiatan Fujinkai dibatasi hanya pada urusan-urusan keperempuanan dan peningkatan keterampilan domestik, selain kegiatan menghibur tentara yang sakit dan kursus buta huruf. Bagi para perempuan yang mempunyai wawasan luas, pembatasan ini merisaukan dan mereka tidak ikut masuk Fujinkai. Kenyataan ini menjadikan adanya dua jenis orientasi di kalangan aktivis perempuan, yaitu mereka yang bernaung di bawah pemerintah bala tentara Dai Nippon dan yang non-kooperatif atau memilih bergerak diam-diam di bawah tanah.¹⁰⁴ Gerakan nasional yang

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Loc.cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

bergerak di bawah tanah yang terdiri dari beberapa gerakan-gerakan perempuan anti-kolonialisme disebut GWS (Gerakan Wanita Sosial). Banyak kaum nasionalis, termasuk anggota perempuan, ditangkap dan dibunuh.¹⁰⁵

2. Gerakan Perempuan pada Pasca Kemerdekaan

a. Gerakan Perempuan Pada Masa Revolusi Nasional (1945-1949)

Setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945, Belanda mencoba memasuki Indonesia dengan bantuan sekutu. Karena itu, periode ini diwarnai oleh Revolusi fisik. Di samping itu, iklim politik pada masa ini justru merangsang tumbuhnya organisasi-organisasi perempuan dengan tujuan keikutsertaan dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan negara.¹⁰⁶

Untuk membantu perjuangan dari garis belakang maka dibentuklah Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) tanggal 17 Desember 1945 di Klaten Jawa Tengah. Organisasi ini merupakan organisasi perempuan sekuler yang berazaskan Pancasila, organisasi kemasyarakatan perempuan yang berorientasi pada kesatuan budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Organisasi ini tidak menjadi organisasi politik mana pun, tetapi untuk anggota biasa diberi kebebasan penuh untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Pada perkembangannya banyak anggota Perwari yang masuk partai politik atau organisasi-organisasi perempuan baru seperti Gerwis.

¹⁰⁵ Saskia Weirenga, *Op.cit*; hlm 12

¹⁰⁶ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 122

Gambar 2.7 : KUPP Perwari disaksikan oleh konsultan Perwari Ms. Karen H. Smith, menyerahkan penghargaan kepada seorang pengurus gedung (Seksi Umum)



Sumber : <http://www.perwari.org/web/index> diaskes 14 Maret 2012

Gambar 2.8 : Kerjasama Perwari dan Soekarno dalam penyelenggaraan program perwari.



Sumber: <http://www.perwari.org/web/index> diaskes 14 Maret 2012

Gambar 2.9 : Aksi nasional oleh Nyonya Andreas Sastrohusodo bersama para koleganya dalam demonstrasi Perwari menentang UU NO. 19 tentang pension untuk para janda (di depan Nyonya Sukant-Mokoginta dan Soepeni, di kiri belakan nyonya Rizali Noor)



Sumber: Ruth Indiah Rahayu¹⁰⁷

Kelompok perempuan yang bekerja pada periode sebelumnya hanya bergerak di bidang pendidikan dan sosial, tetapi pada masa ini mulai mempertajam statusnya sebagai bagian dari pergerakan buruh yang mengikuti seluruh ideologi dan cara perjuangan kelompok sosial. Mereka tergabung dalam Barisan Buruh Perempuan. Selain itu ada juga kelompok-kelompok perempuan yang terbentuk lewat partai-partai politik, seperti Masyumi dengan Muslimatnya, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia dengan bagian puterinya.¹⁰⁸

Variasi organisasi perempuan pada periode ini ditambah dengan munculnya organisasi yang lebih khusus dari kalangan istri Angkatan

¹⁰⁷ Indiah Rahayu, *Op.cit*; hlm 187

¹⁰⁸ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 122

Bersenjata seperti Persit (Persekutuan Isteri Tentara, 1946) dengan tujuan membantu sesama keluarganya yang ikut berjuang.¹⁰⁹

Pada tahun 1948 sempat berdiri Partai Wanita Rakyat atas inisiatif Ibu Sri Mangunsarkoro di Yogyakarta. Partai ini berazaskan ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan dan mempunyai program perjuangan yang sangat militan. Demikian juga dengan keputusan kongres Kowani pada tahun 1948 dan 1949, sangat sarat dengan muatan politis dan dengan semangat yang militan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.¹¹⁰

b. Pada Masa Demokrasi Liberal (1949-1959)

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi yang menjadi perhatian masyarakat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagian gerakan perempuan memilih berjuang dan terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa. Mereka membentuk Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) pada tanggal 4 Juni 1950 di Semarang. Tujuan dari organisasi ini ialah untuk berjuang dan memperhatikan aspirasi perempuan-perempuan miskin. Pada Kongres Nasional I, Desember 1951, Gerwis memutuskan program kerja ke depan yaitu mengubah nama dan arah perjuangan yang lebih menyatu dengan kaum perempuan buruh, tani dan yang ada di basis massa. Pada tahun 1951 juga dibentuk Wanita Demokrat Indonesia sebagai afiliasi Partai Nasional

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Partai berdiri pada tahun 1948 oleh Nyi Mangunsaekoro dengan menyuarakan monogami (Vreede-de Stuers 1960),... dalam *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, oleh Saskia E Weiringa, Galang Press, Yogyakarta, 2010, hlm 163 dan Meutia Hatta Swasono, *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, website resmi, Jakarta, Senin 6 Februari 2012

(PNI). Selain itu, ada pula organisasi yang lebih khusus pada masa ini, seperti: Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 1953 dibentuklah Wanita Nasional sebagai afiliasi Partai Indonesia Raya (PIR).¹¹¹

Akhirnya pada Kongres Nasional II, pada Maret 1954 di Jakarta, Gerwis diubah namanya menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perubahan nama ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan “karakteristik sempit” dari Gerwis. Gerwani menekankan pentingnya arti kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan lainnya atas dasar menghormati perbedaan yang ada. Mereka juga membangun program diantaranya ialah mempertahankan hak-hak kaum perempuan, kebahagiaan anak-anak, kemerdekaan nasional, dan perdamaian dengan membangun persatuan.¹¹²

Gambar 2.10 : Anggota gerakan perempuan (dahulu Gerwis diganti Gerwani 1960)



Sumber : [http://: artikel_kolomkitajournalism.org](http://artikel_kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

¹¹¹ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Op.cit; hlm 122

¹¹² Himah Diniyah, *Gerwani Bukan PKI; Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta, CarasvatiBooks, 2007, hlm. 97-98

Gambar 2.11: Dari kiri-kanan: Rewang, Mulyono, Siswoyo, Sri Mulyani, Musayid, Jane Luyke, Kemi, Sri Fitnah dan Mun. Para perempuan ini adalah Pimpinan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Jawa Tengah. Mereka berfoto bersama di depan rumah Jl. Cidurian 19, Menteng, Jakpus.



Sumber : <http://Institut-Sejarah-Sosial-Indonesia.kaskus.com> diakses 12 Maret 2012

Organisasi-organisasi perempuan ini terus memperjuangkan hak-hak perempuan, dan itu dinyatakan dalam Kongres KWI tahun 1955, 1957, dan 1958. Dalam prosesnya banyak kaum perempuan, termasuk dalam organisasi tersebut yang kecewa karena wakil perempuan sangat sedikit dalam parlemen, Partai Wanita Rakyat¹¹³ tidak mendapat banyak perhatian pemerintah (Saskia E. Weiringa: 229).¹¹⁴

Organisasi-organisasi perempuan yang berkembang dan ikut berperan dalam pergerakan perempuan pada masa demokrasi liberal ini ialah organisasi para isteri polisi, seperti Bhayangkari. Perjuangan para

¹¹³ Partai yang didirikan pada tahun 1946, yang menganjurkan adanya monogami, tetapi sesudah Pemilihan Umum pada masa Demokrasi Parlementer tidak terlihat lagi gerakannya... dalam Hikmah Diniah, *Op.cit.*, hlm. 80

¹¹⁴ Hikmah Diniah, *Loc. cit.*

anggota tidak hanya terbatas pada kesejahteraan keluarga dan membantu suami, tetapi juga berjuang untuk hak-hak perempuan pekerja.¹¹⁵

c. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada tahun 1959, kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya sangat berpengaruh pada gerakan perempuan, terutama bagi Gerwani karena menjadi organisasi yang didukung Presiden Sukarno. Hal ini juga berpengaruh terhadap organisasi-organisasi perempuan lainnya, seperti Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Gerakan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan (Kowani), mau tidak mau menghubungkan berbagai kegiatan mereka dengan Nasakom, dan Manipol yang lazim pada saat itu.¹¹⁶

Perubahan tampak dalam pergerakan Kowani, yang berubah haluan ke kiri, terbukti dengan melakukan tindakan penonaktifan salah satu gerakan perempuan, yakni Muslimat sebagai bagian dari perempuan Masyumi dikeluarkan oleh Kowani. Hal ini disebabkan oleh Gerwani yang semakin memperluas pengaruhnya pada tahun 1960-an. Kowani dan Gerwani juga mendukung pembebasan Irian Barat. Kowani menjadi semakin aktif dan giat dalam kegiatan perjuangan. Pada perkembangan selanjutnya, Kowani menjalankan hubungan dengan Gerakan Organisasi Wanita (GOW), di berbagai daerah semakin meluas dengan pengadaan

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 82

¹¹⁶ *Ibid*.

kursus pendidikan dan lain sebagainya, meskipun masalah politik nasional tetap menjadi perhatian utama gerakan ini.¹¹⁷

Meningkatnya pengaruh Gerwani, dapat dilihat dengan jelas pada kongres KWI 1961. Ketika itu Presiden Soekarno menasihati KWI, agar bekerjasama dalam upaya membangun masyarakat adil dan makmur.¹¹⁸ Kongres menyetujui berlakunya struktur baru dengan menggantikan sekretariat dengan dewan eksekutif dan menggantikan sistem konsesus dengan mayoritas sederhana. Dengan demikian gerakan perempuan Islam tidak lagi dapat menghalangi desakan KWI bagi monogami.¹¹⁹

Pada tanggal 8 Maret 1965, Gerwani dapat merayakan kemenangannya, federasi menjadikan hari itu juga dengan Hari Buruh Perempuan. Untuk itu, hak-hak dan aspirasi para buruh perempuan dapat disalurkan kepada pemerintah. Pada akhirnya masyarakat sosial mendukung gerakan-gerakan perempuan dalam menghapus penindasan.

E. Peran Gerakan Perempuan pada Masa Pra-Orde Baru

1. Peran Gerakan Perempuan dalam Melaksanakan Program-Program Perjuangan Di Berbagai Bidang

a. Pendidikan

Organisasi-organisasi perempuan terbentuk dari proses pendidikan, sehingga ada peran besar kaum perempuan terhadap pendidikan. Begitu

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Nani, Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta dsb: Ghalia. 1981a, hlm. 198

¹¹⁹ *Ibid.*

pula yang dicita-citakan oleh R.A Kartini yang sempat menulis dua kali tentang pendidikan. Dalam suratnya pada 11 Oktober 1901, ia menulis:

Menurut ayah, menjadi gurulah yang terbaik bagi kami...Di mana lagi aku akan dapat menyebarkan cita-citaku secara lebih baik dari pada di situ, sebagai pendidik angkatan muda yang akan menjadi perempuan ibu masa depan?...¹²⁰

Kemudian dalam suratnya kepada Ny. Abendanon pada 21 Januari 1901, ia mengatakan bahwa:

Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan...dan makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan?... Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat.¹²¹

Pada perkembangan selanjutnya organisasi perempuan pertama yaitu Putri Mardika memperjuangkan pendidikan khusus perempuan. Manfaatnya agar perempuan tidak ragu tampil di depan umum dan berguna bagi sesamanya kaum laki-laki dalam menjalankan kebutuhan hidup.

Pada perkembangan selanjutnya, gerakan perempuan membantu Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII), organisasi-organisasi kecil bergabung dalam serikat gerakan perempuan tersebut. Mereka juga sangat giat memperluas kecakapan dan pengajaran bagi kaum perempuan desa dan miskin. Dalam hal ini, pengajaran yang dimaksud ialah mengajarkan

¹²⁰ Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Jakarta, Balai Pustaka, cetakan 3, 1987, hlm 76

¹²¹ *Ibid.*

kehidupan yang layak dalam rumah tangga dan keluarga (pendidikan dasar).

Memasuki periode pertengahan pergerakan nasional, Aisyah salah satu gerakan perempuan bentukan Muhammadiyah, mengaktualisasikan diri untuk pendidikan dalam menghasilkan karya jurnalisme, hasil belajar perpaduan bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Melayu.

Ketika Orde Lama, usaha yang dilakukan Gerwani berupa pelaksanaan program PBH (Pemberantasan Buta Huruf) dan kursus-kursus dalam bidang PBH. Mereka memperbanyak anggota dan diajarkan membentuk kelompok-kelompok kecil, dan di sinilah kaum perempuan didorong aktif tentang hak-hak mereka.¹²² Hasilnya didirikan bangunan pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak “Melati” oleh Gerwani dan TK Perwari oleh Perwari di Tasikmalaya, yang berfungsi sebagai tempat penitipan, tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh atau bertani.¹²³

¹²² Hikmah Diniah, *Op.cit*; hlm 125-126

¹²³ *Ibid*, hlm 127

Gambar 2.12: TK Perwari Tasik 1952-1953. Foto sekolah di TK Perwari Tasikmalaya. Lokasi di Belakang Pendopo Tasikmalaya dan gurunya Ibu Andris.



Sumber : <http://ambas.multiply.com/photos/10/4> diakses 12 Maret 2012

Seiring perkembangannya dalam pendidikan, gerakan perempuan dapat mengeluarkan aspirasi mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan penerbitan majalah seperti *Api Kartini* dan *Wanita Indonesia*. Para anggota juga disarankan untuk terus menulis artikel di media masa nasional yaitu *Harian Rakjat*, sehingga salah satu kolomnya disediakan khusus untuk isu-isu perempuan, yakni kolom “*Ruang Wanita*”. Semua itu berguna untuk memperluas program perjuang gerakan perempuan.¹²⁴

b. Sosial

Gerakan perempuan pertama Indonesia telah menunjukkan sikap sosialnya, dengan perjuangan mengumpulkan seluruh anggota dari berbagai lapisan, dari kelas bawah hingga kelas atas. Pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta, 22 Desember 1928, mayoritas gerakan atau organisasi perempuan didukung oleh kaum sosialis. Budi Utomo

¹²⁴ *Ibid.*

sebagai organisasi pertama Indonesia mendukung sepenuhnya tindakan gerakan-gerakan perempuan ini, karena sangat membantu dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme.

Pada masa pendudukan Jepang, gerakan perempuan Indonesia juga menunjukkan keberaniannya melawan pemerintah kolonial. Gerakan ini dinamakan Gerakan Wanita Sosialis (GWS), yang merangkul golongan pemuda sosialis untuk membantu kemerdekaan Indonesia.

Gerakan perempuan lainnya juga menunjukkan peran dalam bidang sosial. Pada Kongres II Gerwis, Maret 1954 di Jakarta salah satu gerakan perempuan yang bergerak di bidang sosial, yakni membuat program kerjanya, menyatu dengan kaum perempuan buruh dan tani. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No.68 tahun 1959 bahwa, yang pertama, mengusahakan adanya undang-undang yang mengatur hubungan kerja yang demokratis antara buruh dan majikan di setiap lapangan kerja, dan melarang segala bentuk pemecatan sewenang-senang. Kedua, memperluas koperasi-koperasi buruh di setiap lapangan kerja yang bisa meringankan kaum buruh atau pekerja perempuan dan para istri buruh atau pekerja.

c. Politik

Kemampuan gerakan perempuan Indonesia dalam berpolitik, telah dibuktikan semenjak periode kebangkitan nasional. Mereka membentuk perencanaan dan program kerja dari tingkat nasional hingga daerah-daerah lokal. Mereka juga memberi pemahaman tentang cara berorganisasi kepada kelompok-kelompok kecil perempuan, sehingga anggotanya siap

melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya, dibuktikan oleh Persatuan Perempuan Indonesia (PPI), yang merangkul gerakan-gerakan kecil menjadi satu kesatuan dalam federasi gerakan perempuan.¹²⁵

Dalam programnya gerakan perempuan membuat segenap anggota untuk aktif dan peka terhadap masalah-masalah politik membuat panitia penghapusan perdagangan perempuan, memecahkan permasalahan diantara gerakan perempuan, mempertahankan gerakannya masing-masing, menjalankan hubungan baik dengan gerakan lain, dan masih banyak peran gerakan perempuan pada masa kebangkitan nasional.

Pasca kemerdekaan gerakan perempuan berjuang untuk hak-hak demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh, dan mengupayakan perdamaian yang seutuhnya. Garis-garis pokok tersebut dituangkan dalam 3 tugas pokok, yaitu (1) front persatuan perempuan, (2) memperkuat organisasi, dan (3) revolusi Agustus '45.¹²⁶

2. Peran gerakan perempuan dalam aksi-aksi nasional dan daerah

Berbagai perjuangan dilakukan gerakan perempuan Indonesia untuk melawan penindasan terhadap kemiskinan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak jarang aksi mereka juga membawa perhatian banyak kalangan. Aksi mereka beragam, dari berbagai aksi massa mereka perjuangkan untuk membela kemerdekaan kaumnya dan negara tercinta Indonesia.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Sulami, WF. Wertheim, dan Sri Suharti, *Kebenaran Tentang Gerwani; Aspek Gender Rezim*, hlm 20

a. Aksi-aksi Nasional

Aksi-aksi nasional telah dilakukan gerakan perempuan sejak awal abad 20, diantaranya ialah pendidikan perempuan, memperhatikan nasib anak-anak yatim dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi aturan-aturan perkawinan dalam agama Islam, pentingnya rasa harga diri di kalangan perempuan, serta memperhatikan buruknya kawin paksa. Ada pula kampanye menentang perkawinan anak.

Gambar 2. 13 : Barisan Laskar Putri



Sumber : Ruth Indiah Rahayu¹²⁷

Usaha tidak berhenti di situ, pada 1930 di Surabaya diadakan kongres. Kongres tersebut membuat wacana baru seperti perdagangan perempuan dan hak suara perempuan,¹²⁸ diusahakan juga kantor penerangan kerja untuk perempuan dan penelitian tentang sanitasi di kampung dan tingginya angka kematian anak.

¹²⁷ Indiah Rahayu, *Op.cit*; hlm 189

¹²⁸ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hlm 38

Pada periode 1930-an banyak organisasi perempuan yang menentang paksaan dari para gundik yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Organisasi Putri Budi Sedjati mendirikan asrama kaum perempuan dan gadis yang “ditelantarkan” dengan mengajarkan mereka menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya agar mereka dapat menjadi pembantu rumah tangga yang terampil (Indisch Vrouwenjaarboek 1936:12).

Ternyata kongres-kongres perempuan membantu seluruh gerakan perempuan dalam mengusahakan upaya serta aksi-aksi nasional. Kongres PPI 1932 memberi dukungan lebih kuat terhadap gagasan bahwa perempuan harus mengambil bagian bersama kaum lelaki dalam perjuangan nasional. Dalam kongres tersebut juga digagas bahwa perempuan mempunyai tugas khusus membantu kaum miskin.¹²⁹ Pada kongres yang ke-4 tahun 1933, PPII membangun landasan organisasi yaitu nasionalisme, wacana sosial, netralitas masalah agama, dengan aksi mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf.¹³⁰ Kongres juga telah membentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia.¹³¹

Pada masa pendudukan tentara Jepang, salah satu kelompok pemerhati buruh perempuan adalah yang diketuai oleh Ny. Sujatin. Ia bersama kelompoknya pergi ke Lasem untuk menyelidiki kondisi buruh batik yang sebenarnya menjadi buruh tersandera. Kelompok perempuan ini melakukan

¹²⁹ Perikatan Perkoempulan Isteri Indonesia, “*Nomor Kongres PPII 1932, Isteri, Maret-April, No, 11-12, 1932* 88 hlm

¹³⁰ HS Idrus, *Wanita Dulu Sekarang dan Esok*, Waspada, Medan, 1980.

¹³¹ Kelompok peneliti diketuai oleh Sujatin Kartowiyono. Proyek penelitian pertama ialah kaum buruh di Lasem... dalam Kartowiyono, *Mencari Makna Hidupku*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.

aksi protes terhadap kondisi kerja para buruh perempuan. Tidak lepas dari itu mereka juga membicarakan masalah nasib para perempuan penghibur serta para gundik kaum lelaki pemilik usaha batik.¹³²

Pada 1935, dilakukan tuntutan hak pilih perempuan pertama dalam sebuah kongres. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial membuka peluang perempuan Indonesia tanpa hak suara.¹³³ Untuk itu dilakukan kampanye agar perempuan terlibat di dalam Volksraad. Saat itu perempuan pertama yang mengenyam pendidikan Belanda sebagai pengacara ialah Maria Ulfa, maka hak suara untuk perempuan pun mulai dibuka.¹³⁴

Gerwani sebagai Organisasi baru yang terbentuk pada Maret 1954, juga banyak menunjukkan aksi nasional seperti yang ditunjukkan gerakan-gerakan perempuan sebelumnya. Dengan semangat revolusioner gerakan ini membantu beberapa partai politik yang berbasis massa, dan menolong masyarakat sosial menghapus penindasan. Adapun aksi gerakan ini diantaranya ialah melawan pemberontakan DI-TII tahun 1951, menumpas pemberontakan terhadap RMS tahun 1956 dengan membantu pemerintah pusat dan mengkoordinasikan kader daerahnya, membantu TNI dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta (1957-1958) dengan menjadi anggota Palang Merah, dan membantu kelancaran pergerakan di daerah-

¹³² Rambe, *Sijantin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku*, Jakarta, Sinar Harpan, 1983, hlm 43-44

¹³³ Vreede-de Stuers, *Op.cit*; hlm 95

¹³⁴ Locher-Scholten, *Women an the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Nederlands Indies 1900-1942*, Amsterdam University Press, Amsterdam ,2000.. (dalam Penghancuran Gerakan Perempuan oleh Saskia EW)

daerah yang diduduki kekuasaan PRRI-Permesta, khususnya Sumatera dan Sulawesi.

Gambar 2.14:Salah satu aksi revolusioner gerakan perempuan (Gerwani) bersama dengan pemuda lainnya dalam pemberontakan DI/TII



Sumber : [http://: artikel_kolomkitajournalism.org](http://artikel_kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

Selain aksi-aksi revolusioner, gerakan perempuan juga melakukan aksi-aksi nasional yang menyangkut kesejahteraan masyarakat sosial diantaranya, perjuangan melawan krisis ekonomi pada tahun 1958 dilakukan kader Gerwani dengan mengirimkan delegasinya ke pemerintahan menuntut agar segera dilakukan penurunan harga pada bulan september 1958. Meski pemerintah tidak melakukan penurunan harga tersebut,¹³⁵ perjuangan melawan krisis ekonomi pada tahun 1960 yang dilakukan oleh Gerwani, SOBSI, Kowani serta berbagai organisasi sosial lainnya direspon oleh Presiden Soekarno. Mereka berjuang bersama untuk menurunkan harga sampai pada tingkatan yang layak dalam waktu dua atau tiga tahun.¹³⁶

¹³⁵ Harian Rakyat, 17 September 1958, hlm. 2

¹³⁶ Harian Rakyat, 30 Januari 1960, hlm. 2

Pada tahun selanjutnya, keadaan Indonesia semakin memprihatinkan dengan Perjuangan merebut Irian Barat tahun 1962. Banyak gerakan perempuan sosial seperti Gerwani dan Perwari mengirim relawan untuk perjuangan pembebasan Irian Barat serta peningkatan jumlah anggota.¹³⁷ Kemudian peran serta dalam Perjuangan dalam Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964-1965) dilakukan oleh Gerwani dan SOBSI. Mereka mendukung nasionalisasi perusahaan minyak Inggris Caltex dengan melakukan aksi boikot bersama. Para pembantu rumah tangga menolak melakukan pekerjaan bagi para majikan mereka, aksi itu meluas ke restoran dan toko-toko yang menolak melayani orang asing.¹³⁸ Di bulan September di tahun yang sama, mereka melakukan latihan untuk sukarelawati dalam ganyang Malaysia.¹³⁹

Aksi yang meluas dilakukan organisasi perempuan sosial dan para kaum perempuan yaitu aksi menentang AS tahun 1965 di Bandung dengan berbaris di jalan-jalan.¹⁴⁰ Gerakan-gerakan ini berjalan bergandengan tangan dalam menuntut pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap imperialisme

¹³⁷ Saskia Eleonora Weiringa, *Op.cit*; hlm 258

¹³⁸ Vrouwengroep Komite Indonesie (tanpa tahun), *Indonesische Vrouwen in Beweging 1949-1965*, Amsterdam: Vrouwengroep Komite Indonesie.

¹³⁹ Latihan yang dilakukan ialah baris-berbaris dan latihan kemiliteran, termasuk juga pelajaran tentang pidato Presiden berjudul Tavip, Marxisme, masalah yang berhubungan dengan produksi. Ny. Subandrio memberikan pelajaran tentang gerakan perempuan kepada para kader yang akan memperkuat barisan progresif revolusioner. Ny. Subandrio mengatakan bahwa saat itu negara kita diancam komplotan neo-kolonial Malaysia. Dari situ gerakan perempuan berdislipin karan pengalaman pahit kolonialisme dan latihan kaum buruh wanita tidak akan tertinggal.

¹⁴⁰ Harian Rakjat, 15 dan 29 Januari, 30 September 1965

Amerika,¹⁴¹ termasuk menentang dan memboikot film-film AS yang merusak moral kaum muda bangsa.¹⁴²

b. Aksi-aksi sosial di berbagai Daerah

Gerakan perempuan menjadi semakin nyata ketika mereka menunjukkan perhatiannya lewat aksi-aksi daerah. Kebanyakan aksi-aksi daerah dilakukan oleh gerakan perempuan sosial, salah satunya Gerwani seperti aksi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara tahun 1955. Selain itu, kelompok Perempuan Tani berbaris bersama di depan untuk menghalangi traktor yang akan meratakan tanaman kaum tani.¹⁴³ Selain itu ada pula aksi kontrol sosial dengan mengajukan protes kepada pihak yang dianggap berwenang untuk menghapuskan perjudian dan mengurangi peluang suami untuk berbuat serong ketika sedang bertugas keluar kota, dilakukan oleh Ikatan Wanita Kereta Api (IWKA, 1955) dan Ikatan Istri Kementrian Penerangan (IIKP, 1954). Kemudian kegiatan peningkatan mutu keahlian anggota dalam rangka melayani masyarakat selain mengatasi kesulitan anggota sendiri dalam bidang sosial ekonomi oleh Ikatan Ahli Kecantikan Wijaya Kusuma (1958) di Jakarta.¹⁴⁴

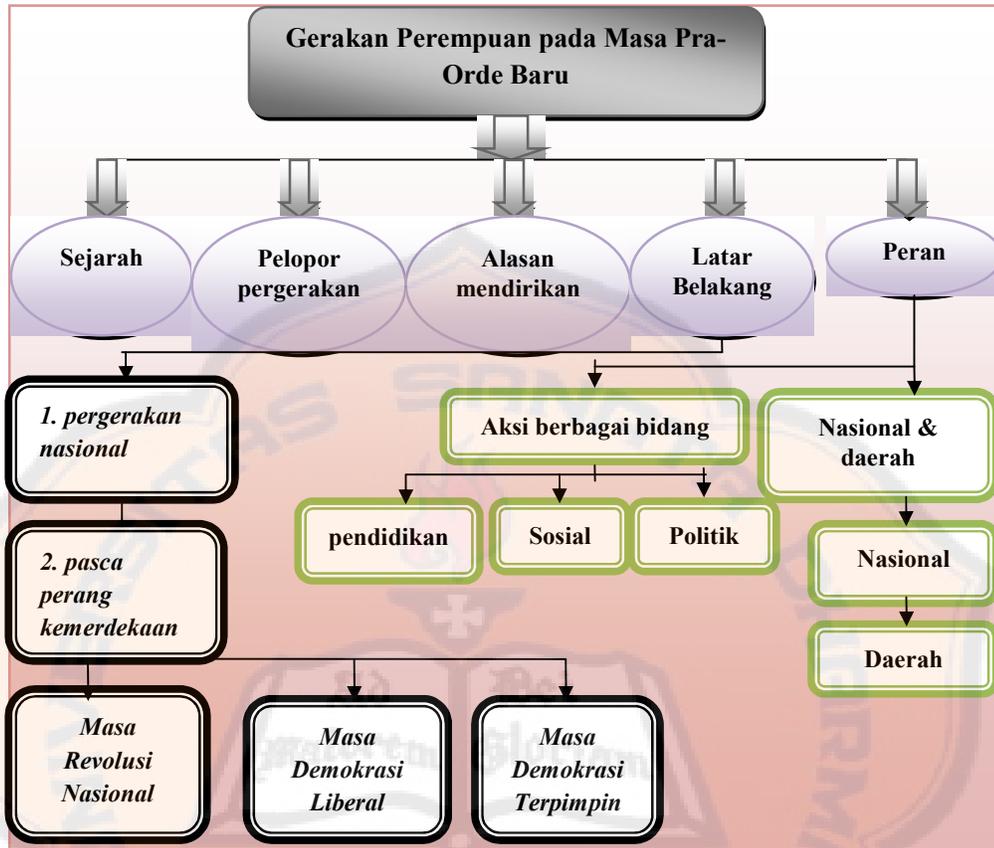
¹⁴¹ Saskia Eleonora Weiringa, *Op.cit*; hlm. 269

¹⁴² Hikmah Diniah, *Op.cit*; hlm 145

¹⁴³ *Ibid*, hlm 146

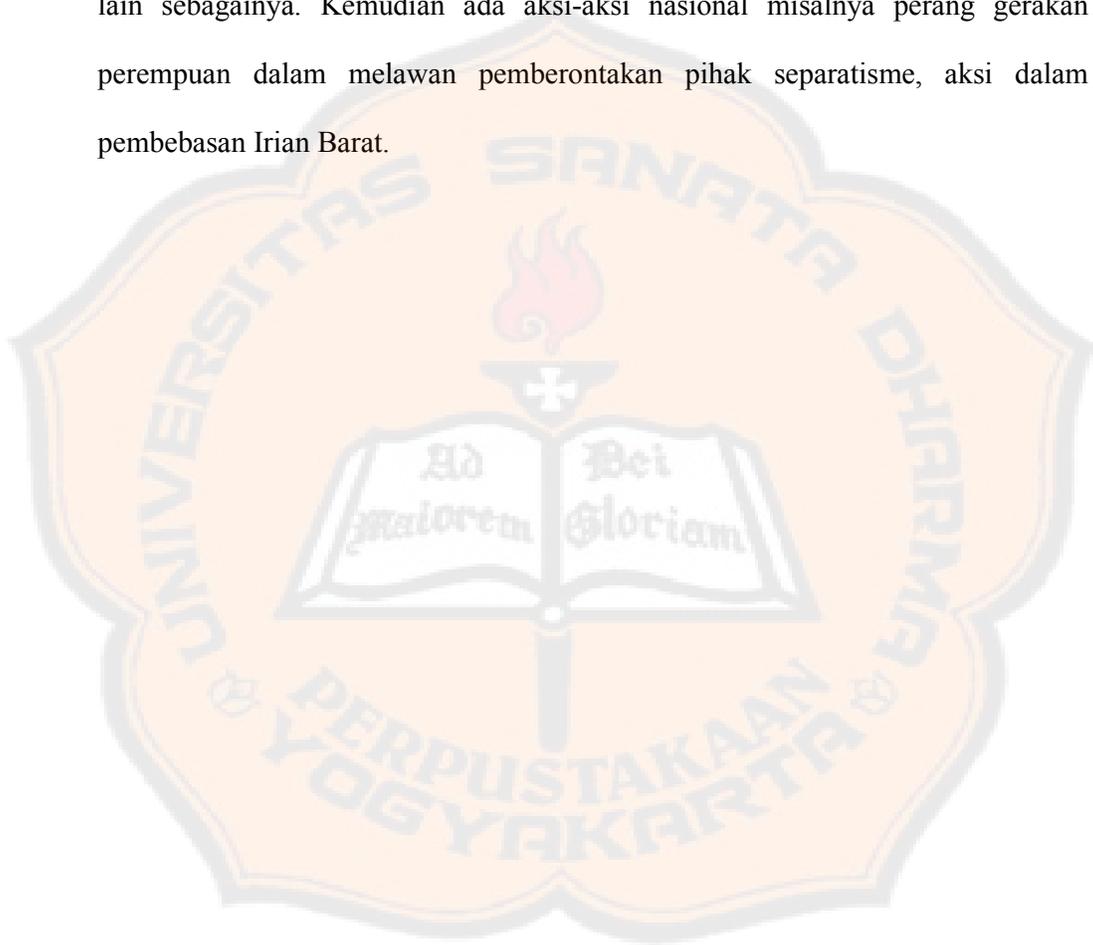
¹⁴⁴ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Op.cit*; hlm 122

Bagan 2.1: Gerakan Perempuan pada Masa Pra-Orde Baru



Berdasarkan bagan di atas dapat digambarkan perkembangan gerakan perempuan dimulai pada pergerakan nasional. Organisasi perempuan meluas setelah bermunculan banyak tokoh penggerak pada masa itu seperti Kartini. Alasan mendirikan organisasi perempuan ialah perjuangan melawan penindasan atas kawin paksa, kurangnya pendidikan, dan pada akhirnya perjuangan hebat melawan kolonialisme pun harus dilakukan. Organisasi perempuan juga dituntut untuk dapat bermain politik. Kemudian peran gerakan perempuan meliputi beberapa aspek yang pertama lewat program perjuangan dan yang kedua melalui aksi-aksi, baik aksi-aksi nasional, maupun aksi-aksi daerah. Program perjuangan

telah dimulai oleh gerakan perempuan sejak organisasi perempuan terbentuk. Selain itu peran perempuan dibuktikan lewat aksi-aksi daerah dan nasional. Aksi-aksi daerah yang pernah dilakukan ialah, menghalang pentraktor di daerah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, aksi di Jengkol membela masyarakat kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksi-aksi nasional misalnya perang gerakan perempuan dalam melawan pemberontakan pihak separatisme, aksi dalam pembebasan Irian Barat.



BAB III

**GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU:
TEKANAN POLITIK DARI REZIM**

**A. Latar Belakang Orde Baru sebagai Awal Pembatasan Peran Perempuan
Indonesia**

Lahirnya Orde Baru menandakan suatu perubahan besar dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Hal itu tampak dalam suatu orientasi yang membatasi peran perempuan Indonesia dan ditunjukkan dalam suatu aturan. Orientasi dan aturan itu muncul karena berbagai peristiwa dan wacana besar tentang citra buruk pergerakan perempuan Indonesia pasca Tragedi 1965.

Adanya berbagai faktor penyebab lahirnya Orde Baru menjadi alasan kuat peran perempuan Indonesia dibatasi, bahkan peran gerakan perempuan dalam perpolitikan nasional menjadi hilang pada masa ini. Untuk itu, ada beberapa hal penting terkait perubahan peran perempuan Indonesia dan tekanan politik terhadap pergerakan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru.

Era Orde Baru diawali dengan berbagai peristiwa diantaranya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Saat itu, keadaan politik dan keamanan negara menjadi tidak stabil karena peristiwa Gerakan 30 September 1965, dan konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung

lama. Selain itu, kesatuan aksi (KAMI¹⁴⁵, KAPI¹⁴⁶, KAPPI¹⁴⁷, KASI¹⁴⁸, dan sebagainya) yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66”¹⁴⁹ untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.¹⁵⁰ Beberapa pergerakan perempuan juga dianggap terlibat dalam peristiwa ini, karena dukungan yang diperoleh dari beberapa organisasi sosial pada masa pra-Orde Baru.

Kejadian-kejadian yang beruntun sebelum Orde Baru menjadi bukti transisi yang kuat sepanjang sejarah Indonesia. Salah satu peristiwa penting pula ialah adanya Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi pembubaran PKI berserta organisasi massanya, pembersihan kabinet Dwikora, dan penurunan harga-harga barang.¹⁵¹

Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan sebagai bukti orientasi untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan.

Hal ini berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah

¹⁴⁵ Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dalam *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, karya A. Kardiyat Wiharyanto, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2011, hlm 144

¹⁴⁶ Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, *ibid.*

¹⁴⁷ Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, *ibid.*

¹⁴⁸ Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, *ibid.*

¹⁴⁹ Angkatan '66 dalam pengertian sempit ialah para mahasiswa, pemuda, pelajar yang ikut serta menyetujui terhadap perjuangan aksi-aksi di tahun 1965-1967.

¹⁵⁰ Cosmas Batubara, *Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil dan Tantangannya*, Yayasan Prahita, Jakarta, cetakan 1, 1986, hlm 37-38

¹⁵¹ A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2011, hlm 171

karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Tetapi saat itu muncul konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia.

Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. Tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.¹⁵²

Sejak saat itu, orientasi pembaharuan Orde Baru dan penghapusan beberapa organisasi sosial, membawa tekanan besar bagi perjalanan pergerakan perempuan Indonesia. Sebelumnya program perjuangan yang dilaksanakan beberapa organisasi otonom perempuan sangat berpengaruh bagi berbagai perjuangan militan bangsa. Beberapa organisasi perempuan dianggap radikal karena didukung oleh organisasi besar pemerintah pra-Orde Baru yaitu PKI. Untuk itu, semua organisasi perempuan sosial dan otonom yang programnya tidak sejalan dengan pembangunan nasional Orde Baru dibatasi.

¹⁵² A. Kardiya, *Op.cit*; hlm 171

B. Depolitisasi Gerakan Perempuan oleh Rezim Orde Baru

Pada masa Orde Baru ada beberapa depolitisasi yang mempengaruhi proses pembangunan diantaranya pembentukan kabinet pembangunan, fusi atau penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai pendukung pemerintah, korporasi masyarakat dimana setiap anggota pegawai diangkat menjadi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia), peran ganda atau dwifungsi ABRI dengan alasan untuk fungsi stabilisator dan dinamisator negara, dan pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat sepanjang pemerintahan Orde Baru. Semua hal ini, menjadi kekuatan besar dalam mengadang berbagai bentuk kritisasi sistem pemerintah Orde Baru dari beberapa organisasi atau elemen masyarakat.

Pada perkembangannya berbagai depolitisasi menjadi pegangan kuat untuk dapat dengan mudah membatasi pergerakan perempuan Indonesia. Untuk itu, organisasi perempuan pada masa Orde Baru mengalami domestikasi dengan implikasi terjadinya penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Pada perkembangannya, gerakan perempuan semakin sporadis (bergerak sendiri-sendiri). Pemerintah Orde Baru membatasi gerakan sosial dan gerakan perempuan dengan alasan mengurangi lebih banyak korban pasca kejatuhan PKI. Pada akhirnya, berbagai gerakan sosial termasuk organisasi perempuan yang sebelumnya gigih, militan, dan aktif memperjuangkan NKRI dari Neo kolonialisme dan imperialisme harus terhenti.

Gerakan perempuan saat itu dianggap radikal oleh pemerintah, karena sering melakukan kegiatan-kegiatan revolusioner, seperti ganyang Malaysia, membantu dalam pembebasan Irian Barat, dan membantu para petani serta buruh dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Semangat ini, tidak sesuai dengan prinsip pembangunan rezim Orde Baru. Depolitisasi rezim Orde Baru dalam politik Patriarkhi, meyakini perempuan bukan lawan politiknya, tetapi sebagai pendukung program pembangunan ekonomi Orde Baru. Selain itu, muncul wacana-wacana tentang domestikasi peran perempuan Indonesia yang tertuang dalam Panca Dharma Wanita.

Organisasi perempuan pada masa Orde Baru menjadi organisasi fungsional. Dalam hal ini, organisasi lama harus menyesuaikan diri, dan organisasi baru harus beranggotakan istri-istri pegawai dengan kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan keluarga menengah ke atas. Wanita Demokrat yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris massa dan berhubungan erat dengan PNI menunjukkan keadaan serupa setelah PNI difusikan ke dalam Partai Demokrat Indonesia (PDI).

Organisasi perempuan bentukan Orde Baru telah mereduksi peran perempuan sebatas tiga hal yaitu “Istri, Ibu, dan Ibu Rumah tangga. Tugas ini amat mulia, tetapi tanpa disadari telah menyebabkan berkurangnya tempat bagi perempuan sebagai “manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pikiran bagi kemajuan perempuan”.

Organisasi-organisasi perempuan pada masa Orde Baru, wajib mengikuti kebijakan-kebijakan Orde Baru. Pada masa ini, tidak ada lagi

perempuan Revolusioner, yang semangatnya pernah ditunjukkan oleh Dewi Sartika, R.A Kartini, dan Ibu S.K Trimurti (pada Orde Lama diangkat menjadi Menteri Perburuhan). Selain itu, Kongres Perempuan Indonesia yang sebelumnya berjalan mulus dan berurutan, menjadi tidak beraturan dimulai pada masa Orde Baru.¹⁵³ Untuk itu, ada beberapa organisasi perempuan yang tetap aktif berjalan masing-masing, tanpa dukungan dari pemerintah. Mereka juga membentuk berbagai organisasi non-pemerintah membantu lembaga masyarakat perempuan agar program pengurangan diskriminasi dan eksploitasi perempuan tetap terlaksana, sehingga mendapat dukungan dari pemerintah.

C. Alasan Gerakan Perempuan Dibatasi pada Masa Orde Baru dan Transformasi Peran Perempuan Indonesia

Pemerintah Orde Baru menghendaki segenap instansi pemerintah baik yang sudah terbentuk dalam organisasi maupun yang baru dibentuk, agar bersatu dalam tatanan yang telah dibangun rezim pada saat itu. Dalam hal ini misalnya, partai-partai dikelompokkan menjadi satu bagian agar mengurangi persaingan kuat antar partai, lalu pengelompokan organisasi perempuan lama yaitu yang tergabung dalam Kowani harus menyatu dengan organisasi istri bentukan pemerintah.

Perbandingan mengenai organisasi perempuan dapat ditinjau dari perkembangan gerakan perempuan semasa pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Pada masa itu pergerakan perempuan menunjukkan semangat

¹⁵³ Wawancara dengan anggota KPI Ibu Nunuk Prasetyo

tinggi dalam memperjuangkan berbagai kepentingan kaum perempuan dan masyarakat sosial. Selain itu, terjadi arus balik gerakan perempuan di Indonesia ketika Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dihancurkan pada akhir tahun 1965.¹⁵⁴ Setelah itu organisasi-organisasi perempuan Indonesia masuk ke dalam era Orde Baru menjadi sporadis (berjalan masing-masing) dan menjadi organisasi fungsional. Alasan dilakukannya perubahan program perempuan ialah untuk memperlancar pemerintahan dengan mengurangi oposisi rezim Orde Baru. Rezim merasa takut atas eksistensi besar pergerakan perempuan Indonesia yang sebelumnya menjadi salah satu tantangan besar. Untuk itu, peran perempuan ditransformasikan ke dalam bentuk lain dimana masyarakat menerima peran itu dan mendukung pemerintahan Orde Baru.

Organisasi perempuan harus mengikuti ideologi pembangunan, dimana perempuan harus menjalani kegiatan domestik sebagai ibu dan istri. Ini merupakan hal baru bagi gerakan perempuan yang awalnya memiliki semangat revolusioner, sehingga ada ketidaksiapan dan berbagai tekanan yang mereka terima dengan aturan baru tersebut. Federasi gerakan perempuan seperti Kowani bisa menyesuaikan dengan menjadi organisasi ibu, karena ada anggota gerakan yang bertahan sampai era Orde Baru, tetapi gerakan-gerakan perempuan sosial dan buruh tidak dapat lagi menyuarakan tuntutan mereka.

¹⁵⁴ Penghancuran sampai ke tingkat massa menumpas habis elemen kekuatan Gerwani yang didukung oleh kaum perempuan baik di tingkat daerah maupun pusat, baik dari rakyat jelata maupun menengah ke atas. Penghancuran sangat berhasil terhadap Gerwani lewat pencitraan perempuan kejam yang menari-nari, menyilet, dan mencungkil mata 7 jenderal di Lubang Buaya. Citra ini, selain diberitakan di koran-koran yang terbit saat itu, juga dijadikan film "Pengkianatan G 30 S/PKI" yang ditayangkan secara nasional setiap tanggal 30 September; lihat, Saskia E Weirenga, *The Politization Gender Relation in Indonesia: The Indonesian Women's Movement and Gerwani until The New Order State*, disertasi ISS, Den Haag, 1995

Untuk membatasi ruang gerak politik gerakan perempuan maka rezim Orde Baru membuat sejumlah aturan, agar tidak menghambat jalannya pemerintahan pembangunan Orde Baru. Reduksi peran perempuan oleh rezim Orde Baru diantaranya ialah program perjuangan diganti pada pemusatan program keterampilan ekonomi rumah tangga, program pendidikan sekolah. Program pengajaran bagi anak-anak (seperti TK Perwari) diganti dengan program pendidikan dasar pada anak, program pendidikan berorganisasi pada perempuan-perempuan pedesaan diganti dengan pendidikan ketenagakerjaan untuk perusahaan-perusahaan, dan yang lebih memberatkan ialah aktivitas berpolitik diganti dengan aktivitas domestik. Meski pekerjaan domestik merupakan tanggungjawab dasar perempuan, tetapi kesempatan untuk aktivitas politik tidak dapat dirasakan lagi.

Berbagai peraturan yang dikembangkan oleh rezim difokuskan kepada peran perempuan sebagai ibu dan istri untuk mengontrol posisi perempuan dalam negara. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tahun 1972 dengan sasaran perempuan pedesaan.¹⁵⁵

Kemudian program difokuskan pada peran reproduksi perempuan yang mengharapkan kesediaan perempuan untuk membatasi jumlah kelahiran demi kesuksesan program penurunan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) yang pelaksanaannya berupa distribusi kontrasepsi moder ke daerah pedesaan

¹⁵⁵ Norman Sulivan, "Gender dan politik di Indonesia" dalam *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, Maila Stivens (Ed.), 64 (Australia: Centre of Southeast Asian Studies Monash University Aristoc Press, 1911)

mulai tahun 1970-an. Untuk mendukung program KB, rezim Orde Baru juga mensosialisasikan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKKBKS) yang mendorong penciptaan keluarga kecil cukup dengan dua anak saja.¹⁵⁶ Meski program KB berhasil menurunkan tingkat kelahiran dari 5,61% pada tahun 1970-an dan menjadi 2,78% pada tahun 1977,¹⁵⁷ tetapi program peningkatan KB hanya dilakukan bagi perempuan tidak untuk laki-laki. Hal ini menimbulkan pandangan perempuan dan kelompok-kelompoknya bahwa ada manifestasi ideologi gender paham keibuan atau negara ibu (*state ibuisim*).¹⁵⁸

Selain itu, perubahan orientasi kebijakan ekonomi rezim Orde Baru dari pertanian ke industrialisasi pada tahun 1980-an mengharuskan perempuan bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Segi positifnya perempuan semakin terampil dan tentunya ada peningkatan ekonomi negara.¹⁵⁹ Namun demikian, perempuan yang difungsikan pada masa itu tidak sadar bahwa keterlibatan mereka justru mereproduksi ketimpangan gender, karena perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pencarian keuntungan dan berorientasi global membutuhkan tenaga perempuan untuk menekan biaya produksi. Tenaga perempuan sama dengan

¹⁵⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Wacana Perempuan dalam Muhammadiyah" Media Inovasi, edisi spesial Muktamar Muhammadiyah ke-45 (2005), hlm 52

¹⁵⁷ Khofifah Indar Parawanda, "Institutional Building; An Effort to Improve Indonesian Women's Role and Status," ... *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, Kathryn Robinson dan Sharin Bessell (Ed.) (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2002). 72 artikel *Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*, oleh Kurniawati Hastuti Dewi, hlm 61

¹⁵⁸ Julia I Suryakusuma, "Negara dan Seksualitas Era Orde Baru di Indonesia", hlm 100 dalam artikel *Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*, oleh Kurniawati Hastuti Dewi, hlm 61

¹⁵⁹ Kurniawati Hastuti Dewi, *Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*, hlm 62

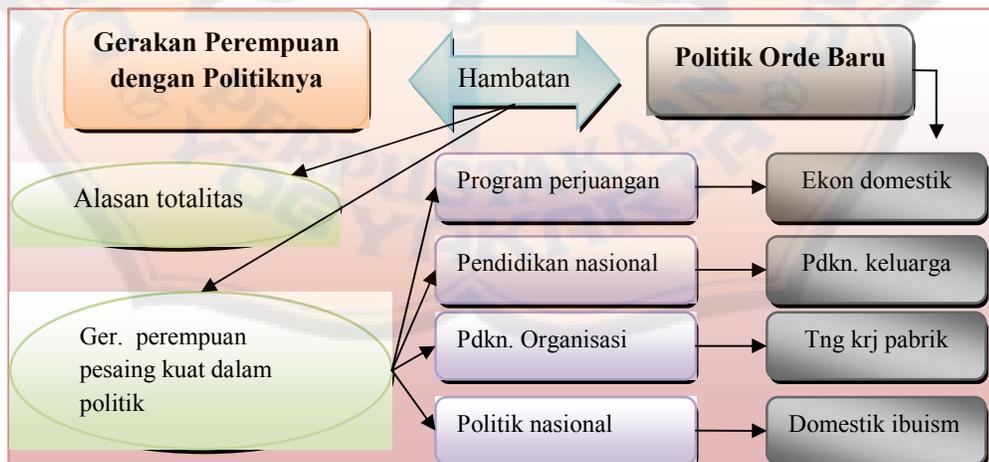
tenaga murah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar yang bebas dan kompetitif.¹⁶⁰

Gambar 3.1: Perempuan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah di pabrik.



Sumber:¹⁶¹ dalam kutipan

Bagan 3.1: Alasan gerakan perempuan dibatasi pada masa Orde Baru



¹⁶⁰ Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reprodulsi Kekuasaan*, Tarawang Press, Yogyakarta, 2001, hlm 119-120

¹⁶¹ Indiah Rahayu, *Op.cit*; hlm 247

Bagan 3.1 di atas menjelaskan bahwa gerakan perempuan dengan segala kekuatan politik sebelum Orde Baru menjadi hambatan besar dalam stabilitas Orde Baru, karena gerakan perempuan seringkali menuntut hak-hak kaumnya dan masyarakat kecil, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, ini merupakan salah satu hambatannya. Hambatan lain selain sebagai pesaing kuat, rezim Orde Baru membuat reduksi peran perempuan demi totalitasnya agar tetap bertahan lama, dan tidak ada pesaing atau oposisi dalam pemerintahannya. Untuk itu, dapat digambarkan berbagai reduksi dari program perjuangan hingga politik nasional gerakan perempuan yang sebelumnya sukses menjadi upaya program ekonomi keluarga hingga kewajiban domestik bagi perempuan Indonesia. Demikian upaya rezim Orde Baru untuk mengurangi oposisi dalam pemerintahannya termasuk menjalankan otoritasnya terhadap gerakan perempuan

D. Organisasi Perempuan yang Dikehendaki Rezim Orde Baru

Pada masa Orde Baru, peran perempuan dirumuskan dalam Panca Dharma Wanita. Rumusan ini mengadopsi nilai tradisi, agama dan budaya *petite bourguise* Eropa,¹⁶² membatasi tugas perempuan pada peran-peran sebagai berikut:

- 1) Wanita sebagai pendamping suami.

¹⁶² Mengadopsi moral victorian yang diciptakan untuk mengontrol seksualitas kaum priyayi Inggris masa pemerintahan Ratu Victoria. Etika ini mementingkan kerja keras, menahan diri dari “nafsu seksual”, dan larang terhadap perilaku seksual dianggap “menyimpang”. Kehidupan dengan seorang suami dan anak-anak dipakai sebagai model keluarga ideal. Etika ini menggejala ke seluruh Eropa pada abad ke-19 yang kemudian dibawa masuk ke negeri-negeri jajahan. Di Indonesia, moral ini bertemu dengan moral priayi dan keduanya dipertahankan untuk mengatur kehidupan kaum perempuan (lihat Ongokham, “Kekuasaan dan Seksualitas”, dalam Prisma, Juli 1991)... dalam Prisma, Mei 1996- Ruth Indiah Rahayu, “Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an”

- 2) Wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda.
- 3) Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga.
- 4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan.
- 5) Wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.

Hal-hal di atas memperlihatkan peran perempuan (termasuk tugas primer gerakan perempuan) ialah sebagai isteri, dan sekaligus sebagai ibu. Jika mereka mau bekerja menjadi anggota gerakan atau organisasi, mereka tidak boleh melupakan tugas utama isteri sebagai pendamping suami dan ibu yang melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga.¹⁶³

Pemerintah Orde Baru mengharapkan Indonesia dapat menjadi negara industri yang sejajar dengan negeri-negeri industri maju lainnya. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan sistem politik dan ekonomi, dan penghancuran sebagian besar institusi, sehingga digantikan dengan institusi baru yang memudahkan elit mengontrol sumberdaya yang hidup di dalam masyarakat.¹⁶⁴

Melihat harapan dan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, muncul berbagai persoalan yang dialami gerakan perempuan. Mereka kehilangan akses dan kontrol kehidupan perempuan terhadap berbagai sumberdaya yang dahulu dapat mereka kembangkan.

¹⁶³ Prisma, Mei 1996- Ruth Indiah Rahayu, “ *Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*”, hlm 33

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 34

Bagan 3.2: Aturan Rezim Orde Baru terhadap Organisasi Perempuan



Berdasarkan bagan 3.2, ada 5 aturan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, untuk mengurangi gerakan perempuan radikal, yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan, memperbaiki sistem gerakan perempuan yang di masa sebelumnya ikut campur urusan laki-laki, dan mengubah peran perempuan agar dapat menghasilkan sesuatu untuk perekonomian keluarga.

Aturan pertama, perempuan sebagai pendamping suami, bahwa perempuan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, tidak boleh melawan perintah suami, sesuai budaya dan hukum yang berlaku. *Aturan kedua*, perempuan sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, bahwa perempuan modern Orde Baru, tidak lagi menangani masalah-masalah kekerasan atau masalah besar, tetapi lebih penting untuk meningkatkan pendidikan dan pembangunan bangsa agar dapat bersaing dengan perubahan jaman. *Aturan ketiga*, perempuan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, dalam hal ini perempuan dituntut memiliki kreativitas dan keterampilan. Perempuan harus dapat membuat perhitungan

perekonomian keluarga, sehingga dapat menjadi keluarga sejahtera. *Aturan keempat*, perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, yaitu memiliki keterampilan yang ada perempuan harus memiliki inisiatif, mencari uang untuk kebutuhan sekunder. *Aturan kelima*, perempuan sebagai anggota masyarakat, yaitu perempuan dapat membaur dengan sesamanya, menciptakan lapangan kerja dan mengajarkan keterampilan yang mereka miliki.

E. Organisasi Perempuan Bentuk Orde Baru

Organisasi perempuan bentuk Orde Baru memahami peran perempuan sebagai isteri dan ibu (wilayah domestik). Pengertian isteri dalam hal ini ialah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki dan dipandang sebagai “pendamping suami”.¹⁶⁵ Sedangkan pengertian secara biologis tentang ibu ialah perempuan yang melahirkan anak. Panggilan “ibu” ditunjukkan kepada perempuan pengasuh anak.

1. Organisasi-organisasi perempuan yang Berdiri pada Masa Orde Baru

- a) *Dharma Wanita*, merupakan payung 19 organisasi isteri pegawai negeri sipil dengan beberapa program dan organisasi kecilnya sudah lahir sejak tahun 1960-an. *Dharma Wanita* mempunyai anggota otomatis, dari isteri pegawai negeri sipil golongan Ia sampai VI e.¹⁶⁶
- b) *Dharma Pertiwi*, berdiri pada tahun 1964. Gerakan ini merupakan gabungan isteri anggota Angkatan Darat (Persit Kartika Candra Kirana), Angkatan Udara (PIA Ardhyagarini), Angkatan Laut (Jalasenastri), dan

¹⁶⁵ Hersri Setiawan, *Dunia yang Belum Sudah*, Kockkengen, 1922

¹⁶⁶ Prisma, Mei 1996- Ruth Indiah Rahayu, “ *Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*”, hlm 35

Kepolisian (Bhayangkari). Sama halnya dengan Dharma Wanita, Dharma Pertiwi juga mempunyai anggota otomatis. Anggotanya terdiri dari isteri anggota ABRI berpangkat koprал sampai jenderal.¹⁶⁷

- c) *PKK*, merupakan organisasi perempuan secara khusus digunakan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan status perempuan-perempuan miskin desa dan kota. Organisasi ini melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita maupun instansi lain, misalnya menggerakkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yaitu memberi pelayanan penimbangan anak dan pemberian gizi kepada ibu serta anak. Inilah komponen pendukung Keluarga Berencana untuk melancarkan program selanjutnya yaitu Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Di luar pelaksanaan program tersebut, *PKK* tidak menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan ataupun persoalan berat kehidupan kaum perempuan.¹⁶⁸ Pada prakteknya *PKK* mampu memobilisasi dan mengorganisir perempuan di tingkat bawah, misalnya, seorang buruh gendong Pasar Beringharjo yang segera pulang ke desa saat berlangsung pertemuan *PKK*.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm 36

2. Organisasi Perempuan berdasarkan perkembangannya periode Orde Baru

- a) *Organisasi isteri*, sikapnya bergantung kepada pemerintah Orde Baru. Mereka berperan dalam membantu tugas dinas suami sebagai aparat. Mereka mengambil rumusan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yaitu Panca Dharma Wanita. Kegiatan gerakan ini diantaranya kesejahteraan anggota, mengikuti kunjungan dinas, menyambut tamu, penyuluhan KB, melaksanakan program ibu dan balita sehat. Hubungannya dengan masyarakat ialah memberi petunjuk untuk dilaksanakan. Hubungannya dengan organisasi lain diantaranya dengan KORPRI, ABRI, lembaga fungsional pemerintah.¹⁷⁰
- b) *Organisasi isteri otonom*, sikap gerakan ini ialah mendukung pemerintah Orde Baru. Mereka berpartisipasi dalam program nasional. Rumusan yang dipakai yaitu Panca Dharma Wanita. Organisasi ini juga memperjuangkan status perempuan yang belum menjadi mitra sejajar laki-laki. Kegiatan yang mereka lakukan ialah mengusahakan kesejahteraan anggota, melaksanakan seminar, memperingati Hari Kartini dan Hari Ibu, membantu korban bencana alam.¹⁷¹
- c) *Organisasi Perempuan LSM*, sikap mereka menolak aturan tentang ruang gerak perempuan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru. Peran politik gerakan ini ialah membela dan membawa suara perempuan yang *terepresi* Orde Baru. Rumusan peran yang mereka tunjukkan

¹⁷⁰ Prisma, Mei 1996- Ruth Indiah Rahayu, “ *Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*”, hlm 40

¹⁷¹ *Ibid.*

ialah perempuan itu empu bagi dirinya (otonom). Mereka membahas persoalan marginalisasi, subordinasi, diskriminasi kekerasan. Kegiatan LSM ini ialah *income generating*, dengan model usaha bersama *credit union*, mengumpulkan banyak anggota, membuat kesadaran tentang perlunya training sebelum menerjunkan tenaga kerja perempuan, menciptakan kelompok penerbitan, diskusi, seminar, kampanye, hingga menjaga *statement* kepada media massa.¹⁷²

Klasifikasi di atas, menjelaskan tentang keadaan gerakan perempuan di Indonesia periode Orde Baru hingga saat ini. Secara umum terdapat tiga model gerakan perempuan, yaitu model Organisasi isteri aparat birokrasi dan militer (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK) yang tidak mempunyai struktur organisasi berdiri sendiri tetapi menganut politik gender Orde Baru; Organisasi Isteri Otonom, tidak sepenuhnya otonom dan tidak terkait dengan gerakan induk seperti Perwari, atau organisasi isteri berprofesi tertentu. Gerakan ini juga menganut politik gender Orde Baru.

Adanya pengelompokan organisasi perempuan bentukan Orde Baru membuat berbagai persoalan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan di luar lingkup keluarga praktis terabaikan. Organisasi perempuan bentukan Orde Baru juga menyebarluaskan misinya yaitu citra perempuan ideal dalam konotasi “Kodrat”. Dengan “kodrat” ini perempuan ideal dicitrakan bersifat lemah lembut, tidak berbicara dengan

¹⁷² Prisma, *Op.cit*; hlm 40

keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas kepentingan suami, serta menjadi istri penurut dan anak perempuan yang patuh. Pemerintah Orde Baru telah memobilisasi perempuan dengan kekuatan politik organisasi untuk tujuan politik tertentu. Artinya, peran perempuan maupun keluarga dalam konteks pemerintah Orde Baru tidak bisa dihapuskan oleh negara, tetapi dijinakkan dan dimanfaatkan.

Bentuk gerakan LSM, tidak mempunyai organisasi induk dan menolak politik gender. LSM terbentuk akibat kekecewaan beberapa aktivis 1966, yang sangat berharap Orde Baru melakukan beberapa perubahan dan perbaikan di segala bidang, terutama ekonomi. Harapan tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan. Sebagai organisasi yang didirikan oleh warga sipil, peran LSM sebagai gerakan independen mampu memperkuat masyarakat sipil.¹⁷³ Dalam LSM organisasi yang tidak memiliki kelompok binaan, akan berhubungan dengan kelompok binaan melalui jaringan LSM. LSM berfungsi sebagai fasilitator kepentingan kelompok binaannya. Beberapa organisasi perempuan LSM yang menyatakan diri bergerak pada kelas menengah ke atas, sehingga dapat melayani kelompok-kelompok kecil dan mengorganisasinya, misalnya karyawan perusahaan konsultan atau kelompok profesi. Pada akhirnya, kelompok-kelompok ini diharapkan membantu kelompok kecil atau menengah ke bawah, sehingga dapat mengubah tatanan hidup kaum

¹⁷³ Makalah MM Billah, dimuat dalam Sebastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Puspaswara, Jakarta, 1993.

perempuan. Artinya, organisasi perempuan LSM sesungguhnya merupakan kumpulan dari kepentingan elit intelektual yang berkeinginan membantu kaum tertindas.¹⁷⁴

3. Organisasi Perempuan Orde Lama yang Bertahan dalam Aturan Orde Baru

- a) *Perwari* (Persatuan Wanita Republik Indonesia), sebelumnya gerakan ini menentang Presiden Soekarno untuk berpoligami. Pada masa Orde Baru, Perwari menerima anggota baru yaitu isteri-isteri pegawai. Kegiatan Perwari juga mengikuti program Orde Baru yaitu mengarah pada kesejahteraan keluarga kelas menengah ke atas.
- b) *Wanita Demokrat*, sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris massa dan berhubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada tahun 1964, namanya diubah menjadi Gerakan Marhaen Perempuan. Gerakan ini mengubah nama terkait perpecahan dalam tubuh PNI. Kegiatan gerakan ini sebelum masa Orde Baru ialah menangani permasalahan buruh kecil, petani kecil, dan pedagang kecil. Pada masa Orde Baru, gerakan ini mengganti nama menjadi Gerakan Perempuan Nasional. Gerakan ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan domestik kaum perempuan.¹⁷⁵
- c) *Kowani*, merupakan federasi gerakan perempuan yang lahir sejak jaman pra-kemerdekaan. Gerakan ini tampil sebagai pemersatu

¹⁷⁴ Prisma, *Op.cit*; hlm 39

¹⁷⁵ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Rajawali dan YIIS, Jakarta, 1984

gerakan-gerakan perempuan hingga masa Orde Baru. Pada Kongres Luar Biasa, tanggal 30 Mei-2 Juni 1966, Kowani menyatakan diri mendukung Orde Baru dan membersihkan anggota-anggotanya yang berhaluan kiri.¹⁷⁶ Anggota Kowani pada masa Orde Baru ialah perempuan yang berbentuk organisasi isteri ada pula yang otonom, meskipun tetap berhaluan sebagai “organisasi isteri”.¹⁷⁷

Bagan 3.3: Organisasi Perempuan Bentuk Orde Baru



Bagan 3.3, menggambarkan organisasi perempuan yang diciptakan Orde Baru. Pertama gerakan perempuan yang berdiri pada masa Orde Baru ialah organisasi para ibu dan isteri pegawai, diantaranya Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Mereka mengikuti azas Orde Baru sebagai perempuan pengemban Panca Dharma Wanita.

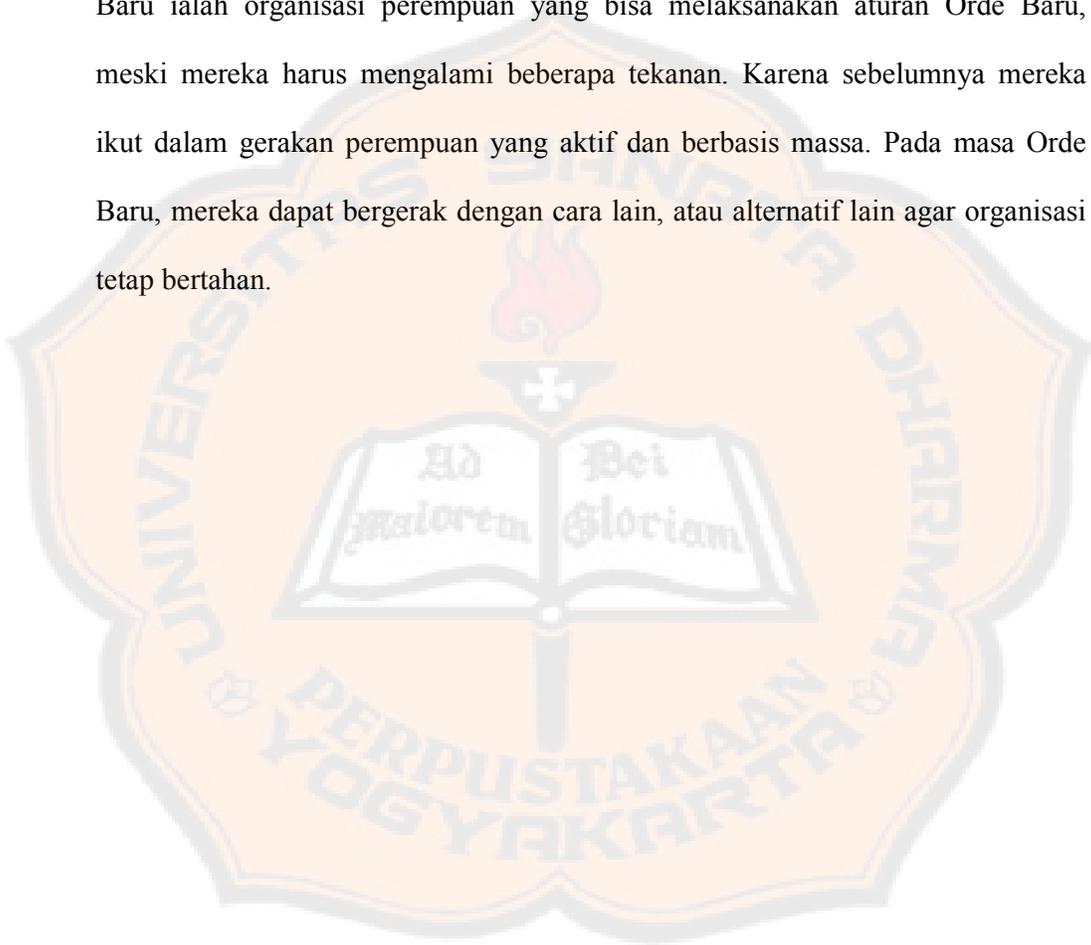
Organisasi wanita pada masa Orde Baru berkembang dengan sikap yang berbeda-beda pula. Organisasi perempuan yang mengikuti aturan Orde Baru

¹⁷⁶ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1978.

¹⁷⁷ Prisma, *Op.cit*; hlm 31

disebut dengan organisasi isteri dan organisasi isteri otonom. Sedangkan yang memilih tidak ikut aturan Orde Baru, memiliki alternatif aman untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan.

Organisasi Perempuan sebelum Orde Baru yang bertahan hingga Orde Baru ialah organisasi perempuan yang bisa melaksanakan aturan Orde Baru, meski mereka harus mengalami beberapa tekanan. Karena sebelumnya mereka ikut dalam gerakan perempuan yang aktif dan berbasis massa. Pada masa Orde Baru, mereka dapat bergerak dengan cara lain, atau alternatif lain agar organisasi tetap bertahan.



BAB IV
REAKSI GERAKAN PEREMPUAN
TERHADAP TEKANAN POLITIK REZIM DI AKHIR ORDE BARU

A. Wacana Peran Perempuan Orde Baru yang Mempengaruhi Perkembangan Perempuan Indonesia

Gerakan perempuan Indonesia pada masa rezim otoriter Orde Baru muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender Orde Baru dan proses domestikasi yang semakin menguat sejak akhir tahun 1980-an. Tekanan politik rezim Orde Baru mengarahkan perempuan Indonesia untuk berperan sebagai ibu dan istri, sehingga melemahkan gerakan perempuan Indonesia dan menghalangi munculnya sebuah gerakan perempuan baru. Akibatnya perubahan-perubahan dalam ekonomi dan dinamika politik yang mendorong proses demokratisasi memunculkan organisasi-organisasi perempuan independen dan otonom yang merupakan basis dari gerakan perempuan Indonesia.¹⁷⁸

Faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa rezim Orde Baru. Wacana-wacana mengenai hal yang sama tidak hanya menentukan jenis-jenis isu yang diperjuangkan, tetapi juga ketika gerakan perempuan berhubungan dengan negara dan proses demokratisasi, serta pendefinisian ruangan politik bagi gerakan perempuan sendiri.

¹⁷⁸ Yanti Muchtar, *Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru...* dalam Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, Jakarta Selatan, 1993, hlm 10

Wacana yang diisukan mendukung gerakan perempuan yang diposisikan dan dibatasi dalam kebijakan rezim Orde Baru. Pertama ialah dominasi negara atas masyarakat sipil, struktur kelas, pembelaan atas dasar etnis dan agama, serta struktur ekonomi dan politik global, yang terpenting ialah hubungan gender sangat penting untuk menganalisis rezim Orde Baru yang berkuasa sejak peristiwa 1965.¹⁷⁹

Faktor kedua yang memperkuat wacana gerakan perempuan dalam orientasi Orde Baru ialah Orde Baru dibangun di atas pondasi kemampuannya untuk memulihkan keteraturan. Pembunuhan secara besar-besaran berskala luas yang muncul digunakan untuk memperkuat kesan masyarakat Indonesia bahwa Orde Lama adalah kacau balau. Akibatnya muncul anti komunis dan gerakan sosial yang mempengaruhi perkembangan gerakan perempuan Indonesia.¹⁸⁰

Faktor ketiga, keberhasilan anti PKI dan komunis sebagian besar disebabkan oleh karena masuknya aspek gender dalam propaganda tersebut. Kedekatan gerakan perempuan dengan ideologi komunis pada Orde Lama menjadi wacana bahwa komunisme telah menuntun perempuan untuk bertindak di luar kodratnya. Oleh karena itu, masyarakat sosial pendukungnya harus dihancurkan, perempuan harus dikembalikan ke rumah kembali

¹⁷⁹ Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actor* (1995).

¹⁸⁰ Ariel Heryanto, "Indonesian Middle-Class Oppositional in the 1990s", dalam G. Rodan (ed) *Political Opposition in Industrialising Asia*, 1996

sehingga masyarakat diselamatkan.¹⁸¹ Kepercayaan semacam ini yang menjadi batu pijakan bagi politik gender yang dikembangkan sepanjang Orde Baru.

Peran politik gerakan perempuan terhambat karena konstruksi sosial yang menjadi alat kekuasaan rezim Orde Baru. Hak perempuan tidak lebih dari lingkup domestik, berbeda dengan kaum lelaki yang kewenangan dalam wilayah publik. Karena kekuatan dan otoritas rezim Orde Baru yang berasumsi pada kekuatan tradisi dan budaya, pembagian peran semacam itu tidak dapat langsung *dikonversi*. Perempuan yang secara otomatis berpengaruh pada perkembangan gerakan perempuan yang hendak berkiprah di ranah politik dan publik, dianggap memiliki beban ganda, sebab di samping melakukan aktivitas-aktivitas di ranah publik, mereka harus tetap memenuhi atau menyelesaikan tugas-tugas di ranah domestik. Pembagian wilayah peran laki-laki dan perempuan oleh rezim Orde Baru kemudian dilanggengkan, bahkan melembaga melalui institusi-institusi formal sampai nonformal, seperti sekolah maupun institusi-institusi pemerintah.

Peran domestik bagi perempuan dan gerakan-gerakannya, secara faktual telah menyebabkan mereka menjadi makhluk yang lemah dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, mereka kemudian dianggap hanya memiliki kemampuan yang berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat domestik, tidak mampu dan tidak dipercayai masyarakat untuk mengurus masalah-masalah publik. Mereka juga tidak dipercaya untuk menempati posisi-posisi sebagai pengambil kebijakan. Ketidakpercayaan masyarakat

¹⁸¹ *Ibid.*

tentu saja sangat berpengaruh pada sikap pemerintah dalam memilih kepada kandidat perempuan pada Orde Baru. Alasan tidak menominasikan perempuan karena kecenderungan sikap masyarakat yang belum memberi kepercayaan kepada perempuan. Karena pola pikir seperti ini, peluang gerakan perempuan dan anggotanya untuk dipilih dalam pemilu menjadi kecil. Dengan kata lain, rezim memandang tidak signifikan menominasikan kandidat perempuan, karena dipandang tidak menaikkan perolehan suara partai dalam pemilu.

Sebenarnya gerakan perempuan menilai segi positif politik untuk perkembangannya yaitu tidak terpengaruh oleh kepentingan atau situasi individual (*a veil of ignoeance*), mereka juga melihat prinsip kebebasan yang paling besar dan sama bagi semua orang dalam politik yang terbuka dan sehat.¹⁸² Gerakan perempuan yang bertahan pada rezim Orde Baru berusaha memakai alternatif baru, misalnya dengan beraksi dalam wilayah domestik untuk perempuan-perempuan lokal daerah, tetapi juga melihat masalah-masalah penindasan kaum perempuan (tergabung dalam anggota-anggota LSM perempuan). Kelompok-kelompok perempuan dalam LSM menuntut hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun legal, meski harus dengan berbagai tantangan.

Gerakan perempuan menganggap pembangunan ekonomi yang ditetapkan rezim Orde Baru membuat fungsi perempuan menjadi lemah, karena secara otomatis di dalam keluarga yang menghasilkan uang adalah

¹⁸² Majalah fakultas filsafat, Majalah Filsafat dan Teologi, Bandung, Universitas Katolik Parahayangan IISN 0852-0089, edisi April 1997, hlm 43

laki-laki. Meskipun kerja-kerja perempuan di ranah domestik sesungguhnya tidak kalah berat, tetapi tidak dianggap sebagai lapangan kerja pada umumnya, bahkan itu merupakan sebagai suatu kewajiban. Seiring dengan pandangan dan sikap masyarakat yang cenderung materialistik, kerja-kerja perempuan di wilayah domestik, seperti menangani urusan rumah tangga dan anak-anak, dipandang sebagai pekerjaan domestik, karena tidak menghasilkan materi atau uang. Perempuan dalam konteks melakukan kerja oleh rezim dalam ranah domestik dipandang sebagai “pekerja yang tak terlihat” (*invisible workers*). Padahal pandangan gerakan perempuan dalam demokrasi liberal, faktor sosial dan ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam meraih dukungan. Mereka tidak akan terpilih jika kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin, menjadi wakil, atau pengurus masalah-masalah publik masih sangat rendah. Faktor ekonomi dalam berpolitik menjadi faktor penting, karena proses kompetisi atau pencalonan memerlukan biaya operasional yang tinggi.

Di samping itu, hal yang sangat penting bagi gerakan perempuan dalam menjalani aktivitas politik adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat dasar untuk mendorong perempuan dapat berbicara dalam mengungkapkan gagasan, keinginan, dan tuntutan. Tanpa wawasan yang luas, tentu sangat sulit bagi mereka untuk mengemukakan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan-kebutuhannya.

Selain itu, terdapat kendala yang menimpa anggota-anggota pegawai perempuan atau istri pegawai dan polri untuk memasuki arena politik pada

era Orde Baru. Sebagian besar perempuan pada era itu berpandangan bahwa dalam politik sering terjadi konflik kepentingan. Sementara konflik kepentingan dalam politik sudah terlanjur dipandang sebagai wilayah laki-laki. Hal ini membuat mereka semakin enggan karena wilayah politik ialah wilayah yang tidak semestinya bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Konflik kepentingan gerakan perempuan bisa saja muncul ketika ingin memilih jalan politik, karena rezim saat itu memandang bahwa ada konflik kepentingan bisa antar gerakan atau antar kekuatan politik yang dimiliki rezim, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang cenderung menghalalkan segala macam cara. Dengan demikian ada berbagai cara dilakukan rezim untuk menekan perkembangan gerakan perempuan, cara-cara ini menjadi tekanan politik bagi gerakan perempuan dalam mempertahankan eksistensinya dalam sejarah gerakan perempuan dan mempengaruhi kepercayaan diri perempuan Indonesia.

Tabel 4.1: Kebijakan Politik Orde Baru Dan Pengaruhnya Bagi Gerakan Perempuan

No.	Tekanan-tekanan politik Orba	Pengaruh terhadap Gerakan Perempuan
1.	Norma Orba tentang Panca Dharma Wanita	1. Semua gerakan perempuan, dituntut menjadi organisasi otonom, organisasi isteri, yang kegiatannya dibatasi

2.	Pembagian kerja secara seksual tidak hanya bidang domestik tetapi juga publik. ¹⁸³	2. Gerakan perempuan tidak dapat menjalani tujuan utamanya untuk membela kaum tertindas, sehingga pada akhirnya terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hal yang berbeda.
3.	Jenis pekerjaan sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada perbedaan upah. ¹⁸⁴	3. Gerakan perempuan melihat ada kesenjangan yang dialami kaumnya, karena permasalahan kaum perempuan tidak diperhitungkan sebagai permasalahan besar oleh pemerintah.
4.	Dalam proses sosialisasi perempuan Orde Baru dihubungkan dengan kegiatan domestik, karena kegiatan tersebut kurang diperhitungkan dalam masyarakat. ¹⁸⁵	4. Gerakan perempuan menjadi semakin berhati-hati dalam melaksanakan program-programnya, sehingga harus menyesuaikan dengan sosialisasi yang dikehendaki pemerintah
5.	Ukuran-ukuran nilai dan keterlibatan perempuan ditentukan oleh sistem ideologi Orde Baru dan memberi batasan-batasan. ¹⁸⁶	5. Batasan-batasan yang dilaksanakan gerakan perempuan menjadi dilema bagi mereka, sehingga harus membentuk kelompok baru non pemerintah demi pembaharuan

¹⁸³ Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi..* dalam Prisma edisi 6 Juni 1995, hlm 4

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 5

¹⁸⁵ Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi..* dalam Prisma edisi 6 Juni 1995, hlm 6

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 7

Tabel 4.1, menggambarkan suatu analisa tentang wacana peran perempuan orde baru yang melemahkan pergerakan perempuan indonesia. Pertama, adanya norma Orde Baru membuat gerakan perempuan merombak diri, dan tetap mempertahankan gerakan itu, meski aksi-aksi nasional tidak lagi mereka jalankan, tetapi mereka wajib melaksanakan Panca Dharma Wanita. Untuk melakukan suatu aksi, gerakan perempuan harus berhati-hati dan memilih jalan aman untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan kelas menengah ke bawah.

Subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki. Seperti halnya perbedaan domestik dan publik,¹⁸⁷ stratifikasi dalam struktur ekonomi juga merupakan alat penegasan arah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, gerakan perempuan semakin dibatasi kegiatannya dalam wilayah publik maupun politik. Kemudian di dalam pembagian upah seringkali perempuan mendapatkan nilai yang rendah dibanding lawan jenisnya, sehingga banyak perusahaan pada Orde Baru memilih perempuan menjadi pekerjanya.

Masyarakat mempunyai pandangan bahwa perempuan dapat berada dalam wilayah publik, tetapi dengan menjadi organisasi independen yang mendukung aspirasi masyarakat. Meskipun ada sistem ideologi dan terstruktur

¹⁸⁷ Bidang publik dalam pembagian structural dianggap sebagai bidang yang lebih penting di dalam keseluruhan proses sosial, maka perempuan cenderung tersubordiansi karena ia menempati bidang yang kurang penting. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi, karena pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh suami maupun istri... dalam *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*, Irwan Abdullah,.. dalam Prisma edisi 6 Juni 1995, hlm 45

yang membatasi kaum perempuan dengan gerakan-gerakannya, tetapi perempuan dapat tetap mempertahankan misinya lewat Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan (LSM Perempuan). Untuk itu, perempuan dapat tetap melaksanakan aksi sosial menyuarakan aspirasinya mewakili perempuan dan masyarakat kecil yang tertindas.

B. Alasan Timbulnya Reaksi Gerakan Perempuan Indonesia Terhadap Kebijakan Orde Baru

Program pembangunan yang dilaksanakan rezim Orde Baru bertumpu pada sumber dan modal. Semua sumber yang digunakan untuk peningkatan produksi, termasuk “pemanfaatan” tenaga kerja perempuan sebagai sumber daya manusia. Jumlah perempuan Indonesia yang lebih dari setengah penduduk telah menimbulkan inspirasi para konseptor pembangunan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan.¹⁸⁸

Beberapa faktor timbulnya reaksi gerakan perempuan pada masa Orde Baru diantaranya ialah; marginalisasi¹⁸⁹ perempuan, misalnya pembagian kerja menurut gender, karena menurut gender ada pekerjaan yang cocok bagi perempuan ada yang tidak, sehingga pekerjaan yang cocok bagi laki-laki akan tertutup bagi perempuan. Kesempatan perempuan akan lebih sedikit dalam memperoleh jenis-jenis pekerjaan tertentu. Selain itu, marginalisasi perempuan nampak dalam pekerjaan domestik, maka pekerjaan

¹⁸⁸ A. Nunuk Prasetyo, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm 14

¹⁸⁹ Marginalisasi merupakan pemiskinan kaum perempuan. Selain itu, juga merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender... dalam artikel *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke Depan*, oleh A.A.I.N Marhaeni, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

yang dikuasai perempuan dinilai lebih rendah. Kecenderungan dan penilaian masyarakat terhadap perempuan semakin kuat, bahwa perempuan tidak dapat dijadikan pemimpin pada masa Orde Baru.¹⁹⁰

Selain marginalisasi ada juga subordinasi¹⁹¹ yang mempengaruhi pergerakan perempuan Indonesia. Beberapa bentuk subordinasi yang dialami perempuan Indonesia pada masa Orde Baru diantaranya; menomorduakan kesempatan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan jika dalam rumah tangga memiliki keterbatasan sumber daya, mengorbankan anak perempuan untuk masuk pasar kerja, memiliki peluang yang rendah untuk memperoleh jabatan karir maupun jabatan politik tertentu, dan jika karena kemampuannya perempuan mampu menempati posisi penting sebagai pimpinan, maka kaum lelaki merasa tertekan, karena penilaian perempuan dan kodrat yang sudah menjadi budaya.¹⁹²

Masuknya perempuan di sektor industri meningkatkan kekuatan bersaing karena perempuan dapat diberi upah rendah, selain upah buruh perempuan rendah, mereka dilecehkan dan rentan akan perlakuan kekerasan. Dengan demikian peningkatan pendidikan perempuan pada masa Orde Baru tidak selalu bermanfaat bagi perempuan sendiri, karena pada akhirnya akan menguntungkan para pengusaha yang menggunakan tenaga kerja

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm 11

¹⁹¹ Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Pandangan gender yang memandang perempuan lebih emosional, lebih lemah dari pada laki-laki, maka perempuan tidak mampu memimpin, sehingga perempuan tidak perlu diberikan posisi/pekerjaan penting...dalam artikel *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Prespektif untuk Studi Gender ke Depan*, oleh A.A.I.N Marhaeni, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

¹⁹² *Ibid.* hlm 12

perempuan.¹⁹³ Untuk itu, gerakan perempuan melakukan berbagai alternatif untuk menyelamatkan kaumnya, bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah seperti LSM, dengan berbagai aksi-aksi sosial dan pendidikan berorganisasi yang lebih baik.

C. Gerakan Kesadaran Perempuan Indonesia Terhadap Tekanan Politik Orde Baru

Gerakan kesadaran dan kebangkitan kembali kaum perempuan Indonesia senada dengan bangkitnya pergerakan internasional dengan lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 3010 (XXVI) tahun 1972, sehingga tahun 1975 diproklamasikan Tahun Perempuan Internasional. Dalam bulan Juli 1975 diadakan Konferensi Perempuan Sedunia di Mexico City yang menghasilkan Rencana Kegiatan Sedunia (*World Plan of Action*) untuk pelaksanaan Tahun Perempuan Internasional. Kemudian Majelis Umum PBB dengan Resolusi no. 3520 (XXX) memproklamasikan tahun 1976-1985 sebagai “Dasawarsa PBB untuk perempuan dengan tema: Persamaan Pembangunan dan Perdamaian dengan sub tema Kesempatan Kerja, Kesehatan dan Pendidikan”.¹⁹⁴

¹⁹³ A. Nunuk Prasetyo, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm 14

¹⁹⁴ Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, *Dinamika Wanita Indonesia: Seri 01; Multidimensional*, Cetakan 1, Jakarta, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Mei 1990, hlm 127

Gamabr 4.1: Gerakan Kesadaran Perempuan di akhir rezim Orde Baru



Sumber: Basis¹⁹⁵

Program organisasi perempuan Internasional ini merupakan pengembangan dan revitalisasi program organisasi-organisasi perempuan bentukan Orde Baru. Cirinya adalah usaha menangani masalah perempuan secara profesional. Dalam kurun waktu ini banyak lembaga penelitian yang mengkhususkan diri untuk mengkaji masalah perempuan secara spesifik dan mendetil. Banyak perguruan tinggi mengadakan studi kasus tentang perempuan, diantaranya ialah UI, IPB, Unibraw, dan lain-lain. Pada tahun 1979 dibuka *Clearinghouse for Information Women in Development* di PDII-LPII. Kegiatan pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan dengan mencakup berbagai kegiatan dan berbagai instansi pelaksanaan, misalnya melahirkan Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yaitu Yayasan Aan-Nisa'Swasti di Yogyakarta (1983), Yayasan Srikandi di Jakarta (1983), Yayasan Melati (Manajemen, latihan dan Penelitian) di Jakarta

¹⁹⁵ Basis, Gerakan Sosial Baru, No.01-02, tahun ke-55, Januari-Februari 2006, hlm 28-29

(1983), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Jakarta (1986).¹⁹⁶

D. Aksi Gerakan Perempuan karena Tekanan Politik di Akhir Orde Baru

1. Aksi Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagian elemen memandang secara tradisional tentang kemampuan gerakan sosial bahwa, tidak ada gerakan perempuan di masa Orde Baru, karena tidak ada pendukung dan massa yang dimiliki oleh gerakan ini. Dalam hal ini gerakan perempuan dikategorikan sebagai gerakan sosial baru (gerakan yang belum memberi banyak peran bagi perkembangan bangsa), karena walaupun begitu, gerakan ini mampu menumbuhkan kesadaran baru di kalangan masyarakat, untuk lebih berperan dalam menghapus penindasan masyarakat sosial. Secara otomatis gerakan ini menimbulkan lembaga baru di akhir Orde Baru akibat strukturalisasi peran perempuan dan berbagai tekanan politiknya.¹⁹⁷

Adanya delegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik, mengakibatkan gerakan perempuan semakin lemah. Kodrat menjadi kata kunci, khususnya untuk mensubordinasikan perempuan.¹⁹⁸ Hal tersebut menjadi penting untuk meningkatkan nilai ekonomis dalam mendukung pembangunan nasional, pekerjaan perempuan merangkap yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan publik.¹⁹⁹

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Yanti Muchtar, *Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru...* dalam Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, Jakarta Selatan, 1993, hlm 7-8

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ A. Nunuk Prasetyo, *Op.cit.*; hlm 13

LSM perempuan dapat bersinergi apabila terus dilakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi perempuan independen, gerakan pro-demokrasi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini dibutuhkan kesamaan persepsi di antara pelaku gerakan tentang masalah, tujuan dan target yang akan dicapai.²⁰⁰

Agenda yang ingin dicapai oleh lembaga masyarakat perempuan ialah mempengaruhi proses pengambilan keputusan lembaga-lembaga politik dalam rangka mendorong demokratisasi yang lebih luas dan lebih mendalam di berbagai sektor kehidupan. Setiap tantangan yang dialami perempuan dihadapi bersama-sama dengan melakukan gerakan lintas sektor yaitu bekerjasama dengan elemen-elemen pro-demokrasi dan kelompok-kelompok gerakan feminisme.

2. Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Perempuan Bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah (Independen)

Sebelumnya pada periode pra-Orde Baru perjuangan kaum perempuan bersama kaum laki-laki sangat harmonis sehingga dapat merebut kemerdekaan bersama. Kaum perempuan ditugaskan di bidang logistik dan kesehatan. Meskipun peranannya sebagai ibu dan diwarnai oleh tugas stereotype perempuan, tetapi banyak perempuan yang mampu menjalankan tugas di luar stereotype, misalnya tugas politik. Periode selanjutnya, demokratisasi (1946-1960). Periode ini ditandai dengan gerakan politik melawan kemiskinan dan ketidakadilan, dan gerakan

²⁰⁰ artikel Misma Kasim, *Realitas dan Agenda Gerakan Perempuan dalam Gerakan Prodemokrasi*

perempuan pada masa itu lebih beragam misinya, karena kebebasan dalam aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁰¹

Memasuki periode Orde Baru, rezim berusaha mempertahankan peran berorganisasi perempuan, tetapi sesuai arah pembangunan nasional. Dalam hal ini, semangat gerakan perempuan kalangan bawah didukung dalam wadah organisasi PKK, yang dikontrol melalui Departemen Dalam Negeri, di sini istri Menteri Dalam Negeri menjadi ketua penggerak PKK Pusat. Agar lebih teratur dalam mengontrol perempuan, ditunjuk seorang Menteri Urusan Peranan Wanita.²⁰² Pemerintah Orba merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintahan pada tahun 1974. Selain PKK, ada pula Dharma Wanita yang terdiri dari para istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi yang terdiri dari para istri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Organisasi-organisasi ini membantu pemerintah dalam menyebarkan ideologi gender dalam ketentuan Panca Dharma Wanita.²⁰³

Gerakan-gerakan perempuan yang bertahan pada Orde Baru, masih berada dalam Kowani. Gerakan-gerakan tersebut diantaranya ialah Perwari, Aisyah, dan Wanita Katolik.²⁰⁴ Perwari dianggap sebagai organisasi istri otonom, mereka tidak bebas dalam melaksanakan

²⁰¹ A. Nunuk Prasetyo, *Op.cit*; hlm 20

²⁰² *Ibid*, hlm 21

²⁰³ Yanti Muchtar, *Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru...* dalam Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, Jakarta Selatan, 1993, hlm 11

²⁰⁴ Saskia Weiringa, *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra, 1998, hlm 39

programnya, karena secara otomatis program dan misi awalnya sebagai perempuan dengan semangat revolusioner diubah dengan dasar Panca Dharma Wanita, mereka pun harus menyesuaikan ketentuan rezim. Program Perwari yang berubah total diantaranya ialah program perjuangan penghapusan penindasan dan pendidikan keorganisasian perempuan desa menjadi program domestik dengan arah pembangunan nasional. Kedua, persoalan-persoalan perempuan tertindas diantaranya semakin banyaknya industri hiburan yang menjual perempuan, film pelecehan seksual, dan penganiayaan istri. Beberapa hal tersebut tidak terlalu diperhitungkan yang diperhitungkan dalam pemerintah Orde Baru, sementara Perwari dan gerakan perempuan lain tidak mempunyai hak mendorong aspirasi perempuan lain untuk bersuara dalam politik. Akhirnya kebebasan gerakan perempuan pada masa Orde Baru semakin minim.

Demikian halnya dengan Aisyah, Wanita Katolik dan gerakan perempuan sosial, mereka dibatasi dengan program-program pembangunan nasional. Organisasi-organisasi istri, membantu menggelorakan kampanye nasional pembebasan Irian Barat, dan ganyang Malaysia. Keanggotaannya suka rela dan kegiatannya terbatas. Di berbagai pemerintahan berdiri organisasi pegawai perempuan. Pimpinan dipilih oleh anggota, dan para perempuan anggota organisasi bersangkutan bertujuan untuk hal-hal yang dirasakan sebagai

kepentingan mereka. Istri-istri pegawai boleh jadi anggota, tetapi tidak wajib.²⁰⁵

Struktur ini diubah oleh rezim Orde Baru bahwa istri pejabat harus menjadi anggota organisasi ini. Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI, organisasi untuk pegawai negeri. Perubahan terakhir diberlakukan dalam pertengahan dasa-warsa 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasarkan pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola yang sama dengan pola pemerintahan, yaitu istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Jika suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.

Keadaan lain terkait kebijakan peran perempuan oleh rezim ialah terjadinya restrukturisasi kantor Kementerian Perkebunan. Para perempuan yang bekerja di kantor-kantor kementerian di Jakarta, yang organisasinya aktif. Mereka sangat aktif pada masa Orde Lama melakukan peranan sosialnya dengan melakukan segala macam kegiatan serikat buruh demi kepentingan para anggota. Misalnya, berusaha menentang kecenderungan pegawai laki-laki yang melecehkan kaum perempuan. Semasa Orde Baru berkuasa, organisasi ini sama sekali berubah. Sejak itu anggota organisasi adalah istri orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Perempuan pegawai yang suaminya tidak

²⁰⁵ *Ibid.*

bekerta di kantor ini tidak lagi berhak menjadi anggota organisasi. Kegiatan yang dilakukan pun tidak lagi berhubungan dengan kepentingan anggota, melainkan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan jabatan suami.²⁰⁶

Semua itu memperlihatkan bahwa usaha gerakan perempuan mempertahankan kaumnya, buruh, dan masyarakat tertindas, menjadi dibatasi. Akibatnya gerakan perempuan bekerja sama dengan lembaga masyarakat, pemuda, dan mahasiswa, mengkritisi pembangunan Orde Baru beberapa tahun pasca pemerintahan, untuk melihat kerugian-kerugian yang dialami masyarakat, khususnya kaum perempuan masa itu. Adapun faktor-faktor gerakan perempuan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah digambarkan pada bagan 4.1.

Bagan 4.1: Faktor-faktor gerakan perempuan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah



²⁰⁶ Saskia Weiringa, *Kuntulanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra, 1998, hlm 40

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan gerakan perempuan masuk organisasi non-pemerintah dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat:

- 1) Istri pejabat harus menjadi anggota organisasi yang menjunjung Panca Dharma Wanita.
- 2) Keanggotaan menjadi wajib dan iuran dipotong otomatis dari gaji suami.
- 3) Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI
- 4) Jika suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja
- 5) Organisasi perempuan yang dikontrol melalui pemerintahan, tidak menjalankan program organisasi tetapi wajib melaksanakan program pemerintah bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- 6) Pendidikan keorganisasian perempuan desa menjadi program domestik dengan arah pembangunan nasional
- 7) Persoalan-persoalan perempuan tertindas diantaranya semakin banyaknya industri hiburan yang menjual perempuan, film pelecehan seksual, dan penganiayaan istri, tidak terlalu diperhitungkan yang diperhitungkan dalam pemerintah Orde Baru.

E. Munculnya Organisasi Perempuan Non-Pemerintah (Independen)

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Pendukung Gerakan Perempuan Non- Pemerintah (Independen)

Organisasi perempuan sempat dipertentangkan antara organisasi perempuan (di bawah kontrol) pemerintah dan organisasi perempuan non-

pemerintah.²⁰⁷ Semangat revolusioner gerakan perempuan sempat mundur selama masa Orde Baru, tetapi ternyata bibit semangat revolusioner para pejuang perempuan pendahulu mulai tampak tumbuh subur pada tahun 1980-an. Pada masa ini, banyak kaum muda mulai kritis, seperti kalangan mahasiswa. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapinya. Mereka membuat analisis sejarah secara kritis.²⁰⁸

Gerakan perubahan sosial muncul di kalangan generasi muda bersama dengan sekelompok kecil generasi tua yang bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lembaga ini merupakan tempat berkumpulnya kekuatan yang tidak dapat bertahan dalam situasi *status quo*. Artinya, sejarah LSM dapat ditelusuri dari kekecewaan beberapa aktivis 1966 yang sangat berharap Orde Baru melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang, terutama ekonomi. Harapan tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan. Sebagai organisasi yang didirikan oleh warga sipil, LSM segera menyatakan diri independen dari negara dan bekerja memperkuat posisi masyarakat sipil.²⁰⁹

Pada awalnya, kelemahan masyarakat sipil dipahami sebagai kemiskinan yang menimpa mayoritas rakyat. Karena itu pekerja-pekerja LSM menggunakan pendekatan kebutuhan pokok untuk memperkuat posisi mereka yang lemah. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan

²⁰⁷ A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Op.cit*; hlm 46

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 22

²⁰⁹ Makalah MM Bilah yang dimuat dalam Sabastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Jakarta, Puspaswara, 1993.

sentralisme negara dalam sistem pembangunannya yang tidak menyertakan kepentingan rakyat.²¹⁰

Walaupun lembaga ini geraknya dibatasi dan dicurigai oleh pemerintah Orde Baru, tetapi kegiatan pemberdayaan rakyat berjalan terus. Aktivis LSM yang terpanggil untuk mengadakan perubahan sosial politik di Indonesia terus melakukan gerakan-gerakan pro-demokrasi melalui pemberdayaan rakyat. Berbagai gerakan pro-demokrasi muncul, termasuk gerakan feminis yang mempunyai kepedulian khusus terhadap permasalahan perempuan. Pada dasarnya gerakan feminis di Indonesia adalah gerakan demokrasi. Para aktivis perempuan yang membangun LSM berpandangan bahwa, suatu kelompok yang berkembang dalam kehidupan manusia banyak pilihan, tidak hanya dua pilihan saja, tetapi juga mengakui dan dapat menghargai adanya kemajemukan (pluralisme), keanekaragaman, baik umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun perbedaan sosial ekonomi lainnya, bersedia dan berani menghadapi konflik, karena konflik merupakan konsekuensi dari relasi antarmanusia dalam kemajemukan, mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik, melawan penindasan, penjajahan, kekerasan, dan ketidakadilan dengan menggunakan aksi *aktif tanpa kekerasan* (ATK).²¹¹

Pada perkembangannya LSM perempuan dari kalangan mahasiswa merekrut para mahasiswi tetapi terbantas ruang lingkungannya. Organisasi

²¹⁰ Mengacu pada tulisan Philipe J. Eldrige, *Non Government Organization And Democratic Participation In Indonesia*, dalam jurnal *Prisma Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*, oleh Ruth Indiah Rahayu, hlm 40

²¹¹ *Ibid*, hlm 48

perempuan LSM lebih merupakan organisasi staf yang mempunyai kelompok binaan (kategori masyarakat tertentu). Sedangkan organisasi yang tidak mempunyai kelompok binaan akan berhubungan kelompok melalui jaringan LSM yang memiliki kegiatan tersebut.²¹²

Para aktivis perempuan sempat kecewa karena organisasi massa perempuan saat itu kurang menanggapi kegiatan independen, karena semua ada dalam kontrol pemerintah. Kekecewaan ini menimbulkan semangat baru untuk mendirikan LSM yang mendampingi gerakan rakyat di kalangan bawah. Pilihan mereka belum pada organisasi massa karena Undang-Undang Keormasan masih mengikat kebebasan kegiatan pemberdayaan rakyat.²¹³

2. Beberapa LSM Perempuan yang Berdiri di Akhir Rezim Orde Baru

Beberapa organisasi perempuan LSM ada yang membangun kerjasama dengan organisasi LSM lain atau kelompok-kelompok yang memperjuangkan lingkungan hidup, hak asasi manusia, buruh, kaum tani, kebebasan berekspresi, prodemokrasi, dan masyarakat adat dengan melihat moral dan kehidupan bangsa.²¹⁴

Pada perkembangannya muncullah berbagai organisasi perempuan non-pemerintah (independen) seperti *Suara Ibu Peduli* yang memperjuangkan politik agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, ekspresi dan kebebasan berpendapat; *Kalyanamitra* yang giat membuat

²¹² Jurnal *Prisma Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*, oleh Ruth Indiah Rahayu, hlm 39

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Jurnal *Prisma, Op.cit*; hlm 39

gerakan advokasi dan penanganan korban pemerkosaan; *Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar* (KPS) yang membuat gerakan feminis kristiani melalui pendidikan teologi perempuan, sebagai sarana advokasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dalam gereja; *Perserikatan Solidaritas Perempuan* yang memfokuskan gerakannya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap buruh migran perempuan serta gerakan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat tingkat bawah.

Selain itu ada pula *Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia* (GAKTPI) sebuah forum yang memfokuskan gerakannya pada advokasi perempuan dan sosialisasi penyadaran akan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, *Rifka Anissa* yang memfokuskan gerakannya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (KDRT), khususnya kekerasan terhadap istri (KTI), *Yayasan Anisa Swasti* (Yasanti) yang memfokuskan gerakannya pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap buruh perempuan, *Inaswati* yang giat dalam advokasi dan penanganan kekerasan terhadap anak-anak perempuan jalanan, *Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan* (APIK) yang kegiatannya berfokus pada advokasi dan bantuan hukum untuk korban kekerasan terhadap perempuan oleh negara, dan masih banyak lagi organisasi perempuan non-pemerintah seperti *Flower Aceh* dari Aceh, *Yayasan OWA* dari Palembang, *Yayasan Santo*

Antonius dari Merauke, yang peduli terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di Indonesia.²¹⁵

Pada tahun 1975, pendirian LSM perempuan di Indonesia juga didukung oleh agenda *penyadaran gender* yang disepakati secara internasional. Konferensi perempuan sedunia di Meksiko menetapkan tahun itu sebagai Tahun Perempuan Internasional. Pada tahun tersebut, pembangunan berwawasan gender (*Gender and Development*) ditetapkan sebagai agenda kegiatan perempuan dari Negara anggota PBB. Masuknya gender dalam agenda pembangunan ini mendorong perkembangan feminisme. Organisasi non-pemerintah perempuan (*ornop* perempuan) di Indonesia, yang sudah mendapat dukungan dan bekerjasama dengan organisasi perempuan internasional, mulai mensosialisasikan Ideologi Gender serta dampak-dampaknya. Memang faktor agama dan budaya menjadi hambatan utama bagi para anggota. Untuk mengatasi permasalahan ini, melalui sebuah sarasehan para aktivis perempuan kristiani bersepakat mengembangkan pendidikan nonformal teologi perempuan. Gagasan ini disambut positif para aktivis perempuan Islam. Mereka juga mengembangkan teologi perempuan Islam.²¹⁶

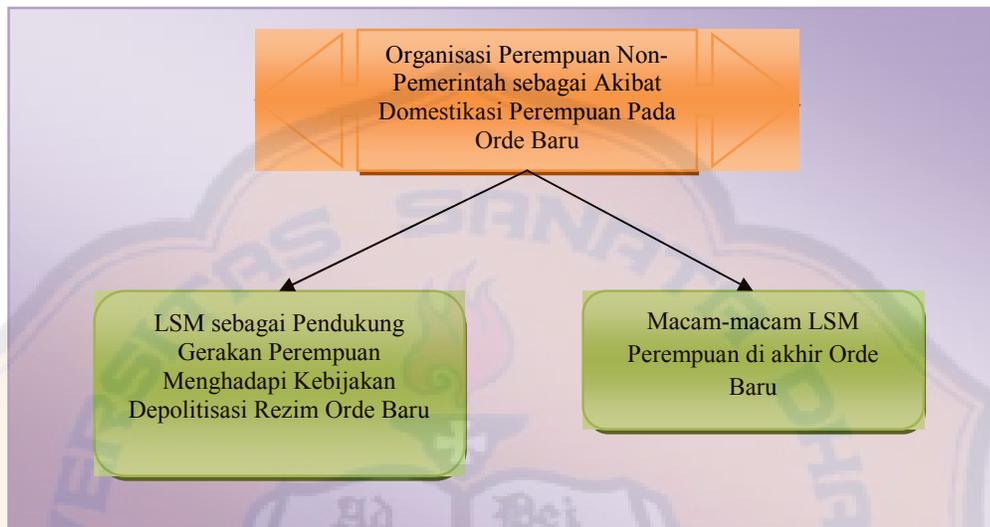
Sejak tahun 1980-an di Indonesia mulai muncul *ornop* perempuan yang peduli terhadap permasalahan perempuan akibat dari ketidakadilan gender. Mereka menganalisis permasalahan tidak hanya dari prespektif

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*, hlm 49

sosiologis, ekonomis, dan politis, tetapi juga dari prespektif budaya dan agama.

Bagan 4.2: Organisasi Perempuan Non-Pemerintah sebagai Akibat Domestikasi Perempuan Pada Orde Baru



Berdasarkan bagan 4.2, ornop perempuan lahir sebagai akibat kebijakan rezim Orde Baru, sehingga domestikasi perempuan secara total tanpa menyentuh persoalan publik menjadi hambatan besar bagi pergerakan perempuan Indonesia. Persoalan besar yaitu kelompok perempuan yang membela permasalahan perempuan seperti penindasan, kekerasan seksual, dan KDRT tidak lagi ditanggapi serius oleh pemerintah.

Untuk itu, ada ornop seperti LSM Perempuan yang setidaknya mendukung kaum perempuan yang tertindas, sehingga inilah cara satu-satunya kelompok-kelompok perempuan mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan dukungan ini, gerakan perempuan masih dapat meraih cita-cita lamanya yaitu kesejahteraan kaumnya dan kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.

Pada akhirnya dibentuk berbagai LSM yang mendukung tercapainya suatu keadilan, tidak hanya bagi kaum perempuan Indonesia secara khusus, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena dengan analisis LSM, masyarakat dapat menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan Orde Baru hanyalah bagian dari sistem penguasa, bukan demi kesejahteraan rakyat yang diimpikan bangsa.

F. Program yang Ditawarkan LSM dan Organisasi Perempuan Non-Pemerintah (Independen)

Kegiatan yang dilakukan organisasi perempuan LSM dalam menyadarkan adanya ketimpangan gender, kini sebaiknya diarahkan untuk menggerakkan atau menumbuhkan kelompok, misalnya, pengajian, kesenian dan sebagainya. Bekerjasama dengan organisasi otonom dan induk. Hubungan dengan massa lebih kepada hubungan organisasi yang dapat bekerjasama menentukan berbagai kegiatan membangun.

LSM Perempuan dapat menyusun program dan melakukan berbagai kegiatan dari mengurus persoalan perempuan sehari-hari sampai menciptakan simbol-simbol baru tentang peran perempuan dalam kebangkitan. Di samping bentuk organisasi massa semacam itu, diperlukan organisasi yang mengurus *lobby* dan organisasi yang meriset situasi serta menerbitkan publikasi sesuai dengan kepentingan massa.²¹⁷

²¹⁷ Ruth Indah Rahayu, *Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*, dalam Prisma, Jakarta, LP3ES, No.5 Tahun XXV Mei 1996, hlm 42

Tawaran-tawaran tersebut jelas membawa implikasi pada perubahan cara perempuan berorganisasi. Dari struktur organisasinya, perlu dilakukan perubahan untuk membuka keanggotaan umum, dan hal ini membutuhkan keseriusan dan ketekunan dari kelompok-kelompok perempuan.²¹⁸

Program awal yang ditawarkan ialah jalur politik yang dilakukan melalui partai-partai politik. Dalam hal ini perempuan harus bersedia mempromosikan diri dengan menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang sosial kemasyarakatan yang dipandang strategis, yang dapat dikenal publik. Tantangan di jalur ini ini ialah kekerasan fisik ataupun mental yang menjurus pada adu kekuatan dalam arti fisik. Kelompok perempuan sesungguhnya berusaha mencitrakan diri sebagai kader yang cinta damai, santun dan cerdas.²¹⁹

Gambar 4.2 : Jalur politik sebagai pengembangan peran perempuan untuk menyalurkan aspirasi perempuan yang tertindas kepada pemerintah



Sumber: Ruth Indiah Rahayu

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ artikel Misma Kasim, *Realitas dan Agenda Gerakan Perempuan dalam Gerakan Prodemokrasi*

Program kedua ialah dengan masuk ke jalur pendidikan. Sektor pendidikan merupakan bidang yang mudah dimasuki oleh perempuan karena pendidikan tidak langsung bersentuhan dengan kekuasaan. Melalui jalur pendidikan, perempuan mendapatkan ilmu pengetahuan serta mendapatkan kesempatan untuk berkarir di bidang akademis dengan menjadi guru dan dosen. Mereka dapat dengan lebih leluasa memilih bidang-bidang pekerjaan yang lebih layak dari pada sebagai buruh migran, buruh perusahaan yang murah.²²⁰

Gambar 4.3: Pengembangan program LSM lewat jalur pendidikan (pendidikan bagi anak perempuan dan anak miskin)



Sumber : Ruth Indiah Rahayu

Program ketiga ialah program LSM Perempuan yang bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. LSM lebih dinamis dan energik. LSM mudah mendapatkan informasi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Anggota perempuan yang masuk dalam LSM harus selektif dalam

²²⁰ *Ibid.*

mengangkat isu yaitu hanya mengangkat isu yang berpihak pada masyarakat di sekitar lingkungannya sendiri. Pentingnya membatasi pada lingkungan sendiri dimaksudkan untuk meminimalisir penolakan masyarakat terhadap aktivis perempuan yang dianggap kurang memerhatikan peran-peran domestiknya. Target utama LSM ialah munculnya persepsi positif masyarakat bahwa perempuan juga mampu menjadi agen utama pembangunan bagi lingkungannya. Bukan sekedar menjalani rutinitas kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, tetapi juga menawarkan perubahan-perubahan menjadi lebih baik.²²¹

Gambar 4.4: Kegiatan LSM Perempuan dalam menanggulangi bencana alam



Sumber : Indiah Rahayu

²²¹ artikel Misma Kasim, *Realitas dan Agenda Gerakan Perempuan dalam Gerakan Prodemokrasi*

Bagan 4.3: Program yang ditawarkan kepada LSM Perempuan



Bagan 4.3 menunjukkan tentang program-program yang dianggap baik dan aman untuk mengembangkan peran perempuan. Dengan berbagai jalur tersebut, kelompok-kelompok perempuan yang awalnya terbentuk dari sebuah gerakan tidak kehilangan semangat juang terdahulu. Hal yang penting ialah bagaimana jalur tersebut dapat berguna bagi kaum perempuan dan masyarakat, khususnya dalam menghapus berbagai bentuk penindasan.

Jadi baik jalur partai politik, pendidikan, maupun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan menjadi jalan terbaik menuju pergerakan perempuan Indonesia yang sukses dan mandiri. Demikianlah cita-cita perempuan tidak lagi terhalangi oleh kebijakan politik penguasa, tetapi menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mengangkat derajat manusia secara umum.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab II sampai bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pergerakan perempuan Indonesia pra-Orde Baru menjadi tonggak sejarah organisasi yang revolusioner dan penuh semangat juang. Hal ini dilakukan karena penindasan yang dialami perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional, seperti pembatasan ruang publik bagi anak perempuan dalam keluarga, sehingga harus dipingit sesuai tradisi dan tidak mendapat kesempatan dalam pendidikan. Beberapa pelopor pergerakan perempuan Indonesia dan berbagai organisasi menjadi bukti besar bagaimana pergerakan perempuan Indonesia pernah diakui sebagai pembaharu kemajuan bangsa.

Gerakan perempuan Indonesia membuktikan eksistensinya lewat Kongres Perempuan Indonesia pertama untuk menentukan perkembangan organisasi-organisasi perempuan dalam menentukan visi dan misi memberantas segala bentuk penindasan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan kaum perempuan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, hasil yang dicapai dapat membawa perubahan bagi kemajuan perempuan Indonesia untuk terus berkarya bagi perjuangan kemajuan bangsa yang berbeda dari masa ke masa.

2. Pergerakan perempuan Indonesia mencapai ambang kritis pada awal Orde Baru, karena diawali dengan peristiwa mencekam Gerakan 30 September. Pembangunan perekonomian nasional yang dilaksanakan, nyatanya belum

mensejahterakan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan dari semua golongan, terkecuali istri pegawai. Hal inilah menjadi salah satu hambatan kaum perempuan pada saat itu dan pergerakannya, karena visi dan misi organisasi yang telah terbentuk sebelumnya berjalan masing-masing tanpa dukungan pemerintah pada era ini.

Dengan pembatasan ruang gerak perempuan dalam ruang publik, maka ada ketentuan pula yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, demi kelancaran pembangunan. Untuk itu, dikeluarkan beberapa aturan yang tertuang dalam Panca Dharma Wanita, yang wajib dilaksanakan seluruh perempuan, ibu, sekaligus istri-istri seluruh Indonesia. Aturan ini sebenarnya untuk menormalisasikan organisasi perempuan yang pada awalnya banyak diremehkan masyarakat, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal, karena banyak perempuan digunakan sebagai pekerja murah di perusahaan-perusahaan, dan banyak penindasan baik dalam lingkup keluarga maupun sosial. Persoalan ini tidak dibahas dalam visi Panca Dharma Wanita, sehingga tidak ada hukum yang kuat untuk membela perempuan kelas menengah ke bawah.

Akhirnya, sistem Panca Dharma Wanita hanya dijalankan oleh sebagian perempuan Indonesia, itu pun hanya dirasakan oleh isteri pegawai. Dari semua itu, ada ketidaksempurnaan sistem pembangunan Orde Baru, khususnya tentang Panca Dharma Wanita, karena menekan sebagian kaum perempuan kelas menengah ke bawah dan kaum buruh. Pada akhirnya akan menimbulkan berbagai pro dan kontra terhadap sistem ini, dan pertentangan itu sendiri melahirkan reaksi dari

berbagai organisasi perempuan yang ada sebelum Orde Baru untuk tetap mempertahankan visinya membangun peran perempuan yang sempat dibatasi.

3. Oleh karena itu, ada berbagai reaksi yang ditunjukkan gerakan perempuan sebagai upaya untuk menghapus segala depolitisasi dan domestifikasi demi mempertahankan perannya agar cita-cita pergerakan perempuan Indonesia. Berbagai reaksi tersebut berupa kerjasama dengan berbagai pihak yang juga merasakan ketidakadilan dari sistem pembangunan nasional pada era Orde Baru, seperti kalangan aktivis mahasiswa, aktivis hak asasi perempuan dan pemerhati masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka menggalang kesatuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian, serta menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia.

Kerjasama gerakan perempuan dengan berbagai organisasi masyarakat ialah agar masyarakat tidak cenderung memandang sebelah mata kemampuan perempuan, sehingga dalam hal lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baik perempuan maupun laki-laki dapat bekerjasama membangun kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tanpa melihat persaingan demi kepentingan kekuasaan.

REKOMENDASI

Mata pelajaran sejarah Indonesia dapat ditambahkan dengan materi sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Dengan tujuan untuk memberi penghargaan bagi pelopor perjuangan perempuan Indonesia, memberi pengalaman serta nilai-nilai tentang pendidikan Indonesia yang diperjuangkan oleh kaum perempuan, serta memberi pengetahuan tentang martabat perempuan sebagai suatu kemampuan dan segala sesuatu yang harus dijaga, sehingga semua siswa dapat saling menghargai, baik dalam perkataan maupun perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah itu, guru dapat bekerjasama dengan pihak sekolah atau instansi dinas terkait untuk mengadakan lomba membuat video serta karya ilmiah tentang sejarah gerakan perempuan Indonesia. Tidak hanya dikalangan mahasiswa, siswa sekolah menengah pun dapat melakukan penelitian. Adanya sosialisasi tentang penelitian studi kasus yang diberikan kepada siswa sekolah menengah menjadi kreativitas yang baik dalam memajukan pendidikan dan sejarah nasional Indonesia.

Seluruh pemuda dan pemudi Indonesia dapat diajarkan cara bersosialisasi dengan gerakan buruh, gerakan perempuan dan berbagai gerakan lainnya, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih vokal menyatakan aspirasi dan pendapatnya

Perempuan bisa menjadi pemimpin dengan perjuangan moralnya. Seperti yang diperlihatkan oleh Megawati sebagai pemimpin Indonesia yang pertama. Megawati menentang segala bentuk diskriminasi, lewat perjuangan moral dan

hukum. Jadi inilah yang diharapkan bergerak dengan aktif dan melakukan gerakan pembaharuan, demi kesejahteraan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A.K Pringgodigdo. (1970). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- A.Kardiyat Wiharyanto. (2011). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Anders Uhlin. (1995). *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson- Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actor*.
- A.Nunuk Prasetyo. (1998). *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ariel Heryanto. (1996) “*Indonesian Middle-Class Oppositional in the 1990s*”. G. Rodan (ed) *Political Opposition in Industrialising Asia*.
- Bourchier, David. (2007). *Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Cosmas Batubara. (1986). *Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil dan Tantangannya*: Jakarta: Yayasan Prahita.
- Depdikbud dokumen sejarah nasional Jakarta. (1991). *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Depdikbud
- Eldrige, Philipe J. *Non Government Organization And Democratic Participation In Indonesia*.
- Helius Syamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Hersri Setiawan, _____. *Dunia yang Belum Sudah*. USA: Kockkengen.

- Hikmah Diniah. (2007). *Gerwani Bukan PKI; Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: CaravastiBooks.
- HS Idrus. (1980). *Wanita Dulu Sekarang dan Esok*. Medan: Waspada.
- Irwan Abdullah. (2001). *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Jaquette, Jane S.. (2003). *Gerakan Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Kartini. (1987). *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khofifah Indar Parawanda. (2002). "Institutional Building; An Effort to Improve Indonesian Women's Role and Status,"... *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, Kathryn Robinson dan Sharin Bessell (Ed.). Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kowani. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- L. Mardiwarsito. (1986). *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*. Cet. III. Ende: Nusa Indah
- Lawson, Stephanie. (1991). *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change, Canberra: Department of Political and Social Change*. Australia: The Australian National University.
- Nana Nurliana. (2000). *Gerakan Perempuan di Amerika*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Nani Soewondo-Soerasno, (1955) *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Djakarta: Timun Mas.

Norman Sulivan. (1911). *“Gender dan politik di Indonesia” / Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, Maila Stivens (Ed.), 64. Australia: Centre of Southeast Asian Studies Monash University Aristoc Press.

Perikatan Perkoempulan Isteri Indonesia. (1932). *“Nomor Kongres PPII 1932, Isteri, Maret-April, No, 11-12.”*

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita. (1990). *Dinamika Wanita Indonesia: Seri 01; Multidimensional*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.

Razzeto, Luis, dkk. (1983). *Last organizacoines economicas populares*. Santiago: Academic de Humanismo Cristiano.

Rambe. (1983). *Sijantin Kartowijono: Mencari Makna Hidupku*. Jakarta: Sinar Harapan.

Ruth Indiah Rahayu. (1960). *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan & Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Saskia Wieringa. (1988). *Kuntilanak Wangi: Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra.

_____. (2010). *Penghancuran gerakan perempuan; Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, Yogyakarta: Galang Press

Scholten, Locher. *Women an the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.

Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2005). *“Wacana Perempuan dalam Muhammadiyah”*. Jakarta: Media Inovasi.

- Slametmuljana. (1964). *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sukanti Suryochondro. (1957). *Peraturan tentang Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sukanti Suryochondro. (1984). *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sulami, dkk. *Kebenaran Tentang Gerwani; Aspek Gender Rezim*
- Susan Blacburn, (2007). *Kongres Perempuan Pertama; Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- State. (2000). *Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Syamsuddin Haris. (1998) *Menggugat Poltiik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Stephanie Lawson. (1991). *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change, Canberra: Department of Political and SocialChange*. Australia: The Australian National University.
- Stuers, Cora. (1960). *The Indonesian Women: Struggles And Achievement*. Mouton & Co, s'Gravenhage.
- Taufik Abdulah, dkk. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Prespektif*. Jakarta: Gramedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi I. Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud
- Vrouwengroep Komite Indonesie. *Indonesische Vrouwen in Beweging 1949-1965*, Amsterdam: Vrouwengroep Komite Indonesie.

Wilmort. (1957) *The Role of Women in Indonesia*. Cornell University.

Sumber Jurnal dan Majalah:

Basis, Gerakan Sosial Baru, No.01-02, tahun ke-55, (Edisi Januari-Februari 2006).

Harian Rakyat. (Edisi 17 September 1958).

_____. (Edisi 30 Januari 1960).

_____. (Edisi 15 dan 29 Januari, 30 September 1965).

Irwan Abdullah. *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*. Prisma. (Edisi 6 Juni 1995).

Jurnal Perempuan. (Edisi 7 Mei- Juli 1998).

Katolik Parahayangan IISN 0852-0089. (Edisi April 1997).

Kurniawati Hastuti Dewi, *Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*. (Artikel)

Majalah fakultas filsafat, Majalah Filsafat dan Teologi, Bandung, Universitas

Mansour Fakih. *Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia...* dalam Majalah Unisa "Demokrasi & Formasi Sosial", No.34/XIX/II/ (Edisi 1997).

Meutia Hatta Swasono, *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Jurnal Setneg. (Edisi Senin 6 Februari 2012)

Misma Kasim, *Realitas dan Agenda Gerakan Perempuan dalam Gerakan Prodemokrasi*

Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Prespektif untuk Studi Gender ke Depan, oleh A.A.I.N Marhaeni, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Ruth Indiah Rahayu, *Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*, dalam Prisma, Jakarta, LP3ES, No.5 Tahun XXV. (Edisi Mei 1996).

Sumber Makalah dan Disertasi:

Makalah MM Billah, dimuat dalam Sebastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Puspaswara, Jakarta, 1993.

Saskia E Weirenga. (1995). *The Politization Gender Relation in Indonesia: The Indonesian Women's Movement and Gerwani untul The New Order State*, Den Haag: disertasi ISS.

Sumber Internet:

“Semangat pergerakan perempuan Indonesia”
[http://: artikel.kolomkitajournalism.org](http://artikel.kolomkitajournalism.org) edisi 28 Oktober 2011

“Sejarah perjuang Perempuan Indonesia”
[http://: SETNEG.GO.ID](http://SETNEG.GO.ID), dalam artikel Sekretariat Negara Republik Indonesia, diunduh 31 Oktober 2011

“Perempuan Indonesia dalam Rezim”
<http://id.wikipedia.org/wiki/Rezim>, diunduh 8 Maret 2012, hlm 1

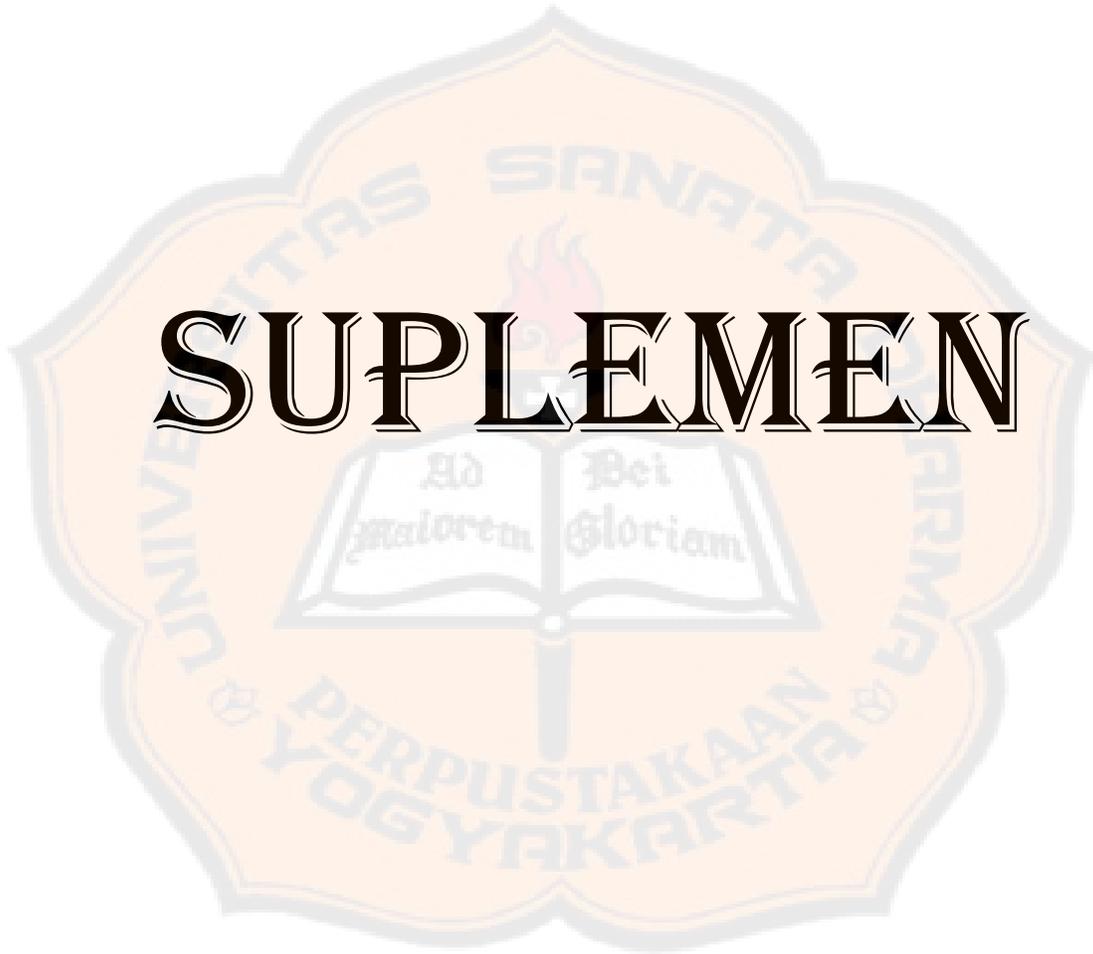
“Pergerakan Perempuan Indonesia”
[http://: penilaian-terhadap-pergerakan-perempuan.com](http://penilaian-terhadap-pergerakan-perempuan.com) diakses tanggal 17 April 2012

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMPERA	: Amanat Penderitaan Rakyat
APIK	: Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
ATK	: Aktif Tanpa Kekerasan
AS	: Amerika Serikat
DI-TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
GAD	: Gender of Development (Gender dalam Pembangunan)
GAKTPI	: Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
GWS	: Gerakan Wanita Sosialis
HASPARI	: Himpunan Serikat Perempuan Indonesia
GERWANI	: Gerakan Wanita Indonesia
GERWIS	: Gerakan Wanita Isteri Sedar
GOLKAR	: Golongan Karya
GOW	: Gerakan Organisasi Wanita
IIKP	: Ikatan Istri Kementerian Penerangan
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IWKA	: Ikatan Wanita Kereta Api
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPI	: Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KOWANI	: Kongres Wanita Indonesia
KPI	: Kongres Perempuan Indonesia
KPS	: Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
LUBER	: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPSM	: Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat
NKKBKS	: Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Keluarga Sejahtera
NU	: Nahdatul Ulama
OPP	: Organisasi Peserta Pemilu

ORNOP	: Organisasi Non-Pemerintah
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
P4A	: Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
PARKINDO	: Partai Kristen Indonesia
PARMUSI	: Parta Muslim Indonesia
PBB	: Persekutuan Bangsa-Bangsa
PERPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
POLRI	: Polisi Republik Republik Indonesia
PBH	: Pemberantasan Buta Huruf
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PERSIT	: Persatuan Isteri Tentara
PERWARI	: Persatuan Wanita Republik Indonesia
PIKAT	: Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKK	: Pembina Kesejahteraan Keluarga
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPI	: Persatuan Perempuan Indonesia
PPII	: Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPPI	: Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia
PRRI-Permesta	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta
PSI	: Perempuan Serikat Rakyat
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
RMS	: Republik Maluku Selatan
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret
TK	: Taman Kanak-Kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRITURA	: Tri Tuntutan Rakyat
UUD	: Undang-Undang Dasar
YASANTI	: Yayasan Anisa Swasti

SUPLEMEN



SILABUS

Nama Sekolah : SMA
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas / Semester : XII / 1 (Satu)
 Tahun Pelajaran : 2011 / 2012
 Standar Kompetensi : Menganalisis Munculnya Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari awal Kebangkitan Nasional hingga Orde Baru

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator	Penilaian			Alokasi waktu	Sumber / Alat / Bahan Belajar
				Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
Menganalisis perkembangan gerakan perempuan indonesia dari awal pergerakan nasional hingga orde baru	Perkembangan gerakan perempuan indonesia dari awal pergerakan nasional hingga orde baru • Latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia	Dengan mengkaji buku, melakukan diskusi, presentasi, dan tanya jawab diharapkan siswa dapat : • Mendeskripsikan latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia	1. Kognitif : a. Produk • Mendeskripsikan latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia b. Proses • Menganalisis faktor-faktor munculnya gerakan perempuan Indonesia • Mengidentifikasi usaha dan peran gerakan perempuan	• Test	• Pilihan Ganda	• Berikut ialah alasan pelopor pergerakan nasional mendirikan organisasi-organisasi perempuan, kecuali... a. Menghapus segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan	2 x 45 Menit	Sumber : ➤ I Wayan Badrika. 2006. <i>Sejarah SMA kelas 3</i> . Jakarta: Erlangga. ➤ Magdalia Alifian dkk. 2007. <i>Sejarah untuk SMA dan MA kelas XII/IPS</i> . Jakarta: Esis Alat : LCD, OHP, Kartu Soal, Gambar, dan Papan tulis. Bahan :

	<ul style="list-style-type: none"> • Peran gerakan perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial • Munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru • Dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memaparkan Gerakan Perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial • Mengidentifikasi munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru • Menganalisis dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia. 	<p>dalam perjuangan kelompok dan masyarakat</p> <p>2. Afektif :</p> <p>a. Karakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghayati nilai dan makna yang dapat diambil dari kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru <p>b. Keterampilan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai hak-hak perempuan Indonesia untuk bebas serta mendukung aspirasi para aktivis sosial dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik, sosial, struktur budaya, dan ekonomi. <p>3. Psikomotorik : Menunjukkan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non test 	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian 	<p>Indonesia.</p> <p>b. Mendukung kepentingan pemerintah untuk mengembangkan negara.</p> <p>c. Membangkitkan semangat revolusioner melawan imperialisme dan kolonialisme</p> <p>d. Menghapus segala bentuk tradisi yang dibentuk secara struktural dan tidak mendukung perkembangan perempuan Indonesia</p> <p>e. Mengajarkan keterampilan berorganisasi dan memperluas pendidikan bagi anak-anak Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan dan jelaskan faktor- 		<p>Power point, Kertas transparansi, Kertas, Gunting, Spidol, dan Kapur tulis.</p>
--	---	--	---	--	--	---	--	--

		<p>gambar,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bukti-bukti perjuangan pergerakan perempuan Indonesia dari masa pergerakan nasional hingga akhir Orde Baru ▶ bukti depolitisasi pemerintah Orde Baru dalam membentuk peran perempuan Indonesia. 		<ul style="list-style-type: none"> • Portofolio • Penugasan 	<p>faktor yang menyebabkan rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan peran perempuan dalam domestifikasi!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buatlah peta konsep perkembangan pergerakan perempuan Indonesia! • Jelaskan nilai-nilai (minimal 3) yang dapat kamu ambil dari dampak kebijakan Orde Baru terhadap perkembangan gerakan perempuan Indonesia! 	
--	--	---	--	---	--	--

Yogyakarta,.....2012
Guru Bidang Studi

Brigida Intan Printina

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**RPP**

Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI / II
Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
Materi Pokok : Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari awal kebangkitan Nasional Hingga Orde Baru
Pertemuan Ke : 1
Waktu : 2 x 45 Menit

I. Standar Kompetensi

Menganalisis Munculnya Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari awal kebangkitan Nasional Hingga Orde Baru

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan gerakan perempuan Indonesia dari awal pergerakan nasional hingga orde baru

III. Indikator**1. Kognitif :****a. Produk**

- Mendeskripsikan latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia

b. Proses

- Menganalisis faktor-faktor munculnya gerakan perempuan Indonesia
- Mengidentifikasi usaha dan peran gerakan perempuan dalam perjuangan kelompok dan masyarakat

2. Afektif :**a. Karakter**

- Menghayati nilai dan makna yang dapat diambil dari kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru.

b. Keterampilan Sosial

- Menghargai hak-hak perempuan Indonesia untuk bebas serta mendukung aspirasi para aktivis sosial dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik, sosial, struktur budaya, dan ekonomi.

3. Psikomotorik :

- Menunjukkan dengan gambar:
 - a) Bukti-bukti perjuangan pergerakan perempuan Indonesia dari masa pergerakan nasional hingga akhir Orde Baru
 - b) Bukti-bukti depolitisasi pemerintah Orde Baru dalam membentuk peran perempuan Indonesia.

IV. Tujuan Pembelajaran**1. Kognitif :****a. Produk**

- Siswa dapat mendeskripsikan latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia

b. Proses

- Siswa dapat menganalisis faktor-faktor munculnya gerakan perempuan Indonesia
- Siswa dapat mengidentifikasi usaha dan peran gerakan perempuan dalam perjuangan kelompok dan masyarakat

2. Afektif :**a. Karakter**

- Siswa mampu menghayati nilai dan makna yang dapat diambil dari kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru.

b. Keterampilan Sosial

- Siswa mampu menghargai hak-hak perempuan Indonesia untuk bebas serta mendukung aspirasi para aktivis sosial dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik, sosial, struktur budaya, dan ekonomi.

3. Psikomotorik :

- Siswa mampu menunjukkan dengan gambar:
 - a) Bukti-bukti perjuangan pergerakan perempuan Indonesia dari masa pergerakan nasional hingga akhir Orde Baru

- b) Bukti-bukti depolitisasi pemerintah Orde Baru dalam membentuk peran perempuan Indonesia.

V. Materi Pembelajaran

“Perkembangan Gerakan Perempuan Indonesia dari Awal Pergerakan Nasional Hingga Orde Baru”

1. Latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia.
2. Peran gerakan perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial.
3. Munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru.
4. Dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia.

VI. Model dan Metode Pembelajaran

- **Model :**
Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/ CTL) dengan tipe *jigsaw*.
- **Metode :**
Diskusi, Presentasi, dan Tanya jawab.

VII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Tatap Muka

Kegiatan	Alokasi waktu
<p>1. Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Apersepsi: Guru memberi salam kepada seluruh siswa, mengajak berdoa bersama, mengecek daftar hadir dan menanyakan kesiapan belajar siswa. b) Motivasi : Guru mendorong minat siswa dengan memutar video singkat tentang perkembangan pergerakan perempuan Indonesia dari awal Pergerakan Nasional hingga akhir Orde Baru. Judul Video: “Perjalanan perjuangan perempuan Indonesia dari Pergerakan Nasional hingga Orde Baru ” c) Orientasi: Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar tentang perkembangan gerakan 	20 Menit

<p>perempuan indonesia dari awal pergerakan nasional hingga Orde Baru.</p>	
<p>1. Kegiatan Inti (45 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksplorasi a. Guru menjelaskan gambaran secara umum kepada siswa mengenai tantangan gerakan perempuan dalam dunia politik dan sosial-budaya atas perjuangan melawan penindasan terhadap masyarakat sosial, marginalisasi, dan subordinasi gerakan perempuan Indonesia. b. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa. Setiap kelompok mendapat materi soal berbeda <p>Undian soal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ <i>Kartu undian 1</i> Latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia ⇒ <i>Kartu undian 2</i> Peran gerakan perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial. ⇒ <i>Kartu Undian 3</i> Munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru. ⇒ <i>Kartu undian 4</i> Dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia. ⇒ <i>Kartu undian 5</i> Nilai dan makna yang didapat dalam mempelajari pergerakan perempuan Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ▪ Elaborasi a. Setiap anak yang mendapat nomor sama membentuk kelompok dan berdiskusi. <p>Melalui pendekatan <i>Jigsaw</i>, siswa melakukan analisis dan mendeskripsikan latar belakang lahirnya pergerakan perempuan Indonesia. Kemudian menganalisis peran gerakan perempuan Indonesia, munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia, serta nilai dan makna yang didapat dalam mempelajari pergerakan</p>	<p>45 Menit</p>

<p>perempuan Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di bawah bimbingan guru.</p> <p>b. Setiap perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil investigasi dan diskusinya di depan kelas.</p> <p>▪ Konfirmasi</p> <p>a. Siswa melakukan tanya jawab tentang materi yang dipresentasikan dengan bantuan guru.</p> <p>b. Siswa diberi kesempatan untuk menanggapi dan mencatat hal-hal yang penting dari materi yang telah dipresentasikan.</p> <p>c. Guru memberi klarifikasi pada jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar.</p>	
<p>3. Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru dan siswa menyimpulkan bersama materi yang telah dibahas yaitu tentang perkembangan gerakan perempuan Indonesia dari awal Pergerakan Nasional hingga akhir Orde Baru. • Siswa diberi kesempatan untuk mencatat kesimpulan dari diskusi. • Guru dan siswa melakukan refleksi dan menyimpulkan manfaat serta nilai-nilai yang diperoleh setelah mempelajari materi yang telah didiskusikan. • Guru memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa (tugas terstruktur dan tugas mandiri) dan rencana pembelajaran berikutnya. 	<p>25 Menit</p>

B. Tugas terstruktur

Siswa dalam kelompok kecil berdiskusi tentang gerakan perempuan Indonesia dari awal Pergerakan Nasional hingga akhir Orde Baru

C. Tugas mandiri tidak terstruktur

Siswa secara individu membuat tabel perbandingan perkembangan pergerakan perempuan Indonesia dari awal Pergerakan Nasional hingga akhir Orde Baru

VIII Sumber/Alat/Bahan**a. Sumber buku**

- I Wayan Badrika. 2006. *Sejarah SMA kelas 2*. Jakarta: Erlangga.
- Magdalia Alifian dkk. 2007. *Sejarah untuk SMA dan MA kelas XI/IPS*. Jakarta: Esis

b. Alat : LCD, papan tulis, gambar dan peta

c. Bahan: Power Point, spidol/kapur dan kertas

IX Penilaian

- a. Penilaian kognitif (*Terlampir*)
- b. Penilaian afektif (*Telampir*)
- c. Penilaian psikomotorik (*terlampir*)
- d. Tindak Lanjut
 - Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaiannya lebih dari 75%.
 - Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 75%.
 - Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 75%.

Yogyakarta,..... 2012

Guru Bidang Studi

(Brigida Intan Printina)

LAMPIRAN

Lampiran materi pelajaran

A. Latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia.

Perkembangan pergerakan perempuan Indonesia pra-Orde Baru diawali oleh pelopor-pelopor wanita Indonesia, seperti R.A Kartini dan Dewi Sartika. Adapun sebab munculnya pergerakan perempuan Indonesia pertama ialah karena penindasan yang dialami perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional, seperti pembatasan ruang publik bagi anak perempuan dalam keluarga, sehingga harus dipingit sesuai tradisi, dididik untuk menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai keterampilan domestik, dan tidak mendapat kesempatan dalam pendidikan. Untuk itu, beberapa pelopor pergerakan perempuan Indonesia mulai membentuk berbagai organisasi wanita dan berkumpul dalam satu Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928.

Kongres tersebut menentukan perkembangan organisasi-organisasi perempuan dalam menentukan visi dan misi memberantas segala bentuk penindasan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan kaum perempuan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, cita-cita itu dibuktikan lewat peran mereka dalam melakukan berbagai aksi di beberapa bidang dan secara nasional maupun lokal.

B. Peran gerakan perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial.

1. Pendidikan

Organisasi perempuan pertama yaitu Putri Mardika memperjuangkan pendidikan khusus perempuan. Manfaatnya agar perempuan tidak ragu

tampil di depan umum dan berguna bagi sesamanya kaum laki-laki dalam menjalankan kebutuhan hidup. Pada perkembangan selanjutnya di bangun tempat pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak “ Melati” oleh Gerwani dan TK Perwari oleh Perwari di Tasikmalaya, yang berfungsi sebagai tempat penitipan, tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh atau bertani.

2. Sosial

Pada Kongres II Gerwis (Gerakan Wanita Sedar), Maret 1954 di Jakarta salah satu gerakan perempuan yang bergerak di bidang sosial, yakni membuat program kerjanya, menyatu dengan kaum perempuan buruh dan tani. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No.68 tahun 1959 bahwa, yang pertama mengusahakan adanya undang-undang yang mengatur hubungan kerja yang demokratis antara buruh dan majikan di setiap lapangan kerja, dan melarang segala bentuk pemecatan sewenang-senang. Kedua memperluas koperasi-koperasi buruh di setiap lapangan kerja yang bisa meringankan kaum buruh atau pekerja perempuan dan para istri buruh atau pekerja.

3. Politik

Kemampuan gerakan perempuan Indonesia dalam berpolitik, telah dibuktikan semenjak periode kebangkitan nasional. Mereka membentuk perencanaan dan program kerja dari tingkat nasional hingga daerah-daerah lokal. Mereka juga memberi pemahaman tentang cara berorganisasi kepada kelompok-kelompok kecil perempuan, sehingga anggotanya siap

melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya, dibuktikan oleh Persatuan Perempuan Indonesia (PPI), yang merangkul gerakan-gerakan kecil menjadi satu kesatuan dalam federasi gerakan perempuan

C. Munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, peran perempuan dirumuskan dalam Panca Dharma Wanita. Rumusan ini mengadopsi nilai tradisi, agama dan budaya *petite bourguise* Eropa, membatasi tugas perempuan pada peran-peran sebagai berikut:

- 1) Wanita sebagai pendamping suami.
- 2) Wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda.
- 3) Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga.
- 4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan.
- 5) Wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.

Hal-hal di atas memperlihatkan peran perempuan (termasuk tugas primer gerakan perempuan) ialah sebagai isteri, dan sekaligus sebagai ibu. Jika mereka mau bekerja menjadi anggota gerakan atau organisasi, mereka tidak boleh melupakan tugas utama isteri sebagai pendamping suami dan ibu yang melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga

D. Dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia.

Subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki. Seperti halnya perbedaan domestik dan publik, stratifikasi dalam struktur ekonomi juga merupakan alat penegasan arah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, gerakan perempuan semakin dibatasi kegiatannya dalam wilayah publik maupun politik. Kemudian di dalam pembagian upah seringkali perempuan mendapatkan nilai yang rendah dibanding lawan jenisnya, sehingga banyak perusahaan pada Orde Baru memilih perempuan menjadi pekerjanya.

Masyarakat mempunyai pandangan bahwa perempuan dapat berada dalam wilayah publik, tetapi dengan alternatif lain agar tidak menjadi kontroversi masyarakat Orde Baru. Sama halnya dengan sistem ideologi yang membatasi kaum perempuan dengan gerakan-gerakannya, sehingga pada dapat menetapkan misinya lewat Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan (LSM Perempuan). Untuk itu, perempuan dapat tetap melaksanakan aksi sosial menyuarakan aspirasinya mewakili perempuan dan masyarakat kecil yang tertindas.

Lampiran Penilaian**a. PENILAIAN KOGNITIF**

Jenis tagihan: Tes Tertulis (Pilihan Ganda) + Uraian

I. Berilah tanda (X) pada jawaban yang tepat!

1. Berikut ialah alasan pelopor pergerakan nasional mendirikan organisasi-organisasi perempuan, kecuali...
 - a. Menghapus segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan Indonesia.
 - b. Mendukung kepentingan pemerintah untuk mengembangkan negara.
 - c. Membangkitkan semangat revolusioner melawan imperialisme dan kolonialisme
 - d. Menghapus segala bentuk tradisi yang dibentuk secara struktural dan tidak mendukung perkembangan perempuan Indonesia
 - e. Mengajarkan keterampilan berorganisasi dan memperluas pendidikan bagi anak-anak Indonesia
2. Salah satu pelopor gerakan perempuan yang bekerjasama dengan aktivis perempuan Belanda, untuk menyebarkan sekolah-sekolah perempuan dan organisasi-organisasi perempuan ialah...
 - a. R.A Kartini
 - b. Dewi Sartika
 - c. Kristina Martha T
 - d. Cut Nyak Dien
 - e. Cut Nyak Meutia
3. Kongres Perempuan Pertama dilakukan di daerah Yogyakarta pada...
 - a. 24 Desember 1928
 - b. 23 Desember 1928
 - c. 22 Desember 1928
 - d. 21 Desember 1928
 - e. 20 Desember 1928
4. Gerakan perempuan yang merangkul gerakan-gerakan kecil menjadi satu kesatuan dalam federasi gerakan perempuan ialah...
 - a. Kowani
 - b. Gerwani
 - c. Gerwis
 - d. Aisyah
 - e. PPI (Persatuan Perempuan Indonesia)
5. Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap peran domestifikasi perempuan tertuang dalam...
 - a. Tritura
 - b. Dwi Dharma Wanita

- c. Panca Karsa Wanita
 - d. Panca Dharma Wanita
 - e. Pelita Harapan Wanita
6. Salah satu gerakan perempuan yang menyumbangkan peran lewat aksi pendidikan dengan membangun Taman Kanak-Kanak adalah...
- a. Gerakan Wanita Sedar
 - b. Kowani
 - c. Gerakan Wanita Sosial
 - d. PPI
 - e. PPPI
7. Berikut ini yang termasuk program kerja gerakan perempuan dalam bidang sosial, kecuali...
- a. Gerwani
 - b. Putri Mardika
 - c. Kowani
 - d. Perwari
 - e. Wanita Marhaen
8. Berikut ini yang termasuk dalam kebijakan pemerintah Orde Baru tentang peran perempuan, kecuali...
- a. Perempuan sebagai pendamping suami
 - b. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan
 - c. Perempuan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga
 - d. Perempuan mendapat kebebasan dalam segala bidang termasuk politik
 - e. Perempuan sebagai ibu dan mengurus pendidikan anak-anak.

G= Jumlah benar x 5

II. Jawablah soal berikut dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan perempuan Indonesia! **(Skor 15)**
2. Uraikan perbandingan perkembangan gerakan perempuan Indonesia dari masa Pergerakan Nasional hingga Orde Baru! **(Skor 20)**
3. Apa yang melatarbelakangi gerakan perempuan dibatasi dengan peran domestifikasi pada masa Orde Baru! **(Skor 10)**
4. Jelaskan nilai-nilai (minimal 3) yang dapat kamu ambil dari perkembangan gerakan perempuan Indonesia! **(Skor 15)**

Nproduk= PG + Uraian

b. PENILAIAN AFEKTIF

- d) Teknik : Non tes
- e) Bentuk : Instrumen Observasi Kinerja
- f) Instrumen Observasi Kinerja untuk Penilaian Sikap

Kelompok :

No	Nama Siswa	Aspek yang dinilai			Jmlh Nilai	Rata-rata
		Semangat Bekerjasama	Tanggung Jawab	Tenggan Rasa		
1						
2						
3						

Keterangan :

Kriteria Penilaian :

Aspek Semangat Kerja

Nilai 3 : Baik
Mau bekerjasama dengan semua teman

Nilai 2 : Sedang
Dalam bekerjasama kurang begitu baik

Nilai 1 : Kurang
Tidak mau bekerjasama dengan teman

Aspek Tanggung Jawab

Nilai 3 : Baik
Rasa tanggung jawab tinggi

Nilai 2 : Sedang
Kurang ada rasa tanggung jawab

Nilai 1 : Kurang
Kurang ada tanggung jawab / seenaknya sendiri

Aspek Tenggan Rasa

Nilai 3 : Baik
Menghargai guru dan teman lain

Nilai 2 : Sedang
Kurang menghargai guru dan teman lain

Nilai 1 : Kurang

Sikapnya cuek atau tidak dapat menghargai guru dan teman lain

C.PENILAIAN PSIKOMOTORIK

➤ Jenis tagihan: Non Tes (Penugasan)

Soal: Buatlah uraian analitis mengenai topik-topik berikut:

- 1) Latar belakang lahirnya gerakan perempuan Indonesia
- 2) Peran gerakan perempuan Indonesia dalam perjuangan kelompok dan masyarakat sosial.
- 3) Munculnya kebijakan-kebijakan domestifikasi peran perempuan pada masa Orde Baru.
- 4) Dampak kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap pergerakan perempuan Indonesia.
- 5) Nilai dan makna yang didapat dalam mempelajari pergerakan perempuan Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

a. Penampilan Keterampilan Kooperatif

No	Nama	Menghargai teman	Mengambil Pertanyaan	Mempresentasikan Hasil	Mendengarkan Dengan aktif	Jumlah
1						
2						
3						
4						
5						

➔ Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1—5 dengan kriteria

- a. Skor I: pasif tidak kooperatif dan tidak menghargai teman
- b. Skor II: pasif tidak kooperatif tetapi dapat menghargai teman
- c. Skor III: pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- d. Skor IV: aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- e. Skor V: sangat aktif, sangat kooperatif dan dapat menghargai teman

$$N_{proses} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{15} \times 100 \%$$

$$NA = \underline{N_{produk} + N_{proses}}$$

Lampiran Jawaban Penilaian Kognitif

Kunci Jawaban

I. Pilihan Ganda

- 1. B 5. D
- 2. A 6. A
- 3. C 7. B
- 4. E 8. D

II. Uraian

1. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan perempuan Indonesia:

- a) Adanya pembatasan ruang publik bagi anak perempuan dalam keluarga.
- b) Adanya tradisi yang secara struktural dan membudaya mengharuskan kaum perempuan tidak memiliki kebebasan dan harus patuh terhadap tradisi tersebut.
- c) dididik untuk menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai keterampilan domestik tanpa menjangkau keterbukaan dan kemampuan dalam bersosialisasi dan berpolitik.
- d) tidak mendapat kesempatan dalam pendidikan.

2. Perbandingan perkembangan gerakan perempuan Indonesia dari masa Pergerakan Nasional hingga Orde Baru

No.	Klasifikasi	Pergerakan Nasional	Pasca Kemerdekaan	Orde Baru
1.	Visi dan Misi	Menghapus penindasan tradisi kolonial dan feodal	Menghapus penindasan terhadap imperialisme dan kolonialisme, ikut serta dalam program revolusioner	Menghapus program perempuan independen, ditujukan pada aktivitas domestik dan program pemerintah
2.	Organisasi-	Putri Mardika	Perwari, Gerwis,	Dharma Pertiwi,

	Organisasi	Pawiyatan Wanito Aisyiah Wanita Utomo Wanita Katolik Wanita Taman Siswa, Isteri Sedar, Fujinkai	Barisan Buruh Wanita, Kowani, Gerwani	Dharma Wanita, PKK
3.	Tantangan	Strukturalisasi sistem feodal dan tradisi	Partai-partai politik	Pemerintah

3. Latarbelakang gerakan perempuan dibatasi dengan peran domestifikasi pada masa Orde Baru

- a) Adanya kedekatan organisasi-organisasi perempuan dengan Presiden sebelumnya yaitu Ir. Sukarno
- b) Kegiatan-kegiatan organisasi perempuan dianggap radikal karena didukung oleh PKI
- c) Terjadi peristiwa G30S dan “Lubang Buaya” yang membawa organisasi perempuan terlibat dalam peristiwa tersebut, oleh pemerintah Orde Baru kejadian tersebut direkayasa.
- d) Adanya sistem pembangunan dan strukturalisasi peran perempuan untuk mengurangi pihak oposisi rezim dalam partai politik

4. Nilai-nilai (minimal 3) yang dapat kamu ambil dari perkembangan gerakan perempuan Indonesia

a) Nilai daya juang

Gerakan perempuan sejak awal pergerakan nasional sudah memperlihatkan semangat dan daya juang yang tinggi. Meski harus melewati banyak tantangan, mereka tidak pernah lelah, bahkan banyak program perjuangan yang terus menjadi motivasi dalam perjuangan bangsa. Program-program tersebut ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap feodalisme, imperialisme, kolonialisme, dan strukturalisasi dari pemerintah.

b) Nilai kebersamaan dan persatuan

Gerakan perempuan memberi motivasi dengan membawa seluruh kaum perempuan Indonesia untuk bangkit bersama, tanpa adanya semangat pelopor untuk menjalin kebersamaan dan persatuan, maka cita-cita mulia berpartisipasi dalam perjuangan bangsa tidak akan pernah tercapai. Dalam hal ini, kebersamaan dan persatuan merubah sistem masyarakat menjadi lebih demokratis sehingga keadilan pun mulai dapat dirasakan kaum marginal.

c) Nilai kemanusiaan

Gerakan perempuan membawa semangat kemanusiaan yaitu persamaan hak dan keadilan bagi sesama manusia. Dalam hal ini, mereka memberi pengetahuan dan nilai bahwa perjuangan perempuan tidak harus ditentukan oleh penguasa, tetapi ditentukan dari aspirasi masyarakat yang tertindas.

